

# INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT TRANSMIGRASI JAWA:

Di Desa Purwosari Kecamatan Tamban  
Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan



Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat

950-959)

Lisyawati Nurcahyani  
Junior Purba

**Lisyawati Nurcahyani  
Juniar Purba**



---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**



TUT WURI HANDAYANI

**INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT TRANSMIGRASI JAWA**

Penulis: Lisyawati Nurcahyani, Juniar Purba  
Editor: Dhanisa  
Tata Sampul: Wulan  
Tata Isi: Ansara  
Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Desember 2018

Penerbit  
DIVA Press  
(Anggota IKAPI)  
Sampangn Gg. Perkutut No.325-B  
Jl. Wonosari, Baturetno  
Banguntapan Yogyakarta  
Telp: (0274) 4353776, 081804374879  
Fax: (0274) 4353776  
E-mail:redaksi\_divapress@yahoo.com  
sekred.divapress@gmail.com

Blog: [www.blogdivapress.com](http://www.blogdivapress.com)  
Website: [www.divapress-online.com](http://www.divapress-online.com)

Balai Pelestarian Nilai Budaya

Kalimantan Barat

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nurcahyani, Lisyawati, Juniar Purba,

*Integrasi Sosial Masyarakat Transmigrasi Jawa*/Lisyawati Nurcahyani, Juniar Purba;  
editor, Dhanisa—cet. 1—Yogyakarta: DIVA Press, 2018

132 hlmn; 15,5 x 23 cm  
ISBN 978-602-391-678-8

I. Penelitian  
II. Dhanisa

I. Judul

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



## *Kata Pengantar*

**P**uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat-Nya, penulisan buku yang berjudul *Integrasi Sosial Masyarakat Transmigrasi Jawa; Desa Purwosari Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan* dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang ditentukan. Penulisan ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat tahun anggaran 2018.

Kegiatan penulisan ini bertujuan untuk menghimpun dan mendokumentasikan tentang sejarah dan integrasi transmigrasi masyarakat Jawa ke Desa Purwosari, Kecamatan Barito Kualas, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya penulisan ini, dapat diketahui tentang perjalanan sejarah masyarakat Jawa dalam memulai kehidupannya di tempat baru dan menjadi padu dengan alam dan masyarakat lokal. Melalui pengungkapan sejarah diharapkan generasi muda, masyarakat, dan pengambil kebijakan

mengetahui tentang sejarah transmigrasi dan integrasi sosial masyarakat Jawa di Desa Purwosari.

Penulisan laporan ini dapat terwujud dengan adanya kerja sama dan arahan yang baik dari Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya, Kepala Prodi Sosiologi Unlam, tenaga pengajar Unlam (Prof. Herry Porda dan Drs. Zainal Anis), pegawai perpustakaan Unlam (Ibu Dese), tokoh masyarakat di Desa Purwosari, rekan-rekan BPNB, dan informan lain yang tidak dapat kami sebutkan. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan ini, kami ucapkan terima kasih.

*Tiada gading yang tak retak.* Demikian pula dalam penulisan ini, kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik sangat bermanfaat untuk kesempurnaan tulisan ini. Harapan kami, semoga hasil tulisan ini dapat menambah khazanah dan kesejarahan, serta membawa manfaat bagi kita.

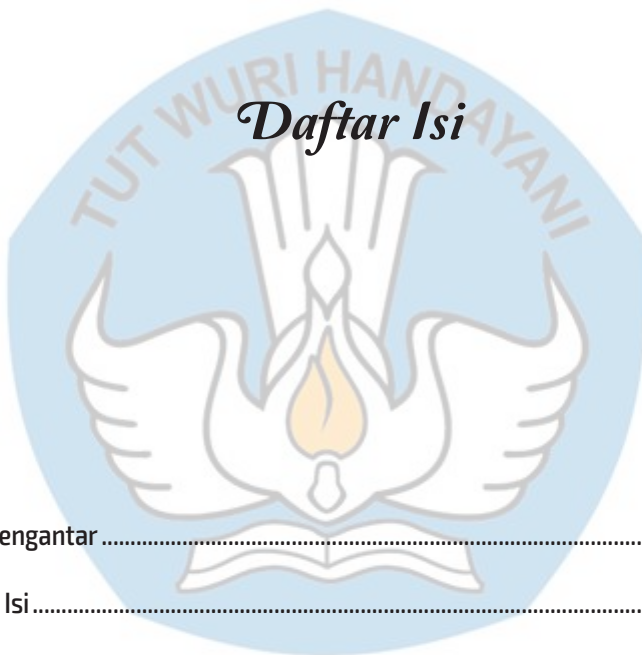
Pontianak, November 2018

---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya**  
**Kalimantan Barat**

**Tim Penulis**





## *Daftar Isi*

Kata Pengantar .....	3
Daftar Isi .....	5
Daftar Gambar.....	7

---

Bab I	Pendahuluan.....	9
-------	------------------	---

## Balai Pelestarian Nilai Budaya

A.	Latar Belakang.....	9
B.	Permasalahan .....	11
C.	Ruang Lingkup .....	12
D.	Tujuan Penelitian.....	13
E.	Manfaat Penelitian.....	13
F.	Kajian Sumber .....	14
G.	Kerangka Pemikiran .....	16
H.	Metode Penelitian .....	20

Bab II	Sejarah Transmigrasi Masyarakat Jawa .....	23
A.	Pra-Kolonial Belanda .....	23
B.	Pasca Kolonial Belanda .....	59
Bab III	Perkembangan dan Perubahan Desa Purwosari .....	65
A.	Kedatangan Transmigrasi .....	66
B.	Perkembangan Desa Purwosari .....	72
C.	Perubahan Sosial Budaya .....	79
Bab IV	Integrasi Pertanian dan Budaya Jawa di Desa Purwosari .....	87
A.	Pertanian .....	89
B.	Adat Istiadat .....	93
C.	Kesenian.....	103
D.	Kuliner.....	114
Bab V	Penutup.....	117
A.	Kesimpulan.....	117
B.	Saran .....	120
Daftar Pustaka .....		121
Daftar Informan.....		129

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**



## *Daftar Gambar*

Gambar 1. Handil atau Saluran Air di Desa Purwosari yang Berbatasan dengan Jalan Aspal (Sebelah Kanan) dan Rumah Penduduk (Sebelah Kiri)

Gambar 2. Kepala Desa yang Pernah Bertugas di Desa Purwosari

---

Gambar 3. Memasuki Desa Purwosari Kecamatan Tamban

Gambar 4. Salah Satu Jembatan di Desa Purwosari

Gambar 5. Keripik Hasil Olahan Masyarakat Desa Purwosari





---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**



# *Bab I*

## *Pendahuluan*

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang dilatarbelakangi oleh sekumpulan masyarakat yang berbeda suku, agama, dan budaya. Keanekaragaman ini merupakan potensi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, potensi ini juga bisa menimbulkan perpecahan antarsuku, agama, dan budaya. Ketika masyarakat menyadari akan pentingnya persatuan, maka potensi ini akan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Akan tetapi, ketika masyarakat tidak memahami potensi ini, maka akan menimbulkan gesekan-gesekan dalam masyarakat yang memicu timbulnya konflik.

Tujuan kedatangan tim kami ke Desa Purwosari adalah untuk melihat lebih jauh proses integrasi yang terjadi di desa tersebut. Lokasi Desa Purwosari dapat dicapai dengan dua cara yaitu melalui jalur sungai dan jalan darat. Tim kami memutuskan untuk melalui

jalan darat yang membutuhkan waktu sekitar dua jam dengan kecepatan sedang. Pertama kali kami memasuki Desa Purwosari, yang terlihat adalah hamparan sawah yang menghijau dengan parit-parit kecil dan besar mengelilinginya, terlihat berbeda dengan model persawahan yang ada di Jawa.

Beberapa kali kami menjumpai para petani yang baru pulang dari sawah sambil membawa peralatan sawah dengan berjalan kaki bersama-sama. Kehidupan yang terlihat menunjukkan kebahagiaan yang tampak jelas di wajah mereka. Dengan ramah, mereka menunjukkan jalan masuk ke Desa Purwosari .

Memasuki Desa Purwosari, terlihat banyak bangunan rumah berderet di sepanjang jalan, dengan banyak tanaman hijau di setiap pekarangan rumah penduduk. Kesan pertama kami adalah ciri khas rumah penduduk berbentuk rumah panggung, tidak menunjukkan bahwa itu adalah rumah para trans Jawa yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.

Kami kemudian mampir di sebuah warung sederhana untuk membeli minuman dan makan ala kadarnya yang dijual di warung itu. Makanan yang terhidang adalah makanan umum yang biasa kita jumpai, yaitu soto, bakso, serta beberapa lauk, dan tidak menunjukkan makanan khas dari Jawa. Penjualnya kebetulan masih bisa berkomunikasi dengan bahasa Jawa, karena dia menetap di sana baru beberapa tahun. Kami juga bertemu dengan beberapa anak muda yang tidak fasih dengan bahasa Jawa, tetapi setidaknya mereka memahami bahasa Jawa walaupun sedikit.

Kami juga berjumpa dengan informan yang sudah tua dan menjadi generasi ketiga setelah bapaknya membawa dirinya ke Purwosari. Informan itu masih bisa memahami dan menggunakan bahasa Jawa, tetapi anak-anaknya yang kebetulan kami wawancara, hanya sedikit saja memahami bahasa Jawa.

Kesan yang terlihat menunjukkan bahwa masyarakat Jawa di Desa Purwosari tidak memperlihatkan ciri khas masyarakat Jawa, tetapi terlihat seperti masyarakat Banjar pada umumnya. Hal ini terlihat dari bangunan, pakaian, sarana dan prasarana yang digunakan, serta komunikasi dengan masyarakat luar dan tetangganya menggunakan yang logat Banjar. Kondisi tersebut sekilas juga menunjukkan bahwa integrasi yang terjadi berjalan secara alamiah, serta terjadi harmoni antara Jawa sebagai pendatang dan Banjar sebagai masyarakat lokal. Apakah ini menunjukkan masyarakat Jawa telah berakulturisasi, sehingga menghasilkan budaya *mix culture*? Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut serta akan menjadi bahan kajian dari integrasi sosial yang terjadi di Desa Purwosari.

## B. Permasalahan

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa penelitian ini mengambil tema tentang integrasi sosial dan budaya di wilayah koloni atau transmigrasi di Desa Purwosari, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Di sini, masyarakat Jawa merupakan subjek kajian sebagai masyarakat pendatang, begitu juga dengan masyarakat lokal yang ada di sekitar wilayah itu. Keduanya, dalam perkembangannya, melakukan proses adaptasi dan interaksi. Ada sejumlah komponen yang bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu struktur yang ada dan unsur pendatang yang akan saling berhadapan. Dari situ bisa diketahui adanya fenomena saling mempengaruhi antara unsur lokal dan pendatang yang terjadi selama proses integrasi.

Dua subjek utama muncul di sini, yaitu masyarakat lokal dan masyarakat Jawa pendatang dalam berbagai unsur serta aspeknya.

Dengan adanya proses integrasi mereka, persoalan utama yang akan diangkat adalah adanya titik kesamaan yang memudahkan integrasi sehingga mengakibatkan perpaduan dua struktur dan menghasilkan struktur baru sebagai produk dari integrasi. Tanpa adanya titik kesamaan itu tentu saja tidak mungkin terjalin hubungan interaktif yang akan membawa hasil baru (*reproduction*).

Dari pemaparan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah transmigrasi pada masa kolonial Belanda?
2. Bagaimana perkembangan sosial dan budaya Desa Purwosari sebagai lokasi transmigrasi?
3. Bagaimana bentuk integrasi melalui pertanian dan budaya Jawa di Desa Purwosari?

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan hasil analisis dari proses rekonstruksi yang kemudian akan dicantumkan sebagai kesimpulan penelitian ini.

---

### C. Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, dengan fokus pada peristiwa yang terjadi di masa lalu. Batasan tematik dalam penelitian ini difokuskan pada integrasi sosial yang terjadi karena adanya proses interaksi sehingga terjadi akulturasi dengan menampilkan bukti-bukti adanya integrasi di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya.

Kami membatasi wilayah penelitian di Desa Purwosari, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, di mana wilayah ini merupakan lokasi transmigrasi pertama pada masa pemerintahan Kolonial

Belanda. Sementara, batasan periodisasi (temporal) diambil dari kebijakan pemerintah Belanda yang untuk pertama kalinya mendatangkan para transmigran Jawa ke lokasi pada tahun 1937. Kemudian, tahun 1965 merupakan peristiwa perubahan status wilayah Tambanan menjadi Kecamatan Tambanan.

## D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Menggambarkan sejarah transmigrasi masa kolonial dan masa kemerdekaan.
2. Menjelaskan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
3. Menjelaskan bentuk integrasi melalui pertanian dan sosial budaya Jawa.

## E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran integrasi yang sesungguhnya tanpa mengesampingkan sosial budaya antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal. Dari proses integrasi yang terjadi di Desa Purwosari menunjukkan adanya *mix culture* atau percampuran dua kebudayaan antara Jawa dan Banjar secara alamiah. Percampuran sosial budaya ini melahirkan sebuah budaya baru, di mana wadahnya tetap menggunakan adat Jawa namun isinya telah mengalami perkembangan dan bercampur dengan sosial budaya Banjar. Dengan demikian, *mix culture* yang terjadi di Desa Purwosari dapat dijadikan sebagai sebuah model integrasi yang berhasil. Integrasi yang berjalan secara damai dan



harmoni antara masyarakat Jawa dan masyarakat lokal khususnya Banjar.

Hasil penelitian ini juga bisa dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan, khususnya di tingkat pemerintahan daerah dalam meningkatkan integrasi di wilayah Kalimantan Selatan yang multi-etnik. Dari situ, para pejabat lokal akan dapat menyesuaikan kebijakan mereka dan aplikasinya terhadap kondisi yang ada, sehingga mampu menghindari adanya benturan yang mengarah pada disintegrasi sosial seperti yang berlangsung di Provinsi Kalimantan Barat dan Tengah beberapa waktu lalu, terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Manfaat akademis karya ini adalah memberikan suatu kontribusi bagi historiografi lokal di Kalimantan Selatan, dengan adanya sebuah karya penelitian sejarah yang menggunakan pendekatan antropologis sosiologis, karena difokuskan pada proses interaksi dan akulturasi yang terjadi pada kehidupan sosial budaya. Dari karya ini, diharapkan suatu penelitian serupa akan dilakukan di daerah lain, mengingat produk dari integrasi yang berlangsung damai dan berdampak positif akan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, baik di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, hasil penelitian ilmiah ini tidak hanya bisa dimanfaatkan sebagai referensi, tetapi juga dapat dijadikan pijakan untuk perdebatan politis yang melibatkan polarisasi dalam masyarakat Kalimantan Selatan yang pluralistis.

## **F. Kajian Sumber**

Mengingat penelitian ini memiliki fokus pada peristiwa dan perkembangan yang terjadi di masa lalu, sumber informasi yang

digunakan adalah data yang berasal dari masa lalu. Data tersebut bisa bersifat tekstual yang terdiri atas data arsip atau bisa bersifat lisan yang merupakan warisan legenda atau kisah lisan yang hidup di antara masyarakat lokal. Informasi yang diperoleh dari kedua sumber ini akan menjadi data yang melewati proses kritik sumber dan akan dianalisis sebagai fakta sejarah landasan rekonstruksi.

Data tekstual yang dimaksudkan di atas berasal dari dokumen atau arsip dengan prioritas pada arsip otentik sebagai warisan dari kegiatan administrasi masa lalu. Arsip ini tersimpan di sejumlah lembaga penyimpanan dokumen baik di Jakarta maupun kota lain di Jawa. Di Jakarta, penelusuran dan penelitian akan dilakukan di pusat penyimpanan arsip yaitu di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI). Selain itu, penelitian juga akan dilakukan di sejumlah perpustakaan dan pusat penyimpanan data sekunder yang berada di Yogyakarta.

Beberapa literatur yang terkait dengan penelitian ini adalah skripsi Latipah Mayasari, mahasiswa FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2008. Dalam skripsinya yang berjudul “Dinamika Sosial Transmigran di Purwosari Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala 1937–1965”, dituliskan tentang proses dinamisasi yang terjadi di Desa Purwosari. Penelitian ini menitikberatkan pada perubahan yang terjadi di Desa Purwosari baik bidang ekonomi, budaya, maupun pola-pola sosial yang terjadi di Desa Purwosari. Sementara, proses integrasi yang terjadi antara para trans Jawa dan penduduk lokal tidak terlihat jelas dalam tulisan itu. Meskipun demikian, tulisan tersebut banyak membantu dalam menggambarkan secara umum Desa Purwosari.

Literatur kedua berbentuk tesis yang ditulis oleh Suhartiningsih dengan judul “Perubahan Ritual Peralihan Tahap Kelahiran Budaya

Jawa pada Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala”. Dalam tesis itu dijelaskan tentang proses pergeseran atau perubahan ritual dalam budaya kelahiran Jawa. Tulisan ini menitikberatkan tentang perubahan budaya kelahiran dari faktor- faktor, seperti interaksi, difusi, sistem pendidikan, sikap, toleransi, dan lain-lain. Sementara, untuk proses integrasi yang terjadi di Desa Purwosari tidak menjadi pembahasan dalam tesis ini. Meskipun demikian, tulisan ini memberikan kontribusi terhadap perubahan yang terjadi dalam budaya kelahiran Jawa sebagai salah satu referensi.

## G. Kerangka Pemikiran

Meskipun penelitian ini adalah penelitian sejarah, namun tema penelitian ini adalah integrasi sosial, khususnya unsur-unsur budaya Jawa dalam struktur sosial masyarakat lokal, walaupun awal kehadiran mereka dilatarbelakangi oleh kebijakan politik kolonisasi pemerintah kolonial Belanda.

---

Kebijakan politik kolonisasi merupakan perwujudan dari politik etis (*etische politiek*) gagasan Van Deventer. Politik etis adalah politik balas budi yang pada garis besarnya meliputi program emigrasi, edukasi, dan irigasi. Kebijakan kolonisasi muncul ketika melihat kondisi kemiskinan di Pulau Jawa yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan lahan pertanian yang memadai. Dari kebijakan tersebut, kemudian muncullah pemikiran untuk membangun desa-desa baru di luar Jawa yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik.

Di tempat yang baru, para trans Jawa harus beradaptasi dengan lingkungan mereka yang baru, yang secara geografis sangat berbeda

dengan kondisi di Jawa. Selain beradaptasi, masyarakat trans Jawa juga melakukan interaksi dengan masyarakat lokal. Dari proses interaksi inilah terjadi akulturasi sosial antara masyarakat trans Jawa sebagai pendatang dengan masyarakat lokal.

Maka, pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah sosial yang menekankan pada interaksi sosial dan akulturasi yang tentunya akan mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Sejalan dengan perubahan sosial, Sartono menyatakan bahwa masyarakat dikonsepsikan sebagai sistem yang mempunyai fungsi adaptif (ekonomi), integrasi (*society*), pertahanan diri (*culture*), dan tujuan (*polity*).<sup>1</sup>

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan struktural yang berusaha mengungkapkan sifat, akibat, dan proses perubahan struktur sosial sebagai suatu bentuk satuan (*real entity*). Dalam pendekatan yang bersumber dari strukturalisme, struktur dianggap sebagai suatu satuan yang melekat tetapi tidak tampak sebagai pengatur kehidupan sosial suatu masyarakat. Bentuknya terwujud dalam pola hubungan sosial antarkomponennya yang diatur dengan sejumlah perangkat dan kaidah perilaku sosial mereka, yang didasari oleh aspek geografis sebagai bentuk struktur yang sulit dan lama mengalami perubahan.<sup>2</sup>

Selain itu, untuk mengarahkan fokus analisis dalam rekonstruksi akhir tentang integrasi, maka dalam penelitian ini dikaitkan dengan integrasi nilai-nilai budaya. Pengertian konseptual tentang integrasi sendiri perlu dipahami sebagai dasar pemikiran analisis.

---

<sup>1</sup> Sartono Kartodirdjo dalam Suhartono W.P., *Teori & Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 69.

<sup>2</sup> Christopher Lloyd, *The Structures of History* (Oxford, 1989), hlm. 80. Fernand Braudell membawa strukturalisme dari Ferdinand de Saussure yang awalnya diterapkan pada ilmu bahasa ke dalam penelitian sejarah. Dalam pandangan Braudell, geografi menjadi struktur yang menentukan tiap komponennya karena bersifat permanen dan menjadi kontributor utama dalam membentuk dan mengembangkan komponen itu.

Ada berbagai teori tentang integrasi budaya yang muncul dalam ranah antropologi di zaman modern ini, salah satunya adalah teori integrasi fungsional. Prinsip dasar teori ini adalah sebagai berikut:

*Every culture trait and culture complex in culture has some special work to do and it exists for its aim to do it. When its work is done, it ends. No cultural trait has any importance without work. Every culture is found to be internally complete; its every part is closely related to the other and no part can be known by separating it from other parts. Every culture trait can be defined with reference to other trait. Various kinds of social mental and material factors are included in culture. There is an internal coordination among the factors. This coordination makes every culture an integrated whole.<sup>3</sup>*

Setiap unsur dan kompleks budaya dalam budaya memiliki kinerja khusus untuk dilakukan dan ada bagi tujuan melakukannya. Ketika pekerjaan ini selesai, semua berakhir. Tidak ada unsur budaya yang bermakna tanpa kinerja itu. Setiap budaya diketahui lengkap secara internal; setiap bagiannya saling terkait erat dan tidak ada bagian bisa dikenal dengan memisahkannya dari bagian lain. Setiap unsur budaya bisa dijelaskan dengan merujuk pada sifat lain. Berbagai bentuk faktor mental sosial dan material tergabung dalam budaya. Ada koordinasi internal di antara faktor-faktor ini. Koordinasi ini menjadikan setiap budaya terpadu keseluruhan.

Menurut teori fungsional di atas, unsur-unsur budaya akan melakukan integrasi ketika ada kebutuhan bahwa di antara mereka tidak bisa mencapai tujuan secara terpisah. Karena kesamaan kebutuhan ini, proses integrasi budaya dipermudah melalui

---

<sup>3</sup> Rajendra K. Shama, *Social Change and Social Control* (New Delhi: Atlantic Publishers, 2007), hlm. 141.



koordinasi internal, tetapi dengan syarat masing-masing memiliki tugas atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan yang sama.

Teori di atas bisa diketahui dalam proses integrasi satu budaya atau dua budaya yang saling sepadan. Namun, bagi dua budaya yang tidak sepadan (*unbalance*), ada kesulitan untuk mengaplikasikannya. Ketimpangan akan muncul ketika satu faktor membutuhkan faktor lain yang tidak selalu merespons serupa. Hal ini dinyatakan dalam teori integrasi budaya yang dilontarkan oleh Ruth Benedict sebagai berikut:

*There is a particular style in every part of a culture and these separate styles combine together and present a grand design of the culture as a whole. The production of this re-union in culture is due to the common tendency seen in all the aspects of culture. The main tendency is called a special genius of culture. It is this genius of a culture that brings about its integration.*

Ada suatu gaya khusus pada setiap bagian suatu budaya dan gaya terpisah ini bersatu bersama serta menyajikan sebuah desain seluruh budaya. Produksi penyatuan kembali dalam budaya ini disebabkan oleh kecenderungan bersama yang tampak dalam semua aspek budaya. Kecenderungan utama ini disebut sebagai suatu kegeniusan khusus budaya. Kegeniusan suatu budaya ini menciptakan integrasinya.

Ruth Benedict mengakui adanya kesamaan kebutuhan dari unsur-unsur budaya untuk melakukan integrasi. Namun, menurutnya ada unsur kegeniusan budaya yang berperan dalam memicu terjadinya integrasi, yaitu bentuk suatu kebutuhan dominan yang dimiliki oleh satu kelompok tetapi dibutuhkan oleh kelompok lain.



Dengan adanya kegeniusan budaya ini, proses integrasi akan lebih mudah berlangsung di bidang budaya.

Kedua pendekatan teoritis konseptual di atas akan digunakan untuk menganalisis proses integrasi yang berlangsung di wilayah Kecamatan Tamban secara umum dan Desa Purwosari pada khususnya, terutama yang terjadi antara unsur-unsur budaya Jawa dan lokal, baik budaya Dayak maupun Banjar. Dari situ akan tampak keunggulan atau kelebihan budaya apa yang akan memudahkan terjadinya integrasi.

## H. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah bidang sejarah, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode ini terdiri atas empat tahap, yaitu *heuristik*, *kritik*, *interpretasi*, dan *rekonstruksi*. Masing-masing tidak saling terpisah meskipun memiliki bidang tugas sendiri-sendiri.

*Heuristik* merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan di lapangan maupun pusat-pusat data. Data diperoleh di pusat-pusat penyimpanan data, seperti Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional RI. Keduanya menjadi lembaga yang menyimpan sumber primer sebagai informasi utama bagi proses penyusunan laporan akhir. Di samping pengumpulan data sumber primer, juga dilakukan pengumpulan data sumber sekunder, yakni dari laporan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan literatur-literatur pendukung. Sumber sekunder ini biasanya ada di perpustakaan Jakarta maupun perpustakaan-perpustakaan daerah.

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah kedua adalah melakukan *kritik* terhadap sumber. Tujuan tahap ini adalah untuk

membuktikan sumber mana yang dianggap valid serta terkait dengan objek dan tema penelitian. Kritik memiliki dua tahap, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern ditujukan sebagai pembuktian validitas sumber secara fisik, yang mempertimbangkan nilai otentisitas, originalitas, integritas, dan kredibilitas. Semuanya ini menyangkut bukan hanya arsip secara fisik, melainkan juga usia dan pembuat arsip, serta kelengkapan berkasnya.

Sementara, kritik intern lebih ditujukan pada materi arsip atau sumber yang berfungsi sebagai informasi. Ada tiga unsur yang menjadi pedoman kritik intern, yaitu isi (*content*), konteks, dan struktur arsip. Isi lebih dikaitkan dengan kaidah yang berlaku pada masa pembuatan arsip, seperti tata bahasa, bentuk huruf, dan sebagainya. Konteks berkaitan dengan relevansi arsip tersebut dengan tema dan objek penelitian. Adapun struktur arsip terkait dengan aturan-aturan administrasi saat pembuatan surat, yang menentukan tertib administrasi dan kriteria arsip, seperti jenis arsip apa.

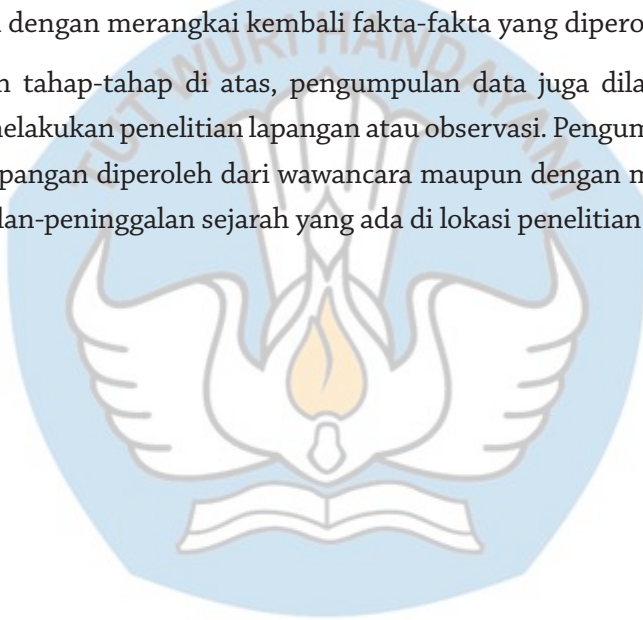
Kemudian, langkah ketiga adalah *interpretasi* sebagai tindak lanjut dari hasil kritik. Hasil kritik adalah sejumlah data yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian yang harus melewati proses interpretasi. Interpretasi bertujuan untuk mengambil makna dari masing-masing data, dengan cara analisis oleh peneliti.

Analisis data menjadi tahap pertama dari interpretasi, sehingga makna yang diambil akan menjadi fakta dalam pemikiran peneliti. Fakta ini menjadi dasar utama bagi proses rekonstruksi peristiwa masa lalu. Akan tetapi, mengingat sumber yang digunakan dalam penelitian cukup banyak dan saling terpisah, dapat diduga bahwa akan banyak fakta yang diambil dan terdapat dalam pemikiran peneliti. Agar fakta bisa berkesinambungan, maka perlu dilakukan sintesis fakta. Dengan tahap sintesis, masing-masing fakta akan

dirangkai menjadi suatu kesatuan utuh yang membentuk kerangka rekonstruksi.

Sebagai tahap terakhir metode sejarah adalah *rekonstruksi*. Rekonstruksi yaitu mendeskripsikan kembali peristiwa-peristiwa masa lalu dengan merangkai kembali fakta-fakta yang diperoleh.

Selain tahap-tahap di atas, pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan atau observasi. Pengumpulan data di lapangan diperoleh dari wawancara maupun dengan melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di lokasi penelitian.



---

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



## *Bab II* *Sejarah Transmigrasi* *Masyarakat Jawa*

### **A. Pra-Kolonial Belanda**

#### **1. Migrasi Bagian dari Etis**

Kebijakan etis dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal tahun 1900, bertolak dari prinsip utang budi (*een eereschuld*) yang dilontarkan oleh Conraad Th. van Deventer pada tahun 1898.<sup>4</sup> Sebagai bagian dari komoditas pertarungan elite politik kolonial di Den Haag, kebijakan terhadap tanah koloni yang selama abad XIX didasarkan pada eksploitasi ekonomi baik oleh negara maupun swasta, menjadi sasaran penyerangan dan akhirnya langkah serta kebijakan pemerintah untuk mengubahnya menjadi lebih populis.

---

<sup>4</sup> Conrad Theodore van Deventer, "Een Eereschuld" dalam *De Gids*, tahun 1899, vol. 17, hlm. 250.

Dengan dipengaruhi oleh ide-ide humanis Kristen yang dominan dalam politik negara-negara kolonial Eropa pada awal abad XX, Ratu Wilhelmina dalam pidatonya pada awal abad menyampaikan niatnya untuk melakukan perubahan besar dalam kebijakan kolonial demi kemajuan tanah koloni Hindia Belanda dan rakyatnya,<sup>5</sup> terutama tentang pemerintah Belanda yang memiliki kewajiban untuk mengangkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di tanah koloni yang selama ini telah memberikan banyak kontribusi bagi negara induk.

Sebagai realisasi dari kebijakan ekonomi-humanis ini, tiga program utama menjadi pilar politik etis, yaitu transmigrasi, edukasi, dan irigasi. Dari tiga program ini, pemerintah kolonial Belanda bermaksud mengentaskan lahir dan batin kemakmuran penduduk tanah koloni sekaligus pemeratakan kesejahteraan mereka lewat program perpindahan penduduk yang dikenal sebagai kolonisasi.<sup>6</sup> Dalam program ini, pemerintah tidak hanya menyebarkan penduduk untuk bisa mendapatkan lahan sekaligus membuat produktif lahan-lahan kosong yang belum digarap, melainkan juga menjadi pelindung dan koordinator dari program pengembangan wilayah luar yang rentan terhadap ancaman penetrasi pengaruh asing.

Program kolonisasi yang paling nyata sebagai bentuk perpindahan penduduk dari Pulau Jawa yang dianggap padat ke luar Pulau Jawa yang masih kosong dan perlu digarap agar membawa hasil yang produktif adalah proyek kolonisasi ke Lampung pada tahun 1905.<sup>7</sup> Akan tetapi, sasaran kolonisasi ini ternyata tidak

<sup>5</sup> Jennifer L. Foray, *Visions of Empire in the Nazi-Occupied Netherlands* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 37. Dengan pidato ratu ini, ada dugaan bahwa sejak itu Belanda berniat melakukan pembaharuan sistem pemerintahan menuju pemerintahan sendiri untuk koloni dan terlepas dari ketergantungan pada negara induk di Eropa.

<sup>6</sup> Petra Boudewijn, *Warm Bloed; de Representatie van Indo-Europeanen in de Indische Nederlandse Letterkunde (1860-Heden)* (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2016), hlm. 262.

<sup>7</sup> Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun, *Transmigrasi di Indonesia 1905–1985* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 13.

hanya sekadar untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah tersebut, tetapi juga bernuansa politik terutama berkaitan dengan keberhasilan Belanda dalam program pasifikasi atau penaklukan luar Jawa pada awal abad XX. Dengan alasan membuka daerah yang masih belum beradab dan terbelakang, para pembuat kebijakan kolonial melihat peluang bagi pengiriman penduduk (transmigrasi) seperti yang terjadi di Lampung sebagai suatu pilihan utama.<sup>8</sup>

Wilayah Kalimantan Selatan juga menjadi objek program pemerintah untuk pengiriman transmigrasi Jawa ke sana pada awal abad XX. Berbeda dengan pengiriman orang-orang Jawa pada akhir abad XIX sebelumnya yang lebih difokuskan untuk mengembangkan wilayah tersebut sebagai sumber produksi tropis yang potensial, kebijakan pada awal abad XX ditujukan dan dihubungkan dengan eksploitasi sumber daya mineral Kalimantan Selatan yang semakin marak menyusul dengan orientasi pada sektor pertambangan. Batu bara, minyak besi, emas, dan intan menjadi komoditas mineral bernilai tinggi bagi kepentingan finansial dan industri kolonial yang sangat strategis dan potensial. Oleh karena itu diperlukan tenaga untuk eksploitasi yang maksimal dan rutin. Alternatif untuk ini jatuh pada orang Jawa yang dianggap memiliki kemampuan dan potensi untuk pekerjaan itu.<sup>9</sup>

Akan tetapi, berbeda dengan pengiriman orang Jawa sebelumnya, kali ini program transmigrasi Jawa ke pusat-pusat eksplorasi pertambangan lebih dilakukan sebagai hubungan kerja formal. Pemerintah kolonial membuat pendaftaran kontrak kerja bagi orang Jawa yang bersedia berangkat ke Kalimantan Selatan untuk bekerja di sektor pertambangan bersama keluarganya. Mereka tidak boleh

<sup>8</sup> M. Kuitenbrouwer, "Nederland en de Menschenrechten 1795–1995" dalam Maarten Kuitenbrouwer en Marij Leenders, *Geschiedenis van de mensenrechten; Bouwsteenen Voor een Interdisciplinaire Benadering* (Hilversum: Verloren, 2000), hlm. 168.

<sup>9</sup> Marinus Barend Smits, *Over de landbouw in Nederlandsch Indie* (Baavia: J.B. Wouters Uitgeverij, 1929), hlm.168.



kembali atau meninggalkan pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu, dan wajib tinggal di lahan yang sudah disediakan dengan upah rutin sesuai kontraknya. Selain itu, kebutuhan logistik mereka akan dijamin dengan pencadangan lahan pertanian pangan yang khusus digarap oleh penduduk setempat bagi kepentingan pangan dan keluarga mereka selama bekerja, khususnya pada tahun-tahun pertama.<sup>10</sup>

Untuk memahami terlebih dahulu tentang kondisi setempat bagi keberhasilan program transmigrasi orang Jawa ini, pemerintah kolonial mengirimkan seorang ahli bernama Dr. A.W. Nieuwenhuis ke Kalimantan Selatan dan pedalaman. Sejak tahun 1899, Dr. A.W. Nieuwenhuis sudah mendarat di Banjarmasin dan melakukan pelayaran ke pedalaman menyusuri Sungai Mahakam hingga mencapai daerah pemukiman suku-suku Dayak Kenya di sana.<sup>11</sup> Pada 13 Desember 1900, setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan ke pedalaman Kalimantan, Nieuwenhuis tiba di Samarinda dan bertemu dengan Sultan Kutai di sana. Ia mengadakan pembicaraan dengan asisten residen tentang hasil penelitiannya serta potensi pedalaman Kalimantan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan tenaga penggarap dan pembuka lahan dari Jawa.<sup>12</sup>

Setibanya kembali ke Batavia, Nieuwenhuis membuat laporan kepada Gubernur Rooseboom tentang hasil pengamatannya di pedalaman Kalimantan, terutama di sisi barat daerah Kalimantan Selatan. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin ada harapan bila menyerahkan pengembangan daerah kepada penduduk pribumi yang umumnya masih primitif dan tinggal di dalam hutan dengan

---

<sup>10</sup> Roelof Broersma, *Handel en Bedrijf in Zuid en Oost Borneo* (Gravenhage: G. Naeff, 1927), hlm. 118. Menurut data yang dicatat di biro pusat statistik kolonial, pada dekade pertama abad XX, seluas 290 ribu bahu tanah disediakan untuk pertanian padi yang panennya dimaksudkan untuk memberi makan para pekerja tambang Jawa dan keluarganya.

<sup>11</sup> *Koloniaal Verslag over Het Jaar*, Thn. 1900, hlm. 35.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 1901, hlm. 33.

pola kehidupan tidak permanen. Ia mendukung adanya kolonisasi orang Jawa untuk menghuni, menggarap, dan mengembangkan daerah pedalaman Kalimantan Selatan yang dianggap paling potensial untuk itu.<sup>13</sup>

Sebagai upaya teknis untuk itu, Nieuwenhuis bahkan mengusulkan bagi perpindahan seluruh kampung atau desa di Jawa ke Kalimantan Selatan. Maksudnya adalah agar penduduk Jawa yang dipindahkan tidak merasa hidup dalam lingkungan yang baru dan asing bagi mereka sehingga akan mempengaruhi kejiwaannya untuk terus bertahan di daerahnya yang baru.<sup>14</sup> Pandangan ini dibenarkan oleh sejumlah pejabat kolonial yang yakin bahwa orang Jawa akan tetap mampu bertahan di daerah pemukimannya yang baru selama mereka diberi jaminan kehidupan yang layak dalam bentuk pekerjaan dan penghasilan rutin di samping keamanan bagi dirinya dan keluarganya.<sup>15</sup>

Akan tetapi, pandangan tersebut mendapatkan penentangan dari sejumlah anggota parlemen Belanda yang memikirkan anggaran untuk menutup kebutuhan perpindahan mereka. Karena keuangan kolonial yang terbatas dan tidak ada calon penampung serta pengusaha yang bersedia menutup seluruh warga desa untuk pindah dari Jawa, rencana pemindahan per desa atau kampung ditolak dalam sidang parlemen tanggal 25 November 1903. Meskipun demikian, parlemen mengabulkan usulan dari Menteri Koloni Kuyper bahwa empat daerah di Kalimantan Selatan akan dibuka bagi kolonisasi orang Jawa, yaitu Rantau, Kandangan, Barabei, dan Amuntai.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> "Dr. Nieuwenhuis over de Emigratie van Javanen" dalam *De Locomotief*, edisi 2 Januari 1903, lembar pertama.

<sup>14</sup> "Dr. Nieuwenhuis over de Emigratie van Javanen" dalam *De Sumatra Post*, edisi 19 Januari 1903, lembar kedua.

<sup>15</sup> "Het arbeidvraagstuk in de Buitenbezittingen" dalam *Het Nieuws van den Dag Voor Nederlandsch Indie*, edisi 7 Desember 1909, lembar kedua.

<sup>16</sup> "Het Emigratie Vraagstuk" dalam *Het Nieuws van den Dag Voor Nederlandsch Indie*,

Perdebatan ini akhirnya tidak selesai karena kondisi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertambangan khususnya emas dan intan mengalahkan arti penting kolonisasi. Para investor Belanda yang menanamkan modalnya di sektor penggalan dan pengasahan intan merekrut sendiri para pekerjanya lewat pendaftaran pekerja kontrak di beberapa kota di Jawa. Mereka, bersama beberapa orang Sunda dan Banjar yang direkrut secara lokal, menjadi tenaga kerja utama dalam sektor eksploitasi tambang intan, sementara penduduk lokal menggunakan tekniknya sendiri untuk mendapatkan sisa-sisa dari hasil eksploitasi emas lewat aliran anak-anak sungai di dekat pantai selatan Kalimantan.<sup>17</sup>

Pada kenyataannya, para pengusaha pertambangan swasta yang memperoleh konsesi untuk menambang produk tambang di Kalimantan Selatan ini bekerja terburu-buru sehubungan dengan perekrutan kuli mereka dari Jawa. Mereka ternyata belum sepenuhnya siap menampung para pendatang kontrak ini dengan segala fasilitasnya, sehingga membawa dampak yang fatal. Aspek perumahan dan kesehatan merupakan dua faktor paling penting dalam menghadapi kedatangan kaum pendatang Jawa ketika keduanya tidak mampu memenuhi kebutuhan. Akibatnya, dalam bulan-bulan pertama tahun 1903, banyak kuli Jawa ini yang sakit dan meninggal. Dari 542 orang kuli yang direkrut untuk penempatan di pedalaman Kalimantan Selatan, 175 orang meninggal karena penyakit tropis, sementara 197 orang menderita sakit dan segera dibawa ke poliklinik di Amuntai untuk mendapatkan pertolongan.<sup>18</sup>

---

edisi 6 Juni 1904, lembar kedua. Ada optimisme keberhasilan bagi kaum kolonis Jawa ini untuk membuka tanah di empat lokasi itu, karena contoh sejak tahun 1870-an membuktikan bahwa perkebunan dan pertanian yang berhasil adalah karya para perintis Jawa daripada penduduk Dayak dan Banjar setempat.

<sup>17</sup> A.S. Wheler dan J.H. Foran, "Diamonds in Dutch Borneo" dalam *The Mining Magazine*, Thn. 1923, vol. 29, hlm. 9.

<sup>18</sup> "Koelis op Mijn-en Landbouw Ondernemingen" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, edisi 3 April 1903, lembar kedua.

Kondisi kebersihan menjadi faktor utama dalam pola hidup orang-orang Jawa ini, terutama mereka yang bekerja di perkebunan pedalaman atau di kompleks pertambangan. Pada pertengahan tahun 1902 diketahui bahwa mereka menjadi korban penyakit kolera yang terdeteksi setelah melalui proses pemeriksaan oleh dinas kesehatan di Banjarmasin. Wabah ini melanda beberapa pemukiman kuli Jawa di pedalaman dan dianggap berasal dari faktor kebersihan yang diakibatkan oleh belum siapnya fasilitas yang menjadi penampung mereka.<sup>19</sup>

Situasi tersebut menyebabkan jumlah kuli kontrak Jawa yang direkrut oleh perusahaan pertambangan pemegang konsesi dari pemerintah menurun drastis dan tidak sesuai dengan harapan. Di antaranya perusahaan pertambangan Kahayan—yang memperoleh konsesi dari pemerintah pada 27 Februari 1902 untuk melakukan eksploitasi tambang emas atas lahan seluas 4.170 bahu di sepanjang aliran Sungai Barito daerah Amuntai—melaporkan pada 26 Maret 1902 bahwa jumlah kuli kontrak Jawa yang mereka rekrut tidak pernah bisa menjadi mayoritas. Pada 31 Desember 1901 hanya terdapat 31 kuli Jawa dibandingkan 126 kuli Cina dan 212 orang Amuntai serta 346 orang Dayak lokal. Jumlah ini hanya sedikit naik menjadi 38 kuli Jawa setahun kemudian dibandingkan 442 orang Amuntai dan 176 kuli kontrak Cina.<sup>20</sup>

Kenyataan ini membuktikan keraguan yang sebelumnya dilontarkan oleh sejumlah kalangan dalam parlemen Belanda pada akhir tahun 1902, yaitu mengenai kondisi kesehatan dan kesiapan untuk menanggulangi penyakit yang melanda kaum imigran ini. Beberapa pengamat memahami bahwa dari laporan Nieuwenhuis diketahui jika sebagian besar lahan pedalaman Kalimantan belum

<sup>19</sup> "Cholera" dalam *Algemeen Handelsblad*, edisi 18 Juli 1902, lembar kedua.

<sup>20</sup> "Het Mijnbouw Maatschappij Kahajan in 1901" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, edisi 29 Mei 1902, lembar kedua.

pernah tersentuh orang asing dan berpotensi mengandung penyakit yang berbahaya. Meskipun orang Jawa yang ditempatkan di sana dan membatat hutan diharapkan bisa membantu memajukan daerah tersebut lewat keahlian dan kelebihan mereka dalam bercocok tanam dibandingkan penduduk lokal, namun ketahanan kesehatan mereka dibandingkan orang pribumi diragukan. Solusi yang diajukan adalah agar lokasi pemukiman pendatang Jawa ini tidak masuk terlalu dalam, tetapi terbatas di tepi pantai atau aliran sungai besar di dekat muaranya, yang kondisinya tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan di Jawa.<sup>21</sup>

Persoalan lain yang dihadapi oleh orang-orang Jawa yang didatangkan di sana adalah masalah keamanan. Sampai awal abad XX, situasi perang di pedalaman Kalimantan sebagai dampak dari Perang Banjar tahun 1860 dan penghapusan Kesultanan Banjarmasin masih terasa. Untuk itu, mobilisasi pasukan Belanda di Kalimantan Selatan, seperti Banjarmasin, Marabahan, dan Martapura tetap dilakukan dengan merekrut tenaga pekerja Jawa sebagai pembantu mereka. Akan tetapi, orang-orang Jawa ini tidak merasa tenang dan nyaman tinggal di barak-barak militer Belanda dan mereka sering diam-diam melarikan diri (desersi). Dinas penerangan militer Belanda setempat melaporkan bahwa selama tahun 1900 terjadi 28 desersi kuli kontrak Jawa yang dipekerjakan bagi kepentingan gerakan pasukan Belanda di Marabahan.<sup>22</sup>

Situasi ini diperparah oleh peristiwa tidak terduga yaitu ketika lahan yang disediakan untuk penanaman padi bagi cadangan pangan di *afdeeling* Kudus seluas 120 bahu padi ternyata mengalami kegagalan panen sebagai akibat dari hama tikus yang tiba-tiba

<sup>21</sup> "Emigratie van Javanen" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, edisi 2 Januari 1903, lembar kedua.

<sup>22</sup> "Verspreide Berichten" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, edisi 17 November 1900, lembar kedua.



menyerang.<sup>23</sup> Sebagai akibatnya, jatah makanan berkurang dari apa yang diperhitungkan sebelumnya untuk memasok penduduk setempat dan kaum pendatang.

Pemerintah Belanda sendiri tampaknya memberikan perhatian serius terhadap situasi ini dengan maksud untuk melakukan perbaikan. Beberapa petugas vaksin dikirim dari Banjarmasin ke beberapa tempat di pedalaman yang dianggap rentan masalah kesehatan. Mereka diberi instruksi untuk melakukan vaksinasi terhadap anak-anak penduduk lokal, termasuk juga anak-anak kuli kontrak Jawa, agar mampu menghadapi serangan penyakit dan mencegah penyebaran wabah lebih lanjut. Jumlah petugas vaksin dan pembantunya ditambah untuk disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya, di mana mereka tiba di pedalaman Banjar sekitar bulan Maret 1907.<sup>24</sup>

Selain itu, petugas resmi pemerintah juga berkunjung di kompleks pertambangan dan perkebunan yang menggunakan para kuli kontrak. Mereka datang secara tiba-tiba dan menjumpai asisten perusahaan yang ditempatkan di lokasi eksploitasi. Di sana, mereka melihat kondisi hidup para kuli kontrak Jawa, yang tinggal bersama kuli kontrak Cina dan Keling. Pada umumnya, kuli kontrak Jawa merupakan mayoritas pekerja dan mereka langsung ditanya oleh petugas pemerintah mengenai kepuasan dan kenyamanan mereka bekerja. Hasil wawancara ini kemudian dijadikan sebagai agenda penyelidikan lebih lanjut jika diperlukan oleh aparat hukum pemerintah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> "Muizenplaag in Borneo" dalam *De Sumatra Post*, edisi 6 April 1904, lembar kedua.

<sup>24</sup> "Tegen de Pokken" dalam *Soerabajasch Handelsblad*, edisi 4 April 1907, lembar kedua.

<sup>25</sup> "Borneo" dalam *Het Nieuws van den Dag Voor Nederlandsch Indie*, edisi 15 September 1903, lembar kedua.



Setelah kondisi mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 1906, aktivitas perekrutan tenaga kontrak Jawa yang didatangkan ke Kalimantan Selatan dimulai kembali. Hal ini berjalan seiring dengan membaiknya prospek bagi eksploitasi tambang emas dan intan di Kalimantan Selatan serta industri pengasahannya di sana. Perusahaan baru yang mendapatkan konsesi dari pemerintah kolonial untuk menangani usaha ini adalah N.V. Zuid Borneo Mijn Maatschappij dengan modal dari Jerman yang izin eksploitasinya diberikan pada 10 Mei 1906 oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz. Perusahaan yang berkedudukan di Banjarmasin ini membuka peluang untuk mendatangkan para pekerja kontrak dari Jawa bagi kepentingan usaha pertambangannya.<sup>26</sup>

Begitu juga tiga tahun kemudian, pada 9 November 1909, pemerintah Batavia kembali memberikan izin konsesi kepada perusahaan tambang Zuid Borneo yang berkedudukan di Banjarmasin untuk melakukan eksploitasi atas kandungan batu bara seluas 775 ha dan 799 ha lahan yang terletak di daerah Martapura. Kompleks kedua lahan pertambangan ini dikenal dengan sebutan Dukuh Kupang I dan Dukuh Kupang II. Mereka juga menampung kuli kontrak Jawa, di samping pekerja Cina, untuk kepentingan operasional pertambangannya.<sup>27</sup>

Selain peningkatan investasi modal yang diharapkan bisa membuka lapangan kerja, kondisi politik dan keamanan di Kalimantan Selatan juga semakin kondusif pada akhir dekade pertama abad XX. Perlawanan rakyat pedalaman semakin terbatas di daerah hulu Barito dan jumlah gangguan serangan di sekitar Kota Banjarmasin semakin berkurang. Hal ini menandai perbaikan dalam situasi

---

<sup>26</sup> "Bewilliging Verleend" dalam *Het Nieuws van den Dag Voor Nederlandsch Indie*, edisi 12 Mei 1906, lembar kedua.

<sup>27</sup> "Mijnbouw" dalam *Het Nieuws van den Dag Voor Nederlandsch Indie*, edisi 11 November 1909, lembar kedua.

perekonomian dan kesempatan bagi bentuk kehidupan yang lebih normal dan tenang, termasuk bagi kaum pendatang Jawa, baik di sektor pertambangan, pertanian, maupun perkebunan di wilayah Kalimantan Selatan.<sup>28</sup>

## 2. Proses Kedatangan Pedagang Jawa di Beberapa Wilayah

### a. Sebelum Agresi

Ketika kelompok etnis lain di Indonesia masih berada dalam tahap konsolidasi eksistensi mereka, khususnya di wilayah luar Jawa minus Sumatra Selatan, Jawa telah menjadi suatu pusat pergolakan dan penegakan kontrol politik atas bentang lahan yang luas, dan tidak jarang melewati batas-batas pulau itu sendiri. Keunggulan historis yang didukung oleh penyerapan nilai-nilai budaya global dari daratan Asia, bersama Sumatra Selatan, mampu menjadikan Jawa sebagai sentra kekuatan dan keseimbangan sejarah politik di Nusantara pada milenium pertama Masehi.

Ketika kerajaan maritim Sriwijaya mengakhiri hegemoninya pada abad XII, Jawa yang telah dan masih bertahan dengan kekuatan pendukungnya secara ideologis mampu menegakkan hegemoni hingga beberapa abad lamanya. Akhir dominasi Sumatra mengawali dominasi Jawa dan ekspansinya ke luar pulau. Beberapa kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, seperti Singasari dan Majapahit, diketahui telah meluaskan ekspansi kekuatannya ke luar Jawa, termasuk ke Sumatra dan Kalimantan. Terutama Majapahit berhasil membuat kekuasaan dan tuntutan dominasinya

<sup>28</sup> "Zuid Oost Borneo" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, edisi 13 April 1909, lembar kedua.

yang dirasakan oleh hampir seluruh wilayah Indonesia sekarang ini dengan menuntut upeti dan kedatangan utusan dari para penguasa yang ditaklukkannya.

Ketika era Hindu berakhir dan digantikan dengan dominasi kerajaan-kerajaan Islam, ekspansi ke luar Jawa tetap menjadi salah satu alternatif mendukung kebesaran kekuasaannya. Kesultanan Demak yang kemudian diikuti oleh Kerajaan Mataram, keduanya berpusat di Jawa Tengah, mengirimkan pasukan darat dan lautnya untuk menundukkan beberapa tempat di luar Jawa. Meskipun tidak seluas dan seintensif Majapahit, kedua kerajaan Islam ini tetap berperan penting dalam menyebarkan pengaruh agama dan tradisi budaya Jawa ke luar pulau itu.

Dalam sejarahnya, wilayah Kalimantan Selatan diperintah oleh sebuah kerajaan yang disebut Negaradipa, yang terletak di pedalaman Banjarmasin. Dalam gelombang ekspansi Majapahit ke pulau ini, kerajaan itu segera ditaklukkan dan kekuasaan Majapahit atas bagian selatan Kalimantan ditegakkan. Pusat kerajaan di Jawa mengirimkan seorang bangsawan untuk menjadi penguasa di sana menggantikan raja Negaradipa, dan sejak itu seorang bangsawan Jawa memerintah atas wilayah Kalimantan bagian Selatan.<sup>29</sup>

Dalam Hikayat Banjar disebutkan bahwa Raden Samudera yang merupakan keturunan dari Kerajaan Daha (Kediri) didudukkan sebagai takhta di sebuah kerajaan yang dibangun di Banjarmasin dan memerintah di sana.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Leonard Y. Andaya, "Applying the Sea Perspective in the Study of Eastern Indonesia in the Early Modern Period" dalam Ooi Keat Gin and Hoang Ahn Tuan, *Early Modern Southeast Asia, 1350-1800* (New York: Routledge, 2016), hlm. 88–89.

<sup>30</sup> Dalam hikayat itu disebutkan bahwa Raden Samudera yang setelah berkuasa disebut sebagai Pangeran Samudera merupakan pelarian dari Daha, jadi bukan sosok utusan. Ia melarikan diri karena intrik politik di Daha dan setibanya di Kalimantan Selatan berhasil menggulingkan kekuasaan raja setempat dan mendudukkan diri sebagai penguasa di sana. Kedudukannya berada di muara Sungai Kwin, yang merupakan Kota Banjarmasin sekarang.

Ada dugaan bahwa dia adalah orang yang diperintahkan oleh Majapahit untuk menjadi wakil raja yang berkuasa di daerah itu, karena menurut kitab *Negarakertagama*, pada tahun 1365 disebutkan bila Banjarmasin telah menjadi taklukan Kerajaan Majapahit. Dalam karya ini disebutkan bahwa ada nama bangsawan lain dari Majapahit yang ditempatkan sebagai penguasa di Banjarmasin yaitu Empu Jatmaka.<sup>31</sup>

Akan tetapi diduga bahwa pemerintahan Pangeran Samudera ini terjadi saat Majapahit sudah mendekati masa akhir kejayaannya. Atau, ada dugaan bahwa nama Pangeran Samudera merupakan suatu dinasti turun-temurun, mengingat jika dihubungkan antara Kerajaan Daha yang berkuasa pada abad XIII di Jawa dan Majapahit yang mengakhiri kekuasaannya pada abad XV, terpaut rentang waktu dua abad yang tidak memungkinkan pemerintahan oleh satu orang tokoh. Ini terutama terjadi ketika ada catatan yang menyebutkan bahwa Pangeran Samudera adalah penguasa Banjarmasin pertama yang masuk Islam pada tahun 1526 dan bergelar Sultan Suryanullah.<sup>32</sup>

Meskipun secara resmi Islam diterima sebagai agama kerajaan dan rajanya bergelar Sultan, pengaruh Jawa tetap belum hilang sama sekali. Nama raja sendiri, Suryanullah,

---

Depdikbud, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Depdikbud, 1985), hlm. 30.

<sup>31</sup> Empu Jatmaka diangkat sebagai penguasa di Banjarmasin pada tahun 1387, jadi dua tahun sebelum Hayam Wuruk wafat tetapi jauh setelah Gajah Mada yang melakukan penaklukan atas Majapahit meninggal. Tidak ada keterangan yang menghubungkan antara Empu Jatmaka dan Pangeran Samudera, tetapi yang pasti adalah keberadaan Empu Jatmaka sebagai penguasa sebelum Pangeran Samudera. Paul Michel Munoz, *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malays Peninsula* (Bentley: Continental Sales Inc., 2006), hlm. 281.

<sup>32</sup> Jelle Miedema, *Pre-capitalism and Cosmology; Description and Analysis of the Meybrat Fishery and Kain Timur Complex* (Leiden: Brill Academy, 1986), hlm. 200. Mengingat berita yang menyampaikan tentang riwayat Pangeran atau Raden Samudera ini adalah Hikayat Banjar, maka perbedaan jarak waktu biasanya tidak terlalu dipertimbangkan.

menyiratkan percampuran unsur Jawa dan Arab, karena “Surya” masih menunjukkan kata Jawa atau pengaruh Hindu. Dengan menggunakan kata itu, Samudera menghendaki dirinya sebagai Raja Matahari, yang sering juga disebut Suryansyah.<sup>33</sup> Ini juga menekankan pengaruh era sebelumnya dari zaman Hindu untuk pemberian gelar atau nama raja-raja yang berkuasa, dengan nama yang mengandung makna filosofis. Sementara itu, kata yang digunakan merujuk pada bahasa Sansekerta atau Jawa lama.

Setelah memegang kekuasaan pada pertengahan abad XVI, era ketika perdagangan Islam mulai mendominasi perairan Nusantara sebagai dampak dari ekspansinya ke timur, Banjarmasin tumbuh menjadi sebuah kota dagang dengan pelabuhannya yang ramai disinggahi oleh kapal-kapal dagang berbagai bangsa. Di samping menampilkan diri sebagai bandar dagang sebuah kerajaan Islam di Kalimantan Selatan, lokasi Banjarmasin sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional di pesisir laut Jawa.<sup>34</sup>

Terutama ada tiga kelompok besar pedagang Nusantara yang paling banyak menyinggahi Banjarmasin, yaitu pedagang Melayu dari Malaka, pedagang Jawa dari kerajaan Islam di pesisir utara, serta pedagang Sulawesi Selatan. Dengan lada sebagai komoditas utama yang menarik perhatian para pedagang era itu, dinamika perdagangan Banjarmasin menjadi hidup dan heterogen. Elite penguasa Banjar yang merupakan kerabat kesultanan

---

<sup>33</sup> Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban; Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia* (Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1993), hlm. 246.

<sup>34</sup> Kenneth B. Hall, *Secondary Cities and Urban Networking in the Indian Ocean Realm, 1400-1800* (Lanham: Rowman and Littlefield Production, 2008), hlm. 194.



lewat perkawinan bangsawan Jawa dan wanita setempat, memiliki kebun-kebun lada dan produksinya mampu memasok komoditas ekspor utama bagi Kesultanan Banjarmasin untuk perdagangan internasional bersama rempah dari Maluku.<sup>35</sup>

Dalam konteks persaingan dagang era itu, perubahan Banjarmasin menjadi suatu bandar dan kekuatan Islam berlangsung pada era pertentangan kekuatan Islam terhadap kehadiran orang Portugis yang telah berhasil menduduki Malaka pada tahun 1511. Dengan semangat menolak kehadiran penguasa kafir yang anti-Islam dan menolak monopoli perdagangan rempah orang Barat, kekuatan politik dan ekonomi Islam masa itu bersatu dan membentuk aliansi. Kekuatan utama mereka diletakkan di Laut Jawa yang digunakan sebagai benteng maritim menghadapi terobosan armada orang Portugis ke Maluku. Oleh karenanya, sepanjang abad XVI, Laut Jawa menjadi arena perdagangan utama kekuatan politik dan ekonomi Islam, sekaligus mengalihkan orientasi kekuatan ekonomi Islam dari Malaka ke Jawa.<sup>36</sup>

Seiring dengan kejadian di atas, penyebaran para saudagar Melayu Islam dari Malaka ke berbagai pelosok perairan Nusantara untuk mencari pangkalan dagang baru, salah satunya mencapai Banjarmasin. Sebagai bentuk kesultanan Islam yang baru, Banjarmasin dengan lada dan ideologinya segera menarik kedatangan kapal-kapal dagang

---

<sup>35</sup> B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, Part Two* ('s Gravenhage: W. Van Hoeve, 1959), hlm. 237–238. Lada merupakan komoditas rempah yang dominan di pasaran Nusantara bagian barat, karena hampir semua pelabuhan yang terkenal pada abad XVI–XVII menawarkan lada sebagai komoditas utama mereka.

<sup>36</sup> J.C. van Leur, *Indonesian Trade and Society; Essays in Asian Society and Economic History* (The Hague: W. Van Hoeve Publisher, 1967), hlm. 174.



Melayu yang juga membawa pengaruh pada tersiarnya Islam secara lebih intensif di kalangan penduduk Banjar.

Selain orang Melayu, orang Jawa memainkan peranan penting bagi pertumbuhan Banjarmasin. Berbeda dengan para pedagang Melayu yang terbatas pada peran mereka di bidang ekonomi dan agama, para pedagang Jawa ikut berperan dalam politik di Banjarmasin. Pangeran Samudera sebagai penguasa Islam pertama bahkan disebutkan memeluk Islam melalui perjanjian dengan Sultan Demak, dengan janji dukungan kekuatan politik dan militernya untuk mengalahkan Kerajaan Negara-Daha di pedalaman Kalimantan yang masih berbasis Hinduisme. Dengan dukungan Sultan Demak Trenggana saat itu, Banjarmasin tidak hanya berhasil meneguhkan eksistensinya sebagai suatu bentuk kesultanan, melainkan juga tampil sebagai bandar dagang terkenal di pulau Jawa dengan banyak dikunjungi oleh para pedagang Jawa dari Demak.<sup>37</sup>

Demak juga tampil dengan memanfaatkan situasi regional usai pendudukan Malaka oleh orang Portugis tahun 1511. Ketika terjadi pergeseran gravitasi ekonomi regional dari bandar Malaka bagi para pedagang Islam, Laut Jawa yang tidak tersentuh oleh armada laut Portugis dijadikan sebagai lokasi konsolidasi kekuatan Islam. Sultan Demak Pati Unus memanfaatkan situasi dengan membentuk persekutuan raja-raja Islam untuk bersama menyerang Malaka pada tahun 1513. Meskipun serangan ini gagal mengusir orang Portugis dari Malaka, status Demak memperoleh prestise yang dihormati oleh para penguasa pesisir sebagai simbol

---

<sup>37</sup> Taufik Abdullah, "Islam and the Formation of Tradition in Indonesia; A Comparative Perspective" dalam J.C. Heesterman and Taufik Abdullah, *India and Indonesia; General Perspective* (Leiden: Brill, 1989), hlm. 22.

kepemimpinan Islam di bidang politik dan ekonomi saat itu.<sup>38</sup>

Kekalahan ini tidak mempengaruhi fungsi Demak sebagai pusat kekuatan Islam dominan di Laut Jawa dan bandarnya di Jepara. Dibandingkan dengan bandar-bandar lain di kawasan Indonesia barat saat itu yang menawarkan lada sebagai komoditas penarik utamanya, Jepara menyediakan beras sebagai posisi tawarnya.<sup>39</sup> Sebagai lumbung padi Nusantara, Jawa menghasilkan produksi beras yang berlimpah dan memasok ke segala penjuru Nusantara sebagai bahan makanan utama penduduk. Dengan beras ini, para pedagang Jawa mampu memiliki daya tawar untuk ditukar dengan lada dan rempah-rempah lain.

Di samping mengandalkan komoditas berasnya, Demak juga terkenal sebagai benteng utama Islam di Nusantara dengan menjadi pusat penyebaran serta penyiaran Islam yang dilakukan oleh Wali Sanga. Bertolak dengan kekuatan ekonomi dan filosofi ini, Demak mampu menerapkan kebijakan ekspansinya selama dua dekade setelah kegagalan serangannya terhadap Malaka. Sampai tahun 1535, dari Cirebon hingga perbatasan Blambangan praktis dikuasai oleh Demak dengan panji-panji Islam, sementara Banten di ujung barat menunjukkan sikap kooperatifnya lewat hubungan keluarga.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> M.A.P. Meilink Roelofs, *Asian Trade and European Influence; In the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1962), hlm. 147.

<sup>39</sup> Team of the History of Sunan Drajad, *The History of Sunan Drajad; Discovering Network of the Coming of Islam to Indonesian Archipelago* (Jakarta: Research Team, 1999), hlm. 16.

<sup>40</sup> Johannes Widodo, "The History of Indonesian Coastal Cities; the Case of Semarang" dalam *Asian Culture*, edisi Juni 1997, hlm. 78. Ekspansi pertama Demak berlangsung pada tahun 1478 dan ditujukan terhadap komunitas Tionghoa yang tinggal di Semarang. Setelah berhasil mengislamkan komunitas ini, Demak mengarahkan serangannya ke timur dengan menaklukkan kota-kota di sepanjang pantai utara Jawa untuk akhirnya menuju pusat kekuasaan Majapahit.

Para pedagang beras Jawa yang merasakan perlindungan oleh Sultan Demak dan para penguasa Islam lainnya memperoleh kebebasan untuk memainkan peran sebagai pedagang perantara di Nusantara setelah tahun 1511. Mereka mengambil inisiatif untuk menjalankan perdagangan barter atau transaksi dengan mengandalkan beras untuk ditukar atau dijual dengan pembelian rempah, lada, bahkan komoditas ekspor seperti kain dari India dan tembikar dari Cina. Mereka berlayar dari Aceh di utara hingga lewat Selat Sunda menyinggahi Banten dan Laut Jawa hingga mencapai Maluku untuk menjual beras dan barang impor yang ditukar dengan rempah. Dalam perjalanan kembali dari Maluku, mereka membawa rempah dan dilepas di Jawa untuk ditukar kembali dengan beras.<sup>41</sup>

Dengan peran dominan pedagang Jawa ini, kota-kota pantai Jawa tumbuh menjadi bandar-bandar transit dan pemasok. Mulai dari Cirebon ke timur hingga Pasuruan, sejumlah kota dagang muncul dan menjadi penampung atau transito perdagangan internasional. Gresik dan Tuban, yang telah tumbuh dan berkembang sejak akhir abad XIII sebagai bandar terkenal Majapahit, memiliki kontak permanen dengan importir dari Kekaisaran Cina.<sup>42</sup> Hingga akhir abad XV, kapal-kapal dagang Cina secara rutin menyinggahi kedua bandar ini untuk memasok produk mereka sehingga keduanya menjadi distributor sampai keputusan kaisar di Peking memutuskan hubungan dengan menutup diri.

---

<sup>41</sup> Arun Das Gupta, "The Maritime Trade of Indonesia, 1500-1800" dalam Paul H. Kratoska, *South East Asia, Colonial History; Imperialism before 1800* (London: Routledge, 2001), hlm. 94.

<sup>42</sup> B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, Part One* (Bandung: Van Hoeve NV, 1960), hlm. 25.

Salah satu lokasi yang mereka jadikan tempat peringgahan permanen adalah Banjarmasin. Dengan komoditas ladanya, Banjarmasin dianggap sebagai pelabuhan penting yang kemudian ditukar dengan beras oleh pedagang Jawa. Para pedagang ini menjadi agen utama yang menghubungkan transaksi dan ikatan perdagangan antara Banjarmasin dan kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa. Fungsi Tanjungpura dan Lawe yang sebelumnya merupakan pelabuhan dagang utama Kalimantan Selatan sebelum kemunculan Banjarmasin, beralih ke Banjarmasin. Komoditas selain lada yang ditawarkan di sini adalah emas dan intan yang dihasilkan di tanah tersebut.<sup>43</sup>

Proses interaksi yang berlangsung antara para pedagang Jawa dan orang-orang Banjar di Banjarmasin ini tidak terbatas pada kepentingan dan kegiatan ekonomi. Secara perlahan, beberapa pedagang Jawa ini kemudian tinggal dan menikah dengan perempuan lokal. Mereka kemudian bermukim di dekat pelabuhan atau ibu kota kerajaan dan meneruskan kehidupannya sebagai pedagang lokal di sana, dengan cara menampung dan mengumpulkan produk lokal. Dari situ, mereka kemudian mulai melakukan pelayaran ke pedalaman dan menjalin kontak dengan penduduk Dayak. Sementara itu, ketika pemukiman mereka semakin berkembang dengan jumlah warganya yang semakin bertambah banyak pada akhir abad XVI, seorang pimpinan diangkat untuk menjadi koordinator dan penghubung komunitas Jawa ini dengan pihak luar. Hubungan dengan pusat kekuasaan di Jawa tidak berhenti, yang terbukti

---

<sup>43</sup> Bambang Budi Utomo, "Sambas in the History of West Borneo" dalam Truman Simanjuntak, *Archaeology; Indonesian Perspective*, R.P. Soejono's *Feestschrift* (LIPI: Jakarta, 2006), hlm. 442.

dengan pengiriman rutin setiap tahun koordinator pemukiman itu ke Pajang lalu Mataram untuk menghadap dan menghormati penguasa Jawa.<sup>44</sup>

Di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram di Jawa, perubahan kebijakan kembali terjadi di pusat pemerintahan Jawa. Berbeda dengan para pendahulunya, Mataram tidak lagi menunjukkan orientasinya sebagai suatu kerajaan maritim melainkan membangun basis kekuatannya di sektor agraris. Ini terjadi karena letak kerajaan ini yang berada di pedalaman dan jauh dari pantai, sehingga penguasa mereka mencurigai kekuatan pesisir yang bisa bangkit melalui kekuatan ekonominya dan melepaskan diri darinya, seperti yang terjadi pada tahun-tahun terakhir Majapahit.<sup>45</sup>

Bertolak dari pandangan di atas, para penguasa Mataram selama abad XVI-XVII kembali menunjukkan politik ekspansinya dengan sasaran kota-kota pantai yang menjadi basis kekuatan ekonomi maritim Jawa sendiri. Selama tiga dekade pertama abad XVI, praktis dari Cirebon hingga Madura, Mataram melakukan penaklukan dan menghancurkan semua pelabuhan itu. Sultan Agung sebagai penguasa Mataram menyatakan adanya larangan bagi perdagangan oleh orang Jawa dan menghentikan pelayaran pantai serta perkapalan perantara Jawa. Sejak itu, Mataram kemudian menganut kebijakan menutup

---

<sup>44</sup> John Crawford, *History of the Indian Archipelago*, Vol. 1 (London: Georg Ramsay, 1820), hlm. 327.

<sup>45</sup> Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge University Press: New York, 2014), hlm. 440. Kekhawatiran Mataram terhadap kekuatan pesisir ini sangat kompleks dan beragam. Di samping kecurigaan pada pemupukan kekuatan ekonomi maritimnya, pertentangan orientasi dan filsafat (antara Islam puritan di pesisir dan Islam abangan di pedalaman) juga memainkan peranan penting. Hal ini diperkuat oleh tindakan sejumlah penguasa pantai yang pada akhir abad XVI melakukan pemberontakan terhadap pusat, seperti yang terjadi di Pati dua kali dan di Wirosobo.



diri dan menjadi sebuah kerajaan atas dasar swasembada pangan.<sup>46</sup>

Pada kenyataannya ekspansi Mataram tidak hanya ditujukan ke Jawa tetapi juga di luar Jawa. Setelah penaklukan bandar terakhir Surabaya pada tahun 1625 dan kegagalannya menduduki Batavia pada tahun 1629, Sultan Agung mengarahkan pandangannya ke seberang dan tertuju pada Banjarmasin. Pada tahun 1631, suatu armada dikirim dengan pasukan kuat untuk menaklukkan Banjarmasin. Meskipun usaha ini gagal, langkah tersebut menimbulkan keresahan di antara elite penguasa di Kesultanan Banjar. Selama beberapa tahun, ancaman ekspansi Jawa terhadap kota pelabuhan ini masih terus terjadi sampai akhirnya dengan menggunakan orang-orang Jawa yang ada di pusat kesultanan, pengaruh Mataram berhasil ditegakkan di Keraton Banjar pada tahun 1637. Empat tahun kemudian, yakni tahun 1641, utusan Sultan Banjar pertama menghadap kepada Sultan Agung di Mataram.<sup>47</sup>

Peristiwa tersebut menandai perubahan hubungan historis antara Banjarmasin dan pusat kekuasaan di Jawa secara politik. Pemaksaan pengakuan hegemoni Mataram menciptakan hubungan subordinasi dengan Banjarmasin, yang sangat berbeda dibandingkan dengan Majapahit dan Demak beberapa abad sebelumnya. Ironisnya, perubahan hubungan ini tidak mengubah status dan hubungan orang-

---

<sup>46</sup> R.A. Brown, *Capital and Entrepreneurship in South East Asia* (Hampshire: MacMillan Press, 1994), hlm. 11. Ada fenomena menarik untuk membandingkan penghancuran kota-kota pantai oleh Mataram dengan pendudukan Malaka oleh Portugis atau penaklukan Makassar oleh VOC tahun 1667. Pada kedua peristiwa perang melawan orang asing ini, penaklukan atau penguasaan pelabuhan diikuti dengan penyebaran kekuatan pedagang dan pelaut, sementara penghancuran oleh Mataram tidak diikuti oleh penyebaran kelompok pedagang Jawa ke segala penjuru.

<sup>47</sup> H.J. de Graaff, *Islamic States in Java 1500-1700* (Leiden: B.V. Springer, 1970), hlm. 50.



orang Jawa yang telah bermukim di Banjarmasin dan sekitarnya. Mereka yang telah menetap sejak zaman Majapahit tetap menyebut dirinya sebagai “wong Majapahit”, sedangkan orang Jawa yang datang di era kekuasaan Kesultanan Demak atau sebelum abad XVII tetap menganggap dirinya sebagai “kawula Banjar” daripada sebagai “kawula Mataram”.<sup>48</sup>

Pengaruh Mataram dalam struktur pemerintahan Banjarmasin juga tampak jelas. Dalam satuan kepegawaian atau prajurit di Kesultanan Banjar, sejumlah istilah yang digunakan jelas merujuk pada satuan-satuan sosial dan keprajuritan yang ada di Keraton Mataram, di antaranya adalah:

- *Sarawisa*, yaitu satuan sebanyak lima puluh orang yang berada di bawah pimpinan seorang pejabat bernama *Sarabajra*. Menurut informasi, satuan ini dibentuk pada zaman pemerintahan Empu Jatmaka sebagai wakil Majapahit dan bertugas menjaga keraton.
- *Mandung*, yaitu satuan sebanyak lima puluh orang di bawah Reksayuda yang bertugas menjaga bangsal keraton.
- *Mamagarsari*, yaitu satuan sebanyak lima puluh orang di bawah Sarayuda yang bertugas menjaga *sitiluhur* atau tempat raja bersabda.
- *Pariwala* atau *singabana*, yaitu satuan sebanyak empat puluh orang di bawah Singantaka dan Singapati, yang bertugas menjaga pasar.

---

<sup>48</sup> Patricia Matusky, “Borneo; Sabah, Serawak, Brunei, and Kalimantan” dalam Terry E. Miller and Sean Williams, *The Garland Handbook of Southeast Asian Music* (New York: Routedge, 2008), hlm. 407.

- *Sarageni*, yaitu satuan sebanyak empat puluh orang di bawah Saradipa yang bertugas menjaga persenjataan.
- *Tuha buru*, yaitu satuan sebanyak empat puluh orang di bawah Puspawana yang bertugas mengiringi raja saat berburu.
- *Pangadapan* atau *Pamarakan*, yaitu satuan sebanyak lima puluh orang, semuanya putra mantri di bawah Rasajiwa.
- *Pamayungan* (*orang melalangkah*), yaitu satuan sebanyak dua puluh orang, semuanya adalah kerabat raja dan selain itu juga disebut *kadang aji*.<sup>49</sup>

Struktur di atas, meskipun tidak semuanya, membuktikan bahwa dalam birokrasi Kesultanan Banjar, model dan nama aparaturnya masih menunjukkan identifikasi dengan struktur di kerajaan-kerajaan Jawa. Dalam struktur birokrasi di keraton-keraton Yogyakarta dan Surakarta, nama beberapa satuan seperti *sarageni*, *sarayuda*, dan *sarawisa* masih digunakan untuk menunjuk jenis pasukan.

Sehubungan dengan tata ruang di dalam Keraton Banjar, beberapa istilah menunjukkan kesamaan nama dan fungsi dengan keraton Jawa. *Siti luhur*, *paseban*, *panggung*, dan *lawang agung* (pintu gerbang) merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jawa dan merujuk pada nama-nama pada bangunan atau ruangan di dalam Keraton Demak dan Mataram. Yang lebih jelas lagi dalam kaitannya dengan tata ruang dan simbolisme dalam keraton adalah adanya seperangkat gamelan Jawa bernama Kyai Mangasekar yang

<sup>49</sup> Anton Abraham Cense, *De Kroniek van Bandjarmasin* (C.A. Mees: Santpoort, 1928), hlm. 143. Menurut informasi, satuan-satuan ini dibentuk oleh Pangeran Samudera, dengan demikian dapat diduga bahwa pada saat itu, Pangeran Samudera mengadopsi sistem satuan prajurit yang berlaku di Kesultanan Demak.

ditempatkan di *sitiluhur* Keraton Banjarmasin. Keberadaan gamelan sebagai perangkat budaya Jawa memberikan simbol bukan terbatas pada kesenian, tetapi juga kesakralan dan berkaitan dengan kewibawaan penguasa ketika ditempatkan pada posisi tertentu di dalam keraton.<sup>50</sup>

Begitu juga dengan kebiasaan para sultan Banjar yang mengadopsi tradisi dan kebiasaan raja-raja di Jawa dalam hal tata upacara rutin untuk memamerkan kewibawaannya. Setiap hari Sabtu, raja mengadakan acara adu manusia dengan hewan atau hewan dengan hewan, yang disebut dengan acara *seton* (dari kata *Setu* atau Sabtu). Begitu juga pada hari Senin, sultan memanggil beberapa orang prajuritnya untuk memperagakan kepandaianya memainkan atau menggunakan tombak di antara para penguasa daerah atau bupati yang dikumpulkannya. Acara ini diadakan di pelataran Istana Banjar, dan disebut *Senenan* (dari kata *Senen* atau Senin).<sup>51</sup>

## b. Setelah Agresi

Pada Desember 1859, pemerintah Belanda di Batavia mengeluarkan keputusan untuk melakukan intervensi dalam pergantian takhta di Kesultanan Banjarmasin dengan cara mengirimkan ekspedisi militer ke sana. Keputusan ini diambil berdasarkan kondisi di Banjarmasin yang dianggap semakin membahayakan karena adanya perlawanan dari kelompok Pangeran Antasari terhadap Pangeran Tamjidillah yang didukung oleh Batavia untuk

---

<sup>50</sup> Bukan hanya di Jawa, namun di Kalimantan sendiri, kepercayaan pada nilai sakral gamelan juga ada. Di Kalimantan Utara, suara gong dan fisik gong dianggap mengandung nilai sakral dan menempati ruang khusus dalam proses ritual adat. Henry Spiller, *The Traditional Sounds of Indonesia, Vol. 1* (ABC CLIO: Santa Barbara, 2004), hlm. 35.

<sup>51</sup> Matheew Isaac Cohen, "Multiculturalism and Performance in Colonial Cheribon" dalam P.J.M. Nas, *The Indonesian Town Revisited* (Lit Verlag: Munster, 2002), hlm. 354.

menjadi sultan, yang dianggap sebagai puncak reaksi lokal terhadap intervensi kolonial selama ini dalam pemerintahan Kesultanan Banjarmasin melalui kontrak-kontrak politik.<sup>52</sup>

Dalam waktu setengah tahun pertempuran, tentara Belanda berhasil menguasai seluruh pusat kekuasaan Kesultanan Banjarmasin dan pada bulan Juni 1860, pemerintah Batavia menyatakan penghapusan kesultanan ini dan integrasi wilayah bekas Kesultanan Banjarmasin ke dalam wilayah administrasi Hindia Belanda. Meskipun sejumlah kekuatan Kesultanan Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan Demang Lehman berhasil lolos dan bergerak ke utara untuk meneruskan perlawanannya, kenyataan di atas menunjukkan bahwa terhitung sejak pertengahan 1860, pemerintah Belanda memerintah wilayah ini dan menerapkan semua kebijakannya yang telah disiapkan untuk wilayah Kalimantan Selatan.<sup>53</sup>

Dengan tujuan mengejar sisa-sisa perlawanan rakyat ke pedalaman, tentara Belanda juga ditugasi untuk menduduki pos-pos di pedalaman bagi persiapan perluasan pemerintahan sipil di sana usai pasifikasi. Melalui langkah ini, pemerintah Belanda memperluas wilayah kekuasaannya di sekitar Banjarmasin kemudian di sepanjang aliran Sungai Barito ke utara hingga mencapai batas Amuntai. Hingga bulan Mei 1863, operasi militer ini berlangsung dan daerah yang telah benar-benar ditaklukkan kemudian diintegrasikan dalam struktur pemerintahan kolonial yang

<sup>52</sup> *Koloniaal Verslag over Het Jaar*, thn. 1859, hlm. 13. Ini terjadi dengan pengumuman Komisaris Khusus F.N. Nieuwenhuijzen tanggal 11 Juni 1860 nomor 16 yang menyatakan penghapusan Kesultanan Banjar sebagai institusi politik dan penegakan pemerintahan langsung Belanda di Kalimantan Selatan.

<sup>53</sup> *Koloniaal Verslag over Het Jaar*, thn. 1862, hlm. 15.

secara administratif dilakukan pembagian pada bulan itu dalam *afdeeling*.<sup>54</sup>

Setelah menegakkan kekuasaannya dan membentuk administrasi pemerintahan, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan kolonialnya. Sesuai dengan kepentingannya pada masa itu, dengan didorong oleh keberhasilannya di Jawa dalam hal aplikasi penanaman produk tropis, rezim kolonial memperkenalkan sistem pertanian perkebunan di Kalimantan Selatan. Menurut nasihat dari penasihat khusus Nieuwenhuijzen, produktivitas lahan di Kalimantan Selatan, khususnya di sepanjang aliran Sungai Barito, cukup tinggi dan tanahnya subur sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan.

Bertolak dari situ, pemerintah kemudian menerapkan sistem tanam wajib produk niaga yaitu kopi, seperti yang saat itu diterapkan di Jawa dengan *kultuurstelsel*. Tanah-tanah yang dianggap tidak bertuan dan tanah-tanah eks-Kesultanan Banjar dibuka dan ditanami dengan benih kopi.<sup>55</sup> Aturan-aturan yang diterapkan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam *kultuurstelsel*, dengan harapan agar produktivitasnya meningkat pesat. Beberapa orang petugas ditempatkan di lokasi sebagai pengawas pelaksanaan kerja ini dan mereka wajib melaporkannya kepada residen Belanda di Banjarmasin.

<sup>54</sup> *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1863 nomor 59.

<sup>55</sup> Setelah penaklukan kesultanan, banyak orang yang menjadi pengikut bekas sultan dan pendukung Antasari yang meninggalkan kampung dan tanahnya, baik untuk meneruskan perjuangan ataupun karena takut dijatuhi hukuman oleh Belanda. Lahan yang sebelumnya mereka huni dan tanami menjadi kosong, kemudian diambil alih oleh pemerintah kolonial dan dijadikan kebun-kebun kopi. Anon, "Itreksel Uit in Rapport van den Kolonel, Resident der Zuiden en Ooster Afdeeling van Borneo, van 30 September 1863" dalam *Tijdschrift voor Binnenlandsch Bestuur*, tahun 1867, jilid XVI, hlm. 80-83.



Akan tetapi, meskipun tersedia lahan yang memadai dan kesuburan tanahnya telah dijamin, kesulitan lain muncul. Penduduk setempat, Banjar dan Dayak, yang direncanakan akan menjadi pelaku penanaman, walaupun bisa direkrut namun ternyata tidak memahami bagaimana cara menanam dan memberdayakan kopi. Benih yang disediakan oleh pemerintah tidak ditanam dengan baik sehingga pertumbuhannya tidak bisa diharapkan sesuai rencana. Banyak tanaman kopi yang akhirnya mati saat pertumbuhan atau benihnya hilang dan tidak tumbuh.

Melihat hal ini, Residen Tromp di Banjarmasin melaporkan ke Batavia tentang kesulitan dan kegagalan program perkebunan kopi. Setelah membaca laporan Tromp, pemerintah pusat mempertimbangkan solusi lain dan akhirnya mengambil keputusan dengan merekrut petani Jawa untuk dikirim ke Banjar. Mereka akan dijadikan sebagai tenaga kontrak untuk melakukan penanaman kopi. Diharapkan agar petani Jawa yang telah terbiasa dan memahami cara menanam serta merawat pohon kopi akan lebih berhasil mengembangkan perkebunan kopi di sana daripada penduduk Kalimantan Selatan sendiri.

Di bawah aparat pemerintah kolonial, orang-orang Jawa yang tiba di pelabuhan Banjarmasin ini kemudian disebarkan ke daerah pinggiran kota dan pedalaman yang ditinggalkan oleh mereka yang meneruskan perlawanan. Tanah-tanah kosong ini selanjutnya diubah menjadi kebun-kebun kopi yang digarap dan ditanami dengan benih kopi oleh petani Jawa. Hal ini terutama terjadi di daerah Tanah Laut sebagai lokasi percobaan pertama pada tahun 1862, dengan penanaman 150 ribu biji kopi dari Jawa. Dalam waktu tiga tahun, dari jumlah ini hanya dua pertiga atau



100 ribu pohon yang tumbuh, dan dari jumlah terakhir ini, separuh telah mulai siap berbuah.<sup>56</sup>

Keberhasilan penanaman kopi di daerah Tanah Laut mendorong Residen Banjarmasin Tromp untuk memberitahu pemerintah di Batavia tentang prospek tanaman ini di pedalaman Kalimantan. Pemerintah Batavia menyetujui untuk perluasan tanaman ini ke sejumlah lahan lain yang terletak di Amuntai dan Martapura. Sementara itu, pada tahun 1865, sebanyak 20 ribu benih kopi dibagikan di Alai dan Amandit. Di Martapura, penduduk Banjar mulai belajar menanam kopi lewat para petani Jawa yang ditempatkan di sana. Dari situ, muncul kebiasaan tanaman kopi pagar sebagai tanaman di pekarangan rumah mereka.<sup>57</sup>

Keberhasilan tanaman pertama di Tanah Laut yang membawa keuntungan, merangsang penduduk sendiri untuk melakukan penanaman kopi di kebun-kebun yang kemudian mereka buka. Di Balangan, Batang Alai, Labuan Amas, Amandit, dan Benua Ampat, pembukaan kebun-kebun kopi sebagai perluasan lahan berlangsung teratur. Di Riam Kanan, penduduk setempat mulai belajar menanam kopi dari para pendatang Jawa dan selanjutnya membuka lahan mereka untuk dijadikan kebun teratur. Di Amuntai, penduduk melihat keberhasilan tanaman kopi pekarangan di Martapura, sehingga mereka kemudian mengikuti langkah ini. Panen pertama dari kopi yang ditanam tahun 1862 oleh petani Jawa kemudian diangkut ke Banjarmasin dan dijual di sana. Dari penilaian terhadap penyeteroran hasil dan harganya di pasaran ekspor, ada optimisme bahwa kopi

---

<sup>56</sup> *Koloniaal Verslag over Het Jaar*, 1865, hlm. 204.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 1866, hlm. 217.

Banjar memiliki prospek yang baik dan Amuntai dijadikan sebagai lumbung kopi Kalimantan Selatan.<sup>58</sup>

Persoalan muncul menjelang akhir tahun 1860-an ketika di Jawa sendiri, *kultuurstelsel* sudah berakhir. Meskipun di luar Jawa, *kultuurstelsel* kopi masih dipertahankan di beberapa tempat, pemerintah Batavia sendiri sudah mendapatkan tekanan dari kelompok ekonom kuat di negara induk untuk segera mengakhiri dominasi negara atas produksi tanaman tropis ini. Hal ini semakin terasa di Kalimantan dalam bidang tanaman kopi, terutama di antara orang-orang yang didatangkan dari Jawa. Ketika kontrol pemerintah tidak ketat lagi dan mereka tidak mendapatkan keuntungan yang berarti dari kopi karena hanya bergantung pada upah, tanaman kopi di pedalaman tidak lagi mereka rawat bahkan ditinggalkan. Pada tahun 1869, banyak petani Jawa yang selanjutnya meninggalkan kebun-kebun kopi mereka dan pindah ke pusat-pusat kota atau bahkan ke pesisir untuk mencari pekerjaan lain. Akibatnya, pada tahun 1870 dan 1871, pemerintah Karesidenan Banjarmasin melaporkan kemerosotan produksi panen kopi.<sup>59</sup>

Sejak itu tidak ada lagi laporan tentang produktivitas kopi yang disampaikan oleh aparat pemerintah, karena menurut mereka setelah orang Jawa meninggalkan tanaman itu, penduduk pribumi juga tidak ada yang meneruskan usaha perkebunannya. Di samping mereka juga tidak berminat terhadap lamanya produksi, nilai keuntungan yang dihasilkan juga tidak tinggi. Sebaliknya, tembakau menjadi

<sup>58</sup> *Ibid.*, 1866, hlm. 152.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 1870, hlm. 198.

pengganti bagi para petani Jawa untuk meneruskan usaha kebun mereka.

Pada tahun 1865, upaya penanaman tembakau di antara petani yang datang dari Jawa mulai tampak. Terutama usaha pertama bagi penanaman benih tembakau dilakukan di daerah Amuntai, yang tanahnya dianggap cocok bagi pertumbuhan tembakau. Dari hasil pengamatan, tembakau yang cocok untuk lahan di Amuntai didatangkan dari Rembang. Alasannya adalah jenis tanah dan iklim di Amuntai paling mirip dengan Rembang sehingga berpeluang untuk meraih produktivitas yang tinggi.<sup>60</sup>

Petani Jawa yang telah menguasai dan memahami prospek tanaman tembakau ini dengan bersemangat melakukan penanaman. Bahkan, setelah sawah mereka menghasilkan panen padi, mereka tidak lagi menyanginya dan memasukkan benih padi pada sawah itu. Sebaliknya, mereka beralih melakukan penanaman tembakau. Di tanah Dusun, tanaman tembakau juga mendapatkan perhatian dari orang-orang Dayak yang telah belajar melakukan penanaman dari orang Jawa pada tahun 1866. Namun, karena benih tembakau yang ditanam lebih merupakan jenis tembakau hutan daripada tembakau yang didatangkan dari Jawa, sejak awal sudah bisa diperkirakan bahwa hasilnya, baik kualitas maupun kuantitas, tidak akan bagus.<sup>61</sup>

Tampaknya pemerintah Belanda menyadari hal ini sehingga pada akhir tahun 1866 sejumlah besar benih tembakau didatangkan dari Rembang. Benih ini kemudian diserahkan kepada para petani Jawa yang didatangkan untuk ditanam di daerah Alai, sebagai bentuk perluasan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, 1865, hlm. 204.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 1866, hlm. 217.

perkebunan tembakau dengan menggunakan sawah-sawah padi. Juga lahan bekas perladangan penduduk kemudian digunakan untuk menanam tembakau dengan harapan hasilnya segera bisa diperoleh. Di Batang Alai dan Labuan Anas perubahan lahan dari sawah menjadi kebun tembakau ini berlangsung sangat intensif, bahkan pada tahun 1868 pendatang Jawa mulai mengembangkan pembibitan sendiri untuk mengisi kekosongan bibit dari Jawa yang sering terlambat datang.<sup>62</sup>

Akan tetapi, tampaknya seperti halnya kopi, memasuki awal 1870-an, prospek tembakau ini kembali meredup. Kegagalan panen di Batang Alai dan Labuan Anas karena kondisi cuaca yang tidak mendukung serta panen di Amuntai yang berkualitas buruk karena kondisi benih lokal yang tidak sebaik benih tembakau Rembang, mengakibatkan penduduk tidak lagi bersemangat untuk meneruskannya. Mereka cenderung memanfaatkan tembakau untuk dikonsumsi yang diimpor dari Jawa.<sup>63</sup> Penduduk tidak lagi berminat menanamnya, meskipun pada tahun 1871 pemerintah kolonial menyediakan kembali benih tembakau dari Jawa. Baru lima belas tahun kemudian, ketika terjadi keberhasilan dalam pemasaran tembakau Deli dan Kedu, dorongan untuk kembali menanam tembakau di Kalimantan Selatan muncul.<sup>64</sup>

Di Amuntai, prospek penanaman tembakau dengan menggunakan tenaga kuli petani Jawa mulai tumbuh pada tahun 1887, ketika ada dorongan investasi modal Barat ke perkebunan di sini seperti halnya di Deli. Mereka telah

<sup>62</sup> *Ibid.*, 1868, hlm. 152.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 1870, hlm. 198.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 1888, hlm. 232.

melakukan pengukuran dan pemantauan lahan selama tahun itu dan meminta pemerintah agar menyediakan tanah-tanah liar bagi usaha perkebunan tembakau. Pemerintah sendiri menganggap usaha itu akan membawa keuntungan besar termasuk untuk daerah Kalimantan Selatan, sehingga pada 21 Maret 1888, pemerintah menerbitkan peraturan yang mengatur persewaan tanah-tanah liar bagi penanaman tembakau.<sup>65</sup>

Tanaman berikutnya yang berkaitan dengan penggunaan orang Jawa sebagai tenaganya adalah nila. Produk ini awalnya juga dikembangkan di Jawa oleh Belanda sejak akhir era VOC dan mulai berangsur berkurang seiring dengan meredupnya “tanam paksa” pada akhir tahun 1840-an.<sup>66</sup> Sebaliknya, di Kalimantan Selatan, tanaman ini justru mulai dibudidayakan setelah Perang Banjar dan beberapa daerah di pedalaman Banjarmasin berubah menjadi perkebunan nila. Produk ini diusahakan diberdayakan dan diproduksi dengan tujuan agar hasilnya bisa dijadikan sebagai komoditas ekspor atau setidaknya sebagai produk perdagangan domestik untuk menggantikan produk yang hilang dari Jawa. Terutama produk nila dikaitkan dengan produksi kain, karena manfaat yang dihasilkan dari tanaman ini adalah zat pewarna biru yang disukai oleh banyak konsumen kain tenun.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, thn. 1888, no. 58.

<sup>66</sup> P.Creutzberg, *Indonesia's Export Crops 1816-1940* (Martinus Nijhoff: 's Gravenhage, 1975), hlm. 20.

<sup>67</sup> Terutama yang berkaitan erat dengan tanaman nila dan kemudian tenun adalah tanaman serat penghasil katun. Tanaman ini menghasilkan kapas yang menjadi bahan dasar bagi pembuatan benang dan akhirnya kain katun. Setelah dibuat menjadi katun dengan cara dipintal dan ditenun, kain ini dicelupkan ke dalam air rendaman buah nila untuk bisa memperoleh latar warna. Anon, “Overzicht van den Landbouw en de Nijverheid in Nederlandsch Oost Indie over de Jaren 1872, 1873, en 1874” dalam *Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid*, thn. 1876, hlm. 162.



Di wilayah ini, sejumlah lokasi yang dianggap cocok bagi penanaman nila mulai dicari, terutama oleh beberapa pengusaha swasta Belanda yang telah berpengalaman menanam nila di Jawa. Setelah melalui penelitian cermat, pada tahun 1864, nila mulai ditanam di beberapa petak tanah yang dibuka dari hutan terutama di daerah Amuntai. Benih pertama nila ditanam bersama dengan penanaman benih tembakau di wilayah ini, serta diproyeksikan akan tumbuh dan berkembang menjadi suatu objek perkebunan besar.<sup>68</sup>

Untuk mengerjakan tanaman ini, tenaga yang pada awalnya dipakai adalah pekerja paksa Jawa yang merupakan para tahanan dan orang-orang buangan, karena petani Jawa yang didatangkan lebih banyak digunakan untuk menanam tembakau dan kopi yang dianggap lebih produktif. Mereka melakukan penanaman nila dari benih yang dibawa dari Jawa serta dibagikan kepada mereka untuk disiangi dan ditanam sesuai metode yang diterapkan di Jawa. Dalam pekerjaannya, mereka diawasi selain oleh pengusaha investor perkebunan nila, juga oleh aparat kepolisian.

Akan tetapi, hasil dari tanaman ini tidak memuaskan karena pengerjaan tidak dilakukan secara profesional oleh tenaga yang bukan petani. Akibatnya, tanaman ini tidak membawa hasil yang memadai dan produktivitasnya juga rendah. Di samping itu, prospek pemasarannya untuk dijual sebagai komoditas di Banjarmasin rendah, seiring dengan tidak adanya tanaman katun atau kapas yang produktif di wilayah Kalimantan Selatan sebagai pasangan tanaman nila. Akibatnya, hanya tiga tahun kemudian sejak pertama

---

<sup>68</sup> *Koloniaal Verslag over Het Jaar*, thn. 1864, hlm. 186.

ditanam pada tahun 1863, tanaman ini dihentikan. Baik lahan maupun tenaga kerjanya kemudian dialihkan bagi pengembangan tanaman lain yang lebih produktif seperti kopi. Sementara itu, beberapa pekerjanya yang kemudian dibebaskan dari hukuman dan bermukim di Kalimantan Selatan sebagai petani atau hidup dari hasil alam, lebih banyak menekuni pertanian padi dan tanaman lain seperti tebu dan kelapa.<sup>69</sup>

Namun demikian, bukan berarti tanaman nila lenyap sama sekali di wilayah ini setelah para pengusaha menarik investasi mereka. Sejumlah orang Jawa yang masih tinggal di sana meneruskan penanaman ini dan mengajari penduduk setempat untuk mengikutinya. Beberapa orang mulai memperoleh pengalaman menggunakan produk tanaman nila bukan hanya sebagai pewarna, melainkan juga sebagai unsur dalam ramuan obat. Pembasuhan luka bakar dan luka baru dengan larutan yang mengandung unsur nila diketahui menjadi proses sterilisasi pada penduduk yang tinggal di dalam hutan.<sup>70</sup>

Beberapa orang bahkan kemudian berhasil menjadikan produk nila ini sebagai komoditas dalam perdagangan domestik selama dekade 1870-an, dan menjadi salah satu sumber peredaran uang tunai di wilayah pedalaman Kalimantan Selatan. Mereka mampu menjualnya kepada para pedagang Cina yang sekaligus menjadi pemasok kain bagi daerah pedalaman hingga hulu sungai. Meskipun Perang Banjar telah menghancurkan semua tanaman kapas di pedalaman, kebutuhan kain mereka segera dipasok

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, 1868, hlm. 97.

<sup>70</sup> Michael Th. Hurbert Perelaer, *Borneo van Zuid naar Noord, Tweede Deel* (Amsterdam: Elsevier, 1883), hlm. 239.

oleh orang-orang Cina ini bahkan kerabat kesultanan ikut terlibat dalam perdagangan kain yang kemudian diberi warna dengan produk nila lokal.<sup>71</sup>

Produktivitas ini telah mulai tampak pada akhir tahun 1860-an ketika permintaan nila olahan dari sejumlah pedagang meningkat dari pedalaman Amuntai. Mereka yang telah belajar menanam dan mengolah nila dari orang Jawa, menjadi pelaku utama bisnis nila. Sampai tahun 1869, setidaknya diketahui ada lima sentra produksi nila rutin yang menjadi pemasok perdagangan lokal. Komoditasnya disukai oleh para pengusaha kerajinan kain karena berkualitas baik dan prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut. Umumnya lahan yang digunakan adalah tanah yang tidak dipakai untuk menanam tanaman lain termasuk tanaman pangan.<sup>72</sup>

Kebijakan etis dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal tahun 1900 bertolak dari prinsip utang budi (*een eereschuld*) yang dilontarkan oleh Conraad Th. Van Deventer pada tahun 1898.<sup>73</sup> Sebagai bagian dari komoditas pertarungan elite politik kolonial di Den Haag, kebijakan terhadap tanah koloni yang selama abad XIX didasarkan pada eksploitasi ekonomi baik oleh negara maupun swasta, menjadi sasaran penyerangan dan akhirnya menjadi langkah dan kebijakan pemerintah untuk mengubahnya menjadi lebih populis.

<sup>71</sup> Han Knapen, *Forest of Fortune? The Environmental History of Southeast Borneo; 1600-1880* (KITLV Press: Leiden, 2001), hlm. 272.

<sup>72</sup> "Uit Javasche Courant van 15 Julij 1870" dalam *Java Bode*, edisi 16 Juli 1870, lembar kedua.

<sup>73</sup> Conrad Theodore van Deventer, "Een Eereschuld" dalam *De Gids*, tahun 1899, vol. 17, hlm. 250.

Dengan dipengaruhi oleh ide-ide humanis Kristen yang dominan dalam politik negara-negara kolonial Eropa pada awal abad XX, Ratu Wilhelmina dalam pidatonya awal abad menyampaikan niatnya untuk melakukan perubahan besar dalam kebijakan kolonial demi kemajuan tanah koloni Hindia Belanda dan rakyatnya.<sup>74</sup> Pemerintah Belanda memiliki kewajiban untuk mengangkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di tanah koloni yang selama ini telah memberikan banyak kontribusi bagi negara induk.

Sebagai realisasi dari kebijakan ekonomi-humanis ini, tiga program utama menjadi pilar politik etis, yaitu transmigrasi, edukasi, dan irigasi. Dari tiga program ini, pemerintah kolonial Belanda bermaksud mengentaskan lahir dan batin kemakmuran penduduk tanah koloni sekaligus pemeratakan kesejahteraan mereka lewat program perpindahan penduduk yang dikenal sebagai kolonisasi.<sup>75</sup> Dalam program ini, pemerintah tidak hanya menyebarkan penduduk untuk bisa mendapatkan lahan sekaligus membuat produktif lahan-lahan kosong yang belum digarap, melainkan juga menjadi pelindung dan koordinator dari program pengembangan wilayah luar yang rentan terhadap ancaman penetrasi pengaruh asing.

---

<sup>74</sup> Jennifer L. Foray, *Visions of Empire in the Nazi-occupied Netherlands* (Cambridge University Press: Cambridge, 2012), hlm. 37. Dengan pidato ratu ini, ada dugaan bahwa sejak itu, Belanda berniat melakukan pembaharuan sistem pemerintahan menuju pemerintahan sendiri untuk koloni dan terlepas dari ketergantungan pada negara induk di Eropa.

<sup>75</sup> Petra Boudewijn, *Warm Bloed; De Representatie van Indo-Europeanen in de Indische Nederlandse Letterkunde (1860-heden)* (Uitgeverij Verloren: Hilversum, 2016), hlm. 262.

## B. Pasca Kolonial Belanda

Pelaksanaan transmigrasi pada awalnya merupakan salah satu program pemerintah kolonial Belanda yang bernama kolonialisasi. Cara ini sangat mendukung dalam upaya pertanian di daerah yang masih sedikit atau jarang penduduk dan luas arealnya, seperti yang dilakukan di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Sementara, pada masa pemerintahan Jepang, pemindahan penduduk dilakukan secara paksa guna memenuhi tenaga kerja yang dikenal dengan romusha. Setelah Indonesia merdeka, kegiatan transmigrasi menjadi salah satu program yang digiatkan kembali sejak tahun 1950.

Dalam program transmigrasi, penyebaran penduduk yang merata dan penyerapan tenaga kerja menjadi faktor utama dan semua ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat baik pendatang ataupun penduduk lokal. Menurut Undang-Undang No. 3/1972 disebutkan bahwa transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang masih dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, dan tujuan transmigrasi ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Memasuki rencana program Pembangunan Lima tahun (Pelita) yang dimulai pada tahap Pelita I sampai Pelita III, pemerintah mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan nasional dengan sasaran dalam bidang pangan, sandang, perbaikan sarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada Pelita III (1979-1984), pemerintah lebih menekankan



pada program Trilogi Pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang arah dan kebijakan pembangunannya pada segala bidang.

Pada Pelita II, program transmigrasi semakin ditingkatkan dan dianggap sebagai masalah nasional yang harus segera dicari pemecahannya. Dalam Kepres No. 42 ditetapkan ada sepuluh provinsi sebagai daerah prioritas transmigrasi, yaitu Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian jaya, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Dalam penyelenggaraan transmigrasi di semua wilayah, pemerintah menyampaikan bahwa dalam kegiatan transmigrasi perlu diterapkan suatu sistem yang sinergi antardaerah pengirim dengan daerah penerima penempatan para transmigran. Mulai dari awal perlu dilakukan hal ini, karena yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah agar para peserta trans dapat mewujudkan tiga hal yang diinginkan, yaitu kesejahteraan, pembangunan masyarakat, dan integrasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan transmigran yang ulet dan berkualitas dalam mewujudkan keinginan tersebut. Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh transmigran adalah sebagai berikut:

1. Transmigran adalah orang yang gigih, ulet, berinovasi, dan berkreasi.
2. Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Sudah berkeluarga.
4. Usia 20-45 tahun.
5. Pendidikan minimal SMA.
6. Memiliki kompetensi sesuai kebutuhan daerah tujuan.

7. Berbadan sehat.
8. Belum pernah ikut transmigrasi.

Dalam perkembangannya, untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), kebijakan transmigrasi lebih ditujukan pada pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang banyak dan bisa digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang ditulis dalam Undang-Undang No. 15/1997 tentang tujuan transmigrasi. Sejalan dengan program ini, maka ada keterkaitan erat dengan pentingnya sumber daya manusia. Terbukanya areal pemukiman baru tentu membutuhkan tenaga yang dapat dipekerjakan di berbagai sektor sesuai dengan keahlian yang diperlukan. Ketersediaan tenaga memberi peluang kepada para investor atau pengembang untuk membuka usaha serta peluang kesempatan bekerja, dan ini merupakan peluang dalam memajukan sektor ekonomi. Jika dilihat dari jumlahnya, penempatan transmigrasi di Indonesia, seperti pada tahun 1951-1968 di Kalimantan Selatan sebanyak 2.838 KK, 1969-1974 sebanyak 2.275 KK, dan tahun 1974-1979 sebanyak 15.100 KK (TAD Report No. 1, 30).

Dalam tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, penyelenggaraan program transmigrasi ini dilakukan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberikan kesempatan untuk bekerja.
2. Membantu mempertahankan keamanan nasional, termasuk dalam bidang pangan.
3. Meratakan penyebaran penduduk di seluruh Indonesia (serta untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk dan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya Pulau Jawa yang

merupakan pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia, yang merupakan tujuan resmi dari program transmigrasi).

4. Mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.

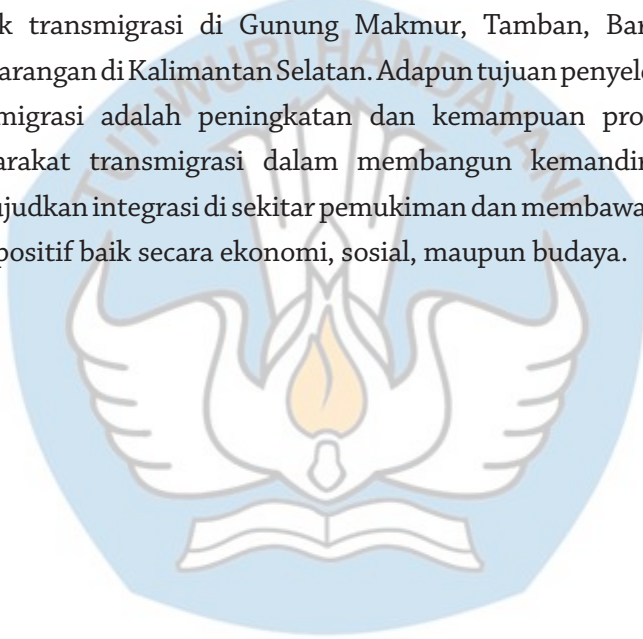
Dalam pelaksanaannya, dikenal beberapa jenis transmigrasi, antara lain:

1. *Transmigrasi umum*, yakni jenis transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah.
2. *Transmigrasi khusus*, yakni jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat khusus dengan tujuan tertentu. Contohnya, transmigrasi yang dilakukan oleh penduduk yang terkena bencana alam.
3. *Transmigrasi spontan (swakarya)*, yakni jenis transmigrasi yang dilakukan oleh penduduk atas kemauan dan biaya sendiri dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang berupa lahan garapan seluas dua hektar dan lain-lain.
4. *Transmigrasi swakarya*, yakni jenis transmigrasi yang sebagian biayanya ditanggung oleh pemerintah, sedangkan untuk pembukaan lahan ditanggung oleh transmigran.
5. *Transmigrasi lokal*, yakni jenis transmigrasi yang terjadi dari satu daerah ke daerah lainnya dalam satu provinsi.
6. *Transmigrasi bedol desa*, yakni jenis transmigrasi perpindahan penduduk yang meliputi seluruh penduduk desa beserta kepala desa dan perangkat-perangkatnya ke daerah lain.
7. *Transmigrasi sektoral*, yakni jenis transmigrasi perpindahan penduduk yang biayanya ditanggung bersama oleh pemerintah daerah tujuan transmigrasi.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/transmigrasi-pengertian-tujuan-dan-macam-macam-beserta-contohnya-secara-lengkap/>

Jika dilihat dari perkembangannya, pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah sudah cukup memadai dan berbagai fasilitas sudah disiapkan, seperti lahan, bantuan dana, alat pertanian, tenaga pendamping, serta penyuluh. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh proyek transmigrasi di Gunung Makmur, Tamban, Barabai, dan Tambarangan di Kalimantan Selatan. Adapun tujuan penyelenggaraan transmigrasi adalah peningkatan dan kemampuan produktivitas masyarakat transmigrasi dalam membangun kemandirian serta mewujudkan integrasi di sekitar pemukiman dan membawa pengaruh yang positif baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.



---

## **Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat**



---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**





### *Bab III*

## *Perkembangan dan Perubahan Desa Purwosari*

Dalam menggambarkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada masyarakat Desa Purwosari, maka perlu pendekatan sejarah sosial yang menekankan pada interaksi sosial, akulturasi yang mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Sejalan dengan perubahan sosial, Sartono menyatakan bahwa masyarakat dikonsepsikan sebagai sistem yang mempunyai fungsi adaptif (ekonomi), integrasi (*society*), pertahanan diri (*culture*), dan tujuan (*polity*).

Berdasarkan pada pendekatan tersebut, maka perlu digambarkan situasi dan kondisi pada saat kedatangan dan sesudah kedatangan para trans Jawa. Selain itu, juga perlu dijelaskan mengenai kondisi masyarakat lokal yang pada umumnya adalah masyarakat Banjar yang berada di sekitar lokasi trans. Dengan begitu, akan tampak bagaimana interaksi dan akulturasi sosial budaya akan menghasilkan suatu perubahan yang dipengaruhi oleh fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

## A. Kedatangan Transmigrasi

Melalui laporannya, H.G. Heyting, seorang asisten residen yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk mempelajari rencana-rencana pemerintah yang mencakup irigasi, edukasi, dan emigrasi, menyarankan untuk membangun desa-desa baru di luar Jawa, dengan rata-rata jumlah penduduk sekitar 500 KK di setiap desa dan disertai bantuan ekonomi agar menarik bagi mereka.

Kebijakan kolonisasi di Kalimantan Selatan mulai dilaksanakan pada November 1905, dengan memberangkatkan sekitar 155 KK yang berasal dari desa di Jawa, yaitu Karanganyar, Kebumen, dan Purworejo. Kemudian, disusul pada tahun-tahun berikutnya secara berturut-turut ke daerah Sulawesi dan Kalimantan Selatan.

No.	Tahun Penempatan	KK	Jiwa
1.	1905	155	815
2.	1906	550	2.795
3.	1907	8	28
4.	1909	265	1.059
5.	1912	25	142
6.	1913	59	317
7.	1914	47	249
8.	1915	81	419
9.	1916	21	107
10.	1917	87	343
11.	1918	212	1.073
12.	1919	883	3.507

13.	1920	998	5.010
14.	1921	824	3.798
15.	1922	1.414	5.450
16.	1925	196	791
17.	1928	483	1.693
18.	1929	62	214
19.	1930	45	189
20.	1931	188	7.500
21.	1932	1.385	7.000
22.	1934	268	1.375
23.	1935	3.779	13.359
24.	1936	3.300	12.500
25.	1937	4.228	19.105
26.	1938	7.748	33.309
27.	1939	1.826	35.391
28.	1940	18.249	54.742
29.	1941	4.557	21.630
30.	1942	2.222	8.642
<b>TOTAL</b>		<b>60.155</b>	<b>242.552</b>

(Sumber :[www.depnakertrans.go.id](http://www.depnakertrans.go.id))

Pengiriman awal koloni ke wilayah Purwosari, Kalimantan Selatan tercatat tahun 1937 dan berjumlah 115 KK. Rombongan kolonisasi di daerah Purwosari dilakukan secara bertahap dalam jangka tiga tahun (1937–1940 ). Pengiriman koloni pertama pada awalnya ditempatkan di daerah Purwosari km 4 Kecamatan Tamban, kemudian disusul 154 KK yang ditempatkan di Kedung

Suko dan Kedung Rejo atau Purwosari km 6 dan km 7 sekarang. Pengiriman terakhir berjumlah 130 KK dan ditempatkan di Kedung Rejo km 6 dan Margoyoso.<sup>77</sup> Rombongan kolonisasi dikirim dari Pulau Jawa (Blitar, Tulung Agung, dan Trenggalek) mendarat di Pelabuhan Banjarmasin serta dibawa dengan kapal dan diturunkan di Gambut.<sup>78</sup>

Keberhasilan pemerintah Belanda dalam mengirim koloni di daerah-daerah yaitu karena didukung oleh adanya faktor kemiskinan penduduk Jawa karena keterbatasan lahan, juga sebagai hasil propaganda pemerintah yang memberikan fasilitas-fasilitas seperti lahan untuk sawah dan hidup selama di daerah koloni. Di samping itu, pemerintah juga menunjukkan para koloni yang telah berhasil kepada masyarakat, sehingga penduduk pun tertarik mendaftar untuk menjadi koloni.

Alasan pemilihan lokasi di daerah Purwosari adalah karena kondisi geografis Desa Purwosari mempunyai potensi untuk dikembangkan lahan pertanian, serta berada di jalur lingkaran antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selain itu, juga didukung oleh rencana pemerintah Morggenstorm yang ingin membuat terusan Anjir Tamban untuk mendukung kolonisasi, yang kemudian direalisasikan tahun 1938. Terusan Anjir Tamban ini menghubungkan Sungai Barito dan sungai Kapuas sehingga dapat menunjang perhubungan dan transportasi sungai antarprovinsi.<sup>79</sup>

Pada kenyataannya, program kolonisasi yang dicanangkan pemerintah tidak mudah dilaksanakan di lapangan. Banyak kendala yang harus dihadapi oleh penduduk, selain faktor alam yang memang

---

<sup>77</sup> Latifah Mayasari, 2008, *Dinamika Sosial Transmigrasi di Purwosari Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala 1937–1965*, (Skripsi), Tidak diterbitkan, hlm. 20.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>79</sup> Soenarpo dkk., *Pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan* (FKIP Unlam: Banjarmasin, 1992), hlm. 49.

sangat berbeda serta faktor sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk membuka hutan. Pada awalnya, para trans Jawa tersebut mencoba bertahan dengan kondisi yang ada, namun pada akhirnya mereka banyak yang meninggalkan lokasi trans. Kondisi pemerintah Belanda pun mengalami pasang surut dengan berbagai krisis. Boleh dikatakan bahwa gelombang pertama para trans yang datang di lokasi ini mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan belum adanya rencana yang matang dari pemerintah, sehingga realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan. Faktor perekrutan yang tidak didasarkan pada kriteria-kriteria kemampuan untuk menghadapi medan dan keahlian untuk mengolah lahan menjadi kendala di lapangan.

Untuk gelombang kedua dan ketiga, pemerintah Belanda melarang para trans meninggalkan lokasi tanpa seizin pemerintah. Pembukaan lahan dilakukan secara bertahap dengan bantuan penduduk setempat menggunakan alat sederhana bernama sundak. Pembukaan lahan membutuhkan waktu yang lama karena terbatasnya sarana. Begitu pun dengan pembukaan Terusan Anjir yang dilakukan oleh para trans dan penduduk asal berjalan tersendat-sendat.

Pemerintah Belanda memberikan masing-masing KK lahan seluas 2 ha dan pekarangan seluas  $\frac{1}{4}$  ha, namun dalam kenyataannya lahan tersebut masih berwujud hutan perawan yang belum pernah dijamah orang. Hal inilah yang tidak pernah dibayangkan oleh para trans. Mereka mencoba membat hutannya kemudian membakarnya agar dapat digunakan sebagai lahan pertanian khususnya sawah. Penebangan kayu tidaklah mudah. Selain kayu-kayunya mempunyai diameter kurang lebih 2 m bahkan lebih, alat yang digunakan untuk menebang pun sangat sederhana. Tunggul-tunggul atau akar kayu tidak semuanya bisa tercabut. Hal ini menyulitkan para trans untuk



menanam padi secara berurutan, sehingga penanamannya pun dibuat jarang-jarang. Begitu juga dengan pembukaan lahan untuk tempat tinggal dan pekarangan, letaknya cukup jauh dari lahan pertanian mereka.

Ir. Hartolo yang merupakan penghubung antara para trans dan pemerintah Belanda membimbing para trans dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun dalam kenyataannya, pemerintah tidak memenuhi semua janjinya, termasuk lahan yang hanya diberikan 1 ha. Ransum yang dijanjikan oleh pemerintah kolonial untuk satu kepala hanya berupa 1½ kaleng beras, 15 butir telur, 1 kg ikan asin, 5 buah kelapa, garam, bawang, lombok, 1 botol minyak tanah, dan kacang hijau setiap bulannya. Itu pun mereka harus mengambilnya di Tamban (sekarang Kecamatan Tamban km 4).<sup>80</sup>

Saat pertama datang, para transmigrasi dari Jawa ditempatkan di satu bangunan yang telah disediakan di Gambut. Kondisinya saat itu masih berupa semak belukar dan mereka disuruh menebas, menebang, serta membersihkan lahan. Segala kebutuhan hidup diberikan agar mereka dapat bekerja dengan baik. Setelah mendapatkan hasil panen, mereka diarahkan untuk membuka lahan di Tamban.<sup>81</sup>

Perjalanan ke Tamban dilakukan dengan melewati sungai kecil, anak Sungai Barito (sekarang Sungai Anjir Tamban). Dalam perjalanannya, terkadang mereka harus turun saat kapal tidak bisa melewati alur sungai yang dangkal. Mereka turun mendorong kapal kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke Tamban. Tempat sementara telah disiapkan yaitu berupa rumah-rumah petak yang

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Salim Sadikun, dalam Suhartiningsih, 2014, hlm. 57.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Wikaryo pada Maret 2018, dalam Suhartiningsih, 2014, hlm. 54.

terbuat dari kayu. Sedangkan, untuk pendatang berikutnya harus mendirikan rumah sendiri.<sup>82</sup>

Sambil menebas dan membersihkan lahan, mereka juga mencari kayu untuk bahan mendirikan rumah. Bahan rumah terbuat dari kayu galam atau sejenis kayu yang dianggap keras dan kuat. Ukuran rumah seluas  $4 \times 6 \text{ m}^2$ , lantainya dari kayu blangiran, atapnya dari daun kajang (daun rumbia), dan bentuknya berupa rumah berkolong guna menghindari air jika pasang. Sebab, jika air pasang maka air akan tinggi dan menggenangi lokasi.<sup>83</sup>

Wilayah Kalimantan Selatan ditandai secara geografis sebagai kawasan daerah aliran sungai besar yang bermuara di pantai dekat Banjarmasin, yaitu aliran Sungai Barito. Sungai Barito menjadi urat nadi kehidupan yang penting bagi wilayah dari aliran hulunya di pedalaman Kalimantan hingga hilirnya di muara sungai dekat Banjarmasin. Keistimewaan sungai ini adalah aliran airnya yang sangat deras dengan debit air yang tinggi, sehingga memiliki potensi untuk sarana transportasi utama yang digunakan oleh penduduk sejak ratusan tahun silam sebagai jalur transportasi penghubung antara hulu dan hilir. Selain itu, ketinggian debit air Sungai Barito memberikan kontribusi yang besar bagi kesuburan tanah di daerah yang dilewati oleh alirannya. Di sepanjang aliran Sungai Barito ditemukan daerah hutan yang subur dan lebat dengan segala potensinya.

Pengukuran luas lahan yang dialiri oleh Sungai Barito pertama kali dilakukan oleh Melvill van Carnbee, seorang ahli pemetaan dan geologi Belanda, yang mengadakan penelitian lapangan pada tahun 1845. Dari hasil penelitiannya, Carnbee menetapkan angka 393,1 mil persegi di daerah sekitar Banjarmasin yang memanfaatkan aliran

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

Sungai Barito sebelum mencapai muaranya. Muara Sungai Barito sendiri diukur olehnya mencapai 3.240 meter, suatu bentangan yang bisa memberikan akses masuk ke daerah pedalaman dengan arus deras alirannya. Dari kesibukan di muara sungai dan sekitarnya, tanah yang ada memungkinkan bagi pembukaan lahan pertanian dan bisa memberikan potensi bagi tumbuhnya pemukiman permanen untuk para pendatang di sana.<sup>84</sup>

## B. Perkembangan Desa Purwosari

### 1. Pemekaran Wilayah

Tamban merupakan salah satu kantong koloni Belanda di Kalimantan Selatan. Dalam perkembangannya menjadi kecamatan, Tamban merupakan salah satu kecamatan yang masuk dalam pemerintahan Swatantra Tingkat II Banjar. Pada 10 Oktober 1955, Desa Purwosari direalisasikan menjadi salah satu desa di wilayah Kecamatan Tamban yang beribu kota di Aluh-aluh. Jabatan camat untuk pertama kali diduduki oleh Abu Semah. Dalam perkembangan selanjutnya, Kecamatan Tamban dipindahkan menjadi wilayah Kabupaten Barito Kuala tertanggal 1 September 1965.<sup>85</sup>

Desa Purwosari adalah kampung pertama yang terbentuk dan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala saat ini. Letaknya sekitar 80 km dari Marabahan, Kabupaten Barito Kuala dan sekitar 10 km dari Kota Banjarmasin. Letaknya cukup strategis, yakni berada di pinggir Anjir Tamban yang menghubungkan Sungai Barito dan Sungai Kapuas. Desa Purwosari dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu

---

<sup>84</sup> Anon, "Aardrijkskundige Aanteekeningen over Zuidelijk Borneo" dalam *Tijdschrift Voor Nederlandsch Indie*, Thn. 1861, Vol. 23, hlm. 327.

<sup>85</sup> Latifah, *Op.Cit.*, hlm. 32.

jalur darat dan jalur sungai. Adapun batas wilayah Desa Purwosari adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>

- Sebelah utara berbatasan dengan Anjir Serapat.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Madya Banjarmasin.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tabunganen.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mekarsari.

Keadaan tanahnya merupakan dataran rendah, berawa-rawa, dan cocok untuk bertanam padi sawah dengan kondisi pasang surut. Air pasang biasa terjadi pada bulan Januari – Februari dan ini merupakan masa bertanam. Sedangkan, masa panen berlangsung antara bulan Agustus dan September. Sejak menjadi tujuan kolonisasi, keadaan di Purwosari semakin berhasil (Swasono, 1985: 55).

Dengan dibangunnya Anjir, masyarakat mulai berdatangan dan membangun rumah di sepanjang sungai terutama suku Banjar. Sedangkan, masyarakat Jawa tetap berada di muara Sungai Anjir Tamban dengan menempati handil-handil persawahan mereka, dengan membentuk kelompok-kelompok. Kelompok handil-handil dinamai dengan nama Jawa, seperti Kedung Suko, Kedung Rejo, dan Margoyoso.

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

<sup>86</sup> Latipa Mayasari, *Op.Cit.*, hlm. 11.



Gambar 1. Handil atau Saluran Air di Desa Purwosari yang Berbatasan dengan Jalan Aspal (Sebelah Kanan) dan Rumah Penduduk (Sebelah Kiri)

Perkembangan daerah Purwosari ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang tertarik untuk menetap di sana, bukan hanya suku Banjar dan suku Dayak, tetapi juga suku Bugis dan suku Sunda walaupun dalam skala kecil. Saat ini, Kecamatan Tamban telah dimekarkan menjadi dua yaitu Kecamatan Tamban dan Kecamatan Mekarsari. Desa Purwosari I merupakan satu di antara enam belas desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tamban. Desa Purwosari telah dimekarkan menjadi tiga dusun, yaitu dusun I, dusun II, dan dusun III. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat dengan budaya dan keanekaragaman suku yang tinggal di Purwosari menunjukkan bahwa desa Purwosari bukan lagi daerah trans Jawa, melainkan sudah berbaur menjadi daerah yang multikultur.





Gambar 2. Kepala Desa yang Pernah Bertugas di Desa Purwosari

## 2. Sistem Kelembagaan

Pada awal berdirinya Desa Purwosari, oleh pemerintah Belanda diangkatlah Ir. Hartolo menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat koloni. Kemudian, oleh Ir. Hartolo, dipilih seorang bekel yang dapat memimpin Desa Purwosari. Maka, diangkatlah berturut-turut Rianto, Wonoharto, Saimun (1950–1964), dan Yoso yang hanya menjabat tiga bulan karena mulai dilakukan pemilihan kepala desa yang didasarkan pada pilihan masyarakat.<sup>87</sup>

Bekel dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh juru tulis atau carik dan para RT atau penggerak yang memimpin tiap-tiap handil. Selanjutnya, dengan berkembangnya sistem pemerintahan Indonesia, maka kepemimpinan tradisional ini mengalami perubahan yaitu dengan diangkatnya kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat untuk menggantikan bekel. Kepala desa dibantu oleh ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Desa), sekretaris desa, dan kepala dusun yang membawahi ketua RT.

Di samping kelembagaan yang bersifat resmi atau formal, dalam kehidupan masyarakat terdapat organisasi atau perkumpulan

<sup>87</sup> Kantor Kepala Desa Purwosari (Maret 2018)

tidak formal, seperti kelompok pengajian atau yassinan, kelompok petani, kelompok petani kelapa, kelompok kematian, dan lain-lain.

### 3. Jumlah Penduduk

Letak Tamban yang strategis berada di pinggir Anjir Tamban yang merupakan lalu lintas sungai yang menghubungkan daerah-daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sehingga memungkinkan daerah Tamban berkembang dengan cepat. Dengan sarana dan prasarana yang semakin meningkat, menyebabkan masyarakat dapat keluar masuk daerah Tamban dengan leluasa. Tamban menjadi semakin berkembang penduduknya dengan adanya program transmigrasi lokal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Transmigrasi lokal untuk daerah Kecamatan Tamban pada tahun 1957 sebanyak 200 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 1.121 jiwa.<sup>88</sup> Transmigrasi ini berasal dari berbagai daerah pahuluan<sup>89</sup> yaitu Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin.<sup>90</sup> Dengan perkembangan jumlah penduduk yang meningkat cepat dan adanya transmigrasi, Kecamatan Tamban kemudian dimekarkan menjadi dua yaitu Kecamatan Tamban dan Kecamatan Mekarsari.

Masyarakat atau penduduk yang ada di Desa Purwosari juga mengalami banyak peningkatan. Para trans yang tadinya pergi dari desa lama-kelamaan banyak yang kembali ke desa, karena desa sudah berkembang menjadi besar dan sarana jalan sudah lancar. Jumlah penduduk di Desa Purwosari awalnya hanya terdiri tidak lebih dari 399 KK, berkembang menjadi tiga dusun.

<sup>88</sup> H.MT Wedy Utomo, 1993. *Kontribusi Transmigrasi dalam Pembangunan Daerah*, jilid 2. Duta Informatika bekerja sama dengan Kanwil Deptrans dan PPH Prov. Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Jateng. hlm. 239.

<sup>89</sup> Daerah hulu sungai.

<sup>90</sup> Latipah Mayasari, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Dusun I Purwosari sekarang berjumlah 135 KK yang terdiri dari 225 laki-laki dan 224 perempuan, yang tersebar di lima RT. Dusun II Kedungsuko berjumlah 316 KK yang terdiri dari 340 laki-laki dan 522 perempuan, yang tersebar di enam RT. Sementara, Dusun III berjumlah 157 KK yang terdiri dari 74 laki-laki dan 249 perempuan, yang tersebar di empat RT.<sup>91</sup>



---

Gambar 3. Memasuki Desa Purwosari Kecamatan Tamban

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

---

<sup>91</sup> Kepala Desa Purwosari I



Gambar 4. Salah Satu Jembatan di Desa Purwosari

Purwosari adalah sebuah nama desa yang diberikan oleh Ir. R. Hartolo, pimpinan kolonisasi pada saat itu. “Purwo” artinya permulaan dan “sari” artinya kemuliaan. Menurut Hartolo, Purwosari adalah sebuah tempat yang mereka harapkan bisa mendapatkan kesuksesan di tempat yang baru. Nama Purwosari juga menandakan identitas mereka sebagai orang Jawa.<sup>92</sup> Dengan nama Purwosari diharapkan seolah-olah mereka seperti berada di kampung asal mereka.

#### 4. Mata Pencarian

Pada awal berdirinya Desa Purwosari, mata pencarian masyarakat adalah pertanian. Sambil menunggu hasil panen, masyarakat Purwosari biasanya juga berdagang. Barang dagangannya adalah hasil kebun yang mereka tanam di samping padi. Mereka menanam singkong, ketela, pisang, serta tanaman palawija, kelapa, dan sayur-

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak H. Abdul Hamid pada Maret 2018.

mayur. Sebagian hasil tanaman kebun mereka gunakan untuk memenuhi hidup sehari-hari.

Keberadaan pasar sangat membantu masyarakat untuk melakukan jual beli dan saling berinteraksi. Pasar hari Sabtu adalah pasar yang paling ramai, karena pada hari itu masyarakat petani libur dari ladang, para pegawai libur dari kerja, dan para pedagang juga banyak yang berjualan di hari Sabtu. Pasar mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat Jawa untuk belajar budaya Banjar, seperti bahasa, makanan, sikap, toleransi, dan lain-lain. Mengingat saat itu jarak antarrumah berjauhan, maka pasar merupakan fasilitas umum yang banyak dikunjungi oleh masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya penduduk yang tinggal menetap di Purwosari, mata pencaharian penduduk pun ikut mengalami perkembangan. Selain pertanian, ada pula masyarakat yang membuka warung-warung untuk berjualan, baik makanan maupun kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang berprofesi sebagai pegawai, guru, dan wiraswasta.

---

## **C. Perubahan Sosial Budaya**

### **1. Adaptasi dan Interaksi Sosial**

Kondisi masyarakat Jawa yang mengikuti program kolonisasi pada umumnya adalah masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian bahkan tidak memiliki tempat tinggal permanen. Menurut hasil wawancara dengan para orang tua yang merupakan generasi kedua atau ketiga di lokasi, diperoleh informasi bahwa pada umumnya para trans adalah masyarakat yang kehidupannya

pas-pasan sebagai buruh tani serta tidak mempunyai lahan, dan sebagian lagi buruh kasar di pabrik ataupun perkebunan.<sup>93</sup>

Dalam kehidupan petani di Jawa, kepemilikan tanah menjadi faktor penting untuk kenaikan status. Maka, berdasarkan pada kepemilikan tanah, petani dapat diklasifikasikan menjadi empat golongan. Golongan pertama adalah gogol, yaitu petani yang mempunyai lahan sawah, pekarangan, dan rumah. Golongan kedua adalah setengah gogol, yaitu petani yang hanya memiliki pekarangan dan rumah. Golongan ketiga adalah menumpang, yaitu petani yang hanya memiliki rumah dan tidak memiliki sawah. Golongan terakhir adalah kumpulan atau nusup, yaitu petani yang tidak mempunyai rumah maupun sawah.<sup>94</sup>

Mayoritas penduduk Jawa yang mengikuti program kolonisasi adalah golongan kedua, ketiga, dan keempat. Maka, dapat dikatakan jika para trans Jawa yang datang ke Purwosari adalah golongan yang secara ekonomi kurang mampu. Tujuan keikutsertaan mereka dalam program ini adalah untuk memperbaiki kehidupan mereka dengan memiliki lahan sawah, pekarangan, dan rumah—meski dalam kenyataannya tidak semudah itu.

---

Setelah tiba di lokasi trans, kebanyakan para transmigran tidak siap dengan kondisi alam yang jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Jawa. Dengan begitu, mau tidak mau mereka harus beradaptasi terhadap lingkungan dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Mereka harus bekerja keras membuka hutan untuk lahan dengan peralatan yang sederhana, dengan gambut yang begitu tebal. Belum lagi gigitan binatang hutan yang bisa membahayakan keselamatan mereka. Itu semua yang harus dialami oleh para trans. Mereka

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Wakidi.

<sup>94</sup> Pstrice Lewang, *Ayo ke Tanah Sebrang; Transmigrasi di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), hlm. 70.



yang mau bekerja keras dan tidak putus asa akhirnya berhasil. Namun, mereka yang tidak ulet dan gampang menyerah akhirnya memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan hidup di tempat lain.

Bantuan dari penduduk asli, yaitu penduduk Banjar, sangat diperlukan oleh masyarakat trans. Keduanya dapat berinteraksi dengan baik, karena etika budaya mereka untuk saling menghormati dan menghargai, membantu mereka untuk menyesuaikan diri. Masyarakat Banjar dan Jawa yang sama-sama mempunyai budaya untuk tolong-menolong antarsesama membuat kehidupan secara sosial tidak banyak menemui kendala. Hanya pada awalnya saja terkendala dalam bahasa, tetapi lama-kelamaan hal itu bisa mereka atasi.

Proses interaksi yang dilakukan didasarkan pada beberapa faktor, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor imitasi adalah dorongan orang untuk mengikuti dan mematuhi kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang berlaku di tempat itu, baik nilai positif maupun negatif. Faktor sugesti adalah sebuah penerimaan ketika seseorang memberikan pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya. Faktor identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri orang untuk menjadi sama dengan orang lain. Sedangkan, faktor simpati adalah proses di mana seseorang tertarik pada orang lain.<sup>95</sup>

Proses interaksi yang mereka lakukan biasanya terjadi di tempat-tempat umum, seperti pasar dan sawah atau ladang. Hal ini disebabkan lokasi pemukiman mereka terpisah dan saling berjauhan, sehingga pasar menjadi tempat untuk melakukan transaksi sekaligus interaksi. Saat masih terkendala dengan bahasa saat awal memulai interaksi, mereka menggunakan bahasa isyarat

---

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 63–64.

agar dapat dimengerti satu sama lain. Masyarakat setempat yang mayoritas adalah suku Banjar banyak membantu para trans dalam menyesuaikan diri dengan kebiasaan sehari-hari mereka, seperti mencuci di sungai, menampung air hujan untuk minum, menghadapi berbagai jenis binatang yang mereka temui, mengolah makanan yang terdapat di hutan, menggunakan peralatan-peralatan Banjar, dan lain-lain.

## 2. Budaya

Selain dalam bidang sosial, masyarakat juga berinteraksi dalam bidang budaya. Budaya dalam masyarakat menurut Koentjaraningrat ada tujuh macam, meliputi sistem sosial/organisasi masyarakat, religi dan upacara keagamaan, mata pencaharian hidup, kesenian, bahasa, dan sistem pengetahuan.<sup>96</sup> Masyarakat trans mempunyai budaya yang berbeda, namun mereka mencoba untuk menyesuaikan dengan budaya setempat.

Sadikun dalam Suhartiningsih mengatakan bahwa penduduk Jawa membawa kebiasaan hidup mereka sehari-hari, seperti bahasa, adat, dan selamatan ritual hidup, mulai dari perkawinan, kelahiran, sampai kematian. Setiap tahun menjelang Ramadhan biasanya diselenggarakan selamatan meengan, lalu diadakan pasang tumbal kepala sapi yang ditanam di simpang empat, serta acara bersih desa atau ngruwat, dan pada malam harinya akan diselenggarakan kesenian seperti wayang kulit, ketoprak, atau ludruk.<sup>97</sup>

Untuk saat ini, upacara meengan dilakukan secara bergiliran dan tidak secara besar-besaran seperti dahulu. Hal ini berdasarkan pertimbangan ekonomi atau biaya penyelenggaraan yang besar dan makanan yang berlimpah banyak yang terbuang. Penyelenggaraan

---

<sup>96</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I* (Jakarta: Renika Cipta, 1990), hlm. 80–81.

<sup>97</sup> Suhartiningsih, *Op.Cit* , hlm. 60.

pasang tumbal dan bersih desa juga sudah tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini semua merupakan pengaruh dari tradisi Islam yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Sedangkan, untuk penyelenggaraan kesenian tidak lagi dilakukan karena SDM yang menguasai kesenian sudah jarang. Hal ini karena pada masa pendudukan Jepang, segala jenis kesenian dilarang sehingga kesenian Jawa mengalami mati suri. Sementara itu, regenerasi terhadap kesenian tidak dilakukan dengan baik. Faktor biaya juga menjadi salah satu kendala, karena untuk menggelar wayang kulit harus mendatangkan dalang serta sinden dari Jawa. Hanya masyarakat yang berkecukupan yang mampu menyelenggarakan kesenian seperti wayang, ketoprak, ataupun ludruk.

Perubahan sosial juga terlihat dari terjadinya perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal, yaitu Banjar atau Dayak. Adat istiadat perkawinan tidak lagi dilakukan secara murni Jawa, tetapi dengan menggabungkan adat Banjar ataupun Dayak sesuai kesepakatan mereka. Apabila perempuan Jawa menikah dengan laki-laki Banjar, maka biasanya dilaksanakan dengan adat Jawa, dengan memasukkan unsur-unsur Banjar dan modern dalam pelaksanaan perkawinan. Pola pengasuhan anak dan keluarga pun akhirnya mengalami perubahan. Menurut hasil wawancara yang diperoleh di lapangan, pihak wanita Jawa akan mengikuti pihak pria untuk tinggal, sehingga harus menyesuaikan dengan adat kaum pria, terutama dalam adat istiadat yang berkaitan dengan siklus hidup. Namun, untuk pria Jawa yang menikah dengan etnis lain akan tetap memegang tradisi Jawa, walaupun sudah tidak lengkap dan bersifat fleksibel.

Hubungan interaksi yang mereka lakukan meliputi hubungan ekonomi terutama dalam pola pertanian, sosial terutama dalam hubungan perkawinan, dan budaya dalam hal kesenian serta upacara-upacara daur hidup dan makanan. Akulturasi masyarakat Jawa juga terlihat dalam penggunaan bahasa Banjar. Melalui interaksi secara terus-menerus dengan masyarakat Banjar, maka lama-kelamaan masyarakat Jawa pandai berbahasa Banjar. Masyarakat Jawa menggunakan bahasa Jawa hanya pada saat bertemu dengan sesama orang Jawa. Namun, lama-kelamaan masyarakat Jawa generasi penerus sudah jarang menggunakan bahasa Jawa karena pergaulan mereka yang semakin intens dengan masyarakat Banjar. Bahkan, beberapa informan—masyarakat keturunan Jawa—mengatakan bahwa mereka bukan lagi orang Jawa, karena mereka tidak pernah pergi ke Jawa tempat asal nenek moyang mereka. Budaya Jawa semakin memudar manakala anak dan cucu mereka menikah dengan orang Banjar maupun Dayak.

Perubahan juga terlihat pada pembuatan rumah masyarakat trans yang tidak lagi membangun dalam bentuk limas atau joglo, tetapi menyesuaikan dengan rumah-rumah Banjar. Hal ini dikarenakan faktor geografis tanah rawa-rawa yang hanya cocok dengan bentuk rumah panggung. Rumah bentuk panggung memberikan keamanan dari binatang-binatang buas dan berbisa yang banyak terdapat di hutan-hutan. Selain itu, rumah panggung memanfaatkan banyak kayu yang dapat dengan mudah diperoleh di hutan.

Meskipun dalam kehidupan masyarakat Jawa di Desa Purwosari masih melaksanakan berbagai adat yang ada di Jawa, namun dengan adanya interaksi yang semakin intensif, maka budaya Jawa sudah banyak berintegrasi dengan budaya Banjar, tidak lagi murni budaya Jawa. Bisa dikatakan jika budaya Jawa sudah

banyak mengalami percampuran dan integrasi dengan budaya Banjar sehingga memunculkan budaya baru. Untuk lebih jelasnya bagaimana integrasi dua budaya tersebut berlangsung akan dibahas dalam bab selanjutnya.

### 3. Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial terjadi karena pengaruh ekonomi dan pendidikan yang dalam perkembangannya setiap warga trans mengalami peningkatan, meskipun pada awalnya mereka sama-sama perantau yang mempunyai status sama. Keterikatan mereka pada nasib yang sama sehingga harus tolong-menolong masih sangat terasa, terutama saat upacara-upacara adat seperti perkawinan, kelahiran, maupun kematian. Mereka masih melakukan *sambatan* atau tolong-menolong dalam membuat rumah atau melaksanakan upacara adat.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa narasumber diperoleh informasi bahwa masing-masing individu bekerja keras dalam meningkatkan kehidupan mereka. Masyarakat trans dalam perkembangannya mempunyai tingkat ekonomi dan pendidikan yang berbeda. Namun, hal ini tidak menjadikan rasa persatuan di kalangan masyarakat Jawa luntur. Mereka masih melakukan kegiatan gotong-royong dalam kegiatan sosial maupun budaya.



---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**





## *Bab 10*

# *Integrasi Pertanian dan Budaya Jawa di Desa Purwosari*

Dari berbagai pengertian tentang integrasi, dapat diartikan bahwa integrasi adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Dengan begitu, kelompok masyarakat transmigrasi yang berasal dari etnis Jawa memiliki unsur-unsur berbeda dengan masyarakat asal dari etnis yang berbeda. Mereka melakukan adaptasi dan bersikap komformitas terhadap kehidupan sosial dan budaya kelompok etnis yang berbeda.

Pengertian etnis di sini terletak pada pengorganisasian sosial yang didapat oleh para pelaku secara kreatif untuk keperluan interaksi sosial yang dibedakan oleh karakteristik kebudayaan yang dimiliki oleh para anggotanya (Suparlan, 1999). Adapun karakteristik menurut Cohen meliputi agama, bahasa, dan suku/kebangsaan (Cohen, 1992).

Dalam proses integrasi terjadi interaksi antara para transmigran yang merupakan etnis Jawa dengan penduduk asal yang mayoritas etnis Banjar dan Dayak. Proses interaksi sosial antara kelompok masyarakat dengan beberapa kelompok lain akan membuahkan dua hal, yaitu hal positif dan negatif (Raharjo, 1984). Hal yang positif timbul apabila interaksi itu dapat menciptakan hubungan kerja sama sosial yang harmonis dalam masyarakat baru. Kondisi semacam ini sering disebut integrasi, yaitu proses dari kelompok masyarakat pendatang untuk secara aktif mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat di wilayah yang baru, serta dapat menggambarkan suatu keadaan masyarakat baik asal maupun pendatang dalam suasana relatif aman dan tenteram tanpa ada konflik sosial yang dapat mengganggu proses perkembangan secara keseluruhan dalam wilayah itu (Kalsum, 2015).

Sementara itu, proses asimilasi dan akulturasi adalah bagian proses dari integrasi itu sendiri. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur asing lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu.<sup>98</sup>

Menurut teori fungsional, unsur-unsur budaya akan melakukan integrasi ketika ada kebutuhan bahwa di antara mereka tidak bisa mencapai tujuan secara terpisah. Oleh karena kesamaan kebutuhan ini, proses integrasi budaya dipermudah melalui koordinasi internal, tetapi dengan syarat masing-masing memiliki tugas atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan yang sama. Begitu pun dengan masyarakat transmigran yang berada dalam lingkungan dan situasi baru, membutuhkan banyak penyesuaian diri agar dapat

---

<sup>98</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I* (Jakarta: Renika Cipta, 1990), hlm. 142.

bertahan. Sementara, di sisi lain, masyarakat asal juga melakukan penyesuaian agar dapat berinteraksi dengan pendaatang. Beberapa budaya yang dalam prosesnya terjadi integrasi akan diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

## A. Pertanian

Mata pencaharian utama para transmigran adalah petani, walaupun di tempat asal mereka adalah petani yang tidak mempunyai lahan pertanian. Petani di Jawa secara tidak resmi digolongkan ke dalam beberapa golongan yang didasarkan pada kepemilikan lahan. Golongan pertama adalah petani yang mempunyai rumah, pekarangan, dan lahan untuk pertanian. Golongan kedua adalah petani yang mempunyai rumah dan pekarangan, tetapi tidak mempunyai lahan. Golongan ketiga adalah petani yang mempunyai rumah, tetapi tidak mempunyai pekarangan dan lahan. Golongan keempat adalah petani yang tidak mempunyai rumah, pekarangan, maupun lahan.

Pada umumnya, yang menjadi peserta kolonisasi atau transmigrasi adalah golongan kedua, ketiga, dan keempat. Salah satu alasan dilakukan kolonisasi atau transmigrasi adalah peningkatan penduduk di pulau Jawa semakin tinggi, sementara lahan tidak mengalami perkembangan. Kepadatan penduduk akan menyebabkan semakin banyaknya petani yang tidak mempunyai lahan. Hal ini akan berakibat pada penggunaan lahan kritis dan kerusakan lingkungan. Selain itu, kondisi ini juga akan menimbulkan masalah kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan pengangguran (Patrice Levang, 2003:17).

Oleh sebab itu, pemerintah kolonial berharap dengan kolonisasi akan terjadi pemerataan ekonomi. Petani Jawa yang tidak mempunyai lahan akan dapat meningkatkan ekonominya dengan mengolah lahan mereka sendiri. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran kebijakan kolonisasi adalah Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, tepatnya di Desa Purwosari.

Di wilayah yang baru ini, masyarakat transmigran Jawa harus menyesuaikan keadaan lingkungan alam yang jauh berbeda dengan keadaan atau struktur tanah yang ada di Jawa. Kondisi tanah atau lahan di Pulau Kalimantan pada umumnya adalah gambut, begitu juga lahan yang ada di daerah Kecamatan Tamban. Lahan yang dimiliki oleh Kecamatan Tamban berdasarkan data tahun 1965 seluas 164,30 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 desa (Mayangsari, 2008:11).

Kondisi lahan bergambut memerlukan cara pengolahan tersendiri agar dapat ditanami padi. Para petani Banjar mempunyai pola pasang surut dalam mengolah lahan gambut, sedangkan para transmigran terbiasa dengan pola irigasi. Dengan kondisi tersebut, maka para transmigran harus menyesuaikan diri dengannya. Untuk itu, mereka diberikan pelatihan agar mampu mengolah lahan gambut dengan baik.

Saat datang pertama kali, mereka akan ditempatkan di penampungan sementara yang berada di daerah Gambut. Setelah berada di daerah penampungan selama kurang lebih enam bulan dan telah dianggap cukup memperoleh pelatihan, mereka dipindahkan ke daerah Tamban. Namun, ilmu yang mereka peroleh ternyata tidaklah cukup. Oleh karena itu, dalam praktiknya mereka banyak belajar dengan orang Banjar yang pandai dalam melakukan pola pasang surut. Pembuatan parit atau handil bertujuan untuk menampung air di lahan rawa. Orang Banjar tahu bahwa pada waktu air pasang, air sungai masuk ke rawa serta mengurangi kadar asam

air rawa. Sedangkan, pada waktu surut, air masuk lagi ke sungai membawa keasaman rawa, sehingga tanah di tepi pantai atau sungai biasanya dapat ditanami padi dan tanaman lain dengan baik. Hal ini jelas sangat berbeda dengan sistem irigasi di Jawa, dengan struktur tanah yang padat dan kering, pembuatan parit justru untuk memberikan air dan mengatur keperluan air bagi sawah.

Hal pertama yang mereka lakukan di daerah Tamban adalah membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan pemukiman. Bukan hal yang mudah menebang pohon di hutan yang masih perawan. Dengan peralatan yang sederhana, tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Maka, sebelum lahan dan pemukiman selesai dibuat, mereka ditampung sementara di desa dekat Tamban. Kondisi lahan pasang surut di tempat ini berupa rawa-rawa dengan struktur tanah yang terendam air atau gambut.

Menurut Adhi dkk. (1992), lahan pasang surut berdasarkan jangkauan air dapat dibedakan menjadi empat, di antaranya:

1. *Tipe A*, yaitu lahan yang hanya terluapi air pasang, baik pasang besar maupun pasang kecil.
2. *Tipe B*, yaitu lahan yang hanya terluapi oleh pasang besar.
3. *Tipe C*, yaitu lahan yang tak pernah terluapi walaupun pasang besar. Air pasang mempengaruhi secara tidak langsung kedalaman air tanah di permukaan tanah kurang dari 50 cm.
4. *Tipe D*, yaitu lahan yang tidak terluapi air pasang dan air tanahnya lebih dalam dari 50 cm.

Sementara itu, kondisi lahan di tempat penelitian memiliki kedalaman air lebih dari 50 cm, dengan kondisi tanah gambut dan mengandung asam sulfat. Wilayah ini awalnya masih hutan perawan dan banyak ditumbuhi pohon-pohon besar, tanaman liar, serta binatang air seperti pacet. Dengan kondisi hutan yang masih



perawan, maka ukuran pohonnya pun bisa mencapai diameter 2 m atau lebih, sehingga sulit untuk ditebang dengan menggunakan alat yang sederhana. Belum lagi banyaknya nyamuk malaria, menyebabkan masyarakat trans banyak yang terserang malaria.

Adapun bibit padi disediakan oleh pemerintah Belanda melalui pimpinan koloni yang bernama Ir. Hartolo, seorang insinyur pertanian yang membantu mereka dalam mengolah lahan. Dialah yang menjadi penghubung pemerintah Belanda dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat transmigran. Segala kebutuhan masyarakat transmigran dipenuhi oleh Pak Hartolo, mulai dari jatah hidup, bibit padi, peralatan pertanian, sampai masalah kesehatan. Namun, di sisi lain, mereka menemui kesulitan-kesulitan dalam beradaptasi dengan alam dan terkait kondisi kesehatan. Selain karena terbatasnya peralatan yang disiapkan oleh pemerintah kolonial, penyakit pun menyerang para transmigran karena kondisi pada saat itu yang memang belum memadai untuk hidup layak.

Setelah lahan dibuka serta dibersihkan dari semak-semak dan kayu, langkah selanjutnya adalah memulai penyemaian bibit yang sering disebut dengan istilah *ngelambak*, yaitu membuat wadah dari kayu yang diisi dengan lumpur (Riwut, 1979:17). Sebelum disemai di dalam wadah kayu, bibit padi terlebih dahulu disimpan di dalam air sampai terlihat tunasnya. Setelah semua dimasukkan ke wadah kayu, bibit kemudian ditutup dengan daun atau terpal selama kurang lebih lima belas hari. Dalam lima belas hari, bibit padi siap dipindahkan ke lahan sawah pasang surut, dan pemindahan ini disebut dengan *nguriti* (Mayangsari, 2008:60).

Untuk sistem pengairan sawah, mereka menggunakan sistem pengairan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Banjar, yaitu sistem parit atau kanal. Mereka membuat parit-parit (saka) atau kanal kecil di sekitar sawah yang dihubungkan ke handil (saluran

sekunder), selanjutnya handil akan langsung menghubungkan ke sungai. Saka atau saluran tersier juga bisa dimanfaatkan sebagai penghubung antarhandil. Manfaat saka atau handil adalah dapat menampung air yang berlebihan dari lahan sawah, kemudian mengalirkannya ke sungai agar kadar keasaman air rawa berkurang. Keuntungan lain dari saluran-saluran tersier maupun sekunder ini pada masa itu adalah sebagai sarana transportasi.

Para petani trans tidak hanya belajar bertanam padi di sawah pasang surut, tetapi juga bertanam kelapa dan palawija. Selain kebutuhan bahan pokok beras, para petani trans juga menanam sayur-sayuran untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara, gula, garam, dan minyak disediakan oleh pemerintah kolonial atau dengan membelinya di pasar.

## B. Adat Istiadat

Kehidupan masyarakat dilengkapi dengan adat istiadat, dari kelahiran sampai kematian. Adat istiadat kelahiran bagi orang Jawa sangatlah penting, agar sang bayi yang akan lahir selamat dan sehat.

# Balai Pelestarian Nilai Budaya

## 1. Upacara Kelahiran

### Kalimantan Barat

#### a. Tingkeban (Upacara Mandi Ibu Hamil 7 Bulan)

Selamatan dimulai sejak bayi dalam kandungan saat kehamilan ibu menginjak tujuh bulan yang disebut tingkeban. Tingkeban merupakan adat Jawa asli yang dipengaruhi oleh budaya Hindu. Tingkeban biasa dilakukan dengan membacakan doa-doa yang dilakukan oleh seorang dukun bayi. Peralatan dan makanan disiapkan, seperti

nasi gurih lengkap dengan ayam panggang utuh yang tidak dipotong, nasi serondeng kelapa, metri (urap dan sayur lodeh), maes agung atau kaleman, jajan pasar dan sebagainya. Tidak lupa juga disiapkan cengkir dari kelapa gading dan bubur brocot (bubur yang di tengahnya diberi pisang). Setelah selesai didoakan, makanan tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada tamu yang hadir untuk dibawa pulang.

Acara selanjutnya adalah sang ibu mandi kembang setaman, yang terdiri atas bunga melati, kenanga, mawar merah dan putih, serta cempaka. Sang ibu berganti kain atau tapih sebanyak tujuh kali dan sang ayah membelah dua cengkir yang diibaratkan Janoko dan Sembodro—dua lakon cerita pewayangan yang mempunyai wajah cakep dan berbudi pekerti baik. Adapun tujuan dari tingkeban ini adalah untuk mendidik sang bayi agar menjadi manusia yang berbudi luhur, tidak suka berkelahi, dan menjadi anak yang patuh.

Saat ini, acara tingkeban mengalami perubahan dengan adanya pengaruh Banjar atau Islam. Tingkeban tidak lagi menggunakan doa-doa yang dilakukan oleh dukun bayi, tetapi dengan doa-doa Islam melalui pengajian atau mohon doa selamat dari ustadz. Nasihat yang diberikan kepada pasangan suami istri tersebut merupakan nasihat yang ada dalam Al-Qur'an. Selain itu, persyaratan sarana untuk doa juga mengalami pengurangan, tidak selengkap pada waktu dahulu.

## **b. Melahirkan (Babaran)**

Saat melahirkan, seorang bayi bersama tembunyi (ari-ari) dan tali pusar akan dikeluarkan dari rahim sang

ibu. Sesuai dengan adat, ari-ari dan tali pusar diberikan perlakuan istimewa karena dianggap sebagai penghubung antara sang bayi dan sang ibu saat di dalam rahim. Tali pusar dan tembunyi dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam kendi yang terbuat dari tanah dan diberi rempah-rempah, seperti kunyit, bawang, garam, kertas, pensil, dan rautan. Hal ini dimaksudkan agar si bayi kelak menjadi orang yang pandai dan mempunyai kepribadian yang menyenangkan. Kendil tersebut kemudian ditanam di dalam tanah setelah didoakan oleh dukun beranak atau dukun bayi, lalu diberi teplok atau lampu minyak tanah dan diberi pagar di sekelilingnya agar tidak dimakan binatang. Maksud dan tujuan dari tradisi ini adalah agar keempat saudara sang bayi yang lahir berurutan (kawah atau ketuban, tali pusar, ari-ari, dan darah) tidak mengganggu kehidupan sang bayi.

Namun, saat ini sulit untuk mencari dukun beranak, kecuali di kampung-kampung terpencil yang sulit dijangkau oleh bidan atau dokter. Maka, tradisi ini pun sekarang biasanya didoakan dengan cara Islam bagi yang menganut Islam. Lampu teplok pun sekarang sudah jarang ditemui dan diganti dengan lampu listrik.

### c. Selamatan Brokohan

Selamatan bayi yang baru lahir dilakukan pada malam hari. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah bubur merah putih, nasi urap dengan lauk-pauk (ambeng), serta jenang monco warno untuk sedekah empat saudaranya yang menyertainya saat lahir. Tujuan dari brokohan ini adalah untuk menyedekahi orang yang melahirkan serta bidan atau dukun yang membantu persalinan agar

mendapat berkah, selamat, panjang umur, dan barokah. Doa dilakukan dalam agama Islam dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an.

#### **d. Pasaran (Upacara Pemberian Nama/Tasmiyahan)**

Pemberian nama bayi dilakukan setelah usia sang bayi lima hari, walaupun pemilihan nama sudah dilakukan sebelum itu bahkan sebelum bayi lahir. Untuk pemberian nama biasanya dilakukan di antara keluarga saja dan yang hadir juga para kerabat saja. Nama biasanya diberikan oleh kakek atau kerabat yang tertua dan disetujui oleh yang hadir. Kemudian, tasmiyahan sifatnya lebih besar, yaitu dengan mengundang banyak orang dan rangkaian acaranya pun lebih banyak, serta mengundang ustadz atau ulama dan hadrah untuk mengisi acara. Setelah para undangan hadir semua, acara dimulai dengan permainan hadrah menyanyikan lagu-lagu islami, yang disusul dengan ulama yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Selanjutnya, ayah dan ibu bayi membawa bayi di hadapan sang ulama, dan seorang tamu melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Setelah selesai, ulama mengucapkan basmallah dan memberikan nama yang sudah disiapkan oleh orang tua si bayi, lalu mengusap dahi si bayi sambil mengucapkan niat sebanyak dua kali. Rangkaian acara dilanjutkan dengan menggunting rambut si bayi dan mengolesinya dengan tepung tawar yang telah disiapkan oleh sang ulama dan dibacakan doa-doa.

Terdapat perbedaan yang cukup kelihatan dalam tradisi pasaran ini apabila dibandingkan dengan upacara pasaran yang ada di Jawa. Pasaran yang terjadi di Purwosari sudah mengadopsi tradisi potong rambut di



masyarakat Melayu. Adanya pembacaan ayat-ayat suci dan lantunan musik hadrah ini menunjukkan ciri-ciri budaya Melayu. Untuk acara adat kelahiran masih menggunakan tradisi Jawa, namun dalam perkembangannya isi dari acara tersebut sudah mengalami perubahan atau pergeseran. Pelaksanaan adat dan tradisi biasanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang, terutama kondisi ekonomi.

## 2. Upacara Perkawinan

Masyarakat Jawa tidak membatasi anak-anak mereka untuk bergaul dengan siapa pun, termasuk dalam masalah pernikahan. Anak-anak boleh memilih siapa pun yang ingin dijadikan pasangan, dan dari suku mana pun. Setelah mereka menemukan jodoh, orang tua lah yang akan menikahkan mereka.

Dalam adat Jawa, umumnya urutan proses menuju perkawinan terbagi dalam lima tahap. Tahap pertama adalah perkenalan dengan keluarga kemudian melamar. Saat melamar biasanya juga membicarakan kelanjutan hubungan antara kedua belah pihak sekaligus mempersiapkan tanggal pernikahan.

Tahap kedua adalah meneguhkan hubungan yang lebih dalam lagi. Tahap ini terdiri dari tiga acara. *Pertama*, acara *srah-srahan* yang intinya menyerahkan barang-barang antaran sebagai lambang ikatan terhadap kedua calon pengantin. Barang-barang yang akan diserahkan berupa cincin emas, seperangkat pakaian wanita, buah-buahan, makanan tradisional, daun sirih, dan uang. *Kedua*, *peningset* yaitu dengan bertukar cincin emas antara kedua calon pengantin. *Ketiga*, *gedhok dino* yang artinya memantapkan kembali rencana tanggal pernikahan dan persiapan-persiapannya.



Tahap ketiga adalah tahap persiapan secara matang yang di dalamnya terdiri dari *sedahan* (menyusun siapa-siapa yang akan diundang), *kumbokarnan* (pertemuan antara keluarga, kerabat, dan tetangga yang akan membantu kelancaran pelaksanaan acara perkawinan), dan *jonggolan* (calon mempelai melapor ke KUA tempat diselenggarakannya acara sekaligus mengundang penghulu untuk hadir dalam acara ijab kabul).

Tahap keempat adalah rangkaian upacara dan acara untuk pernikahan. Pada tahap ini mulai dilakukan pasang *tarub* dan *tratag* (hiasan janur atau daun kelapa muda sebagai tanda akan ada pernikahan), kembar mayang (batang pisang, janur, nanas, daun kemuning, dan bambu dapur diletakkan di dalam bokor), pasang *tuwuhan* (terdiri dari janur, daun kluwih, daun beringin dan rantingnya, daun dadap serep, seuntai padi, cengkir gading, setandan pisang raja, tebu wulung, kembang dan padi, serta kembang setaman), *siraman* (mandi-mandi), *adol dawet* (jual dawet), dan *midodareni* (malam sebelum pernikahan).

Tahap kelima yang merupakan tahap terakhir dalam prosesi pernikahan adat Jawa adalah acara ijab kabul (sumpah pernikahan) dan acara *panggih* pengantin. *Panggih* adalah acara adat yang berisi *liron* kembar mayang (tukar-menukar kembar mayang), *gantel* (melempar sirih), *ngidak endhog* (menginjak telur), pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria, minum air degan (kelapa muda), dan dikepyok dengan bunga warna-warni. Setelah acara *panggih* selesai, pengantin melakukan timbangan (duduk dipangku oleh orang tua mempelai perempuan), *kacar-kucur*, dan *dulangan* (suap-suapan). Kemudian, proses terakhir adalah *sungkeman* yaitu memohon doa serta restu dari orang tua dan kaum tua-tua agar kehidupan mereka langgeng.<sup>99</sup> Itulah tahapan yang sebenarnya

---

<sup>99</sup> <http://masfikir.com/pernikahan-adat-jawa/>

dalam adat dan tradisi Jawa, namun masyarakat Jawa di Purwosari dalam perkembangannya tidak menjalankan prosesi adat tersebut secara lengkap, bahkan saat ini sudah mengalami perubahan karena dampak dari adanya integrasi dengan masyarakat Banjar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa langkah pertama keluarga pihak laki-laki adalah melamar pada pihak perempuan, sekaligus penetapan tanggal dan kesepakatan untuk melakukan prosesi perkawinan atau *beantar jujuran* (adat Banjar).<sup>100</sup> Pada umumnya masyarakat Purwosari melakukan perkawinan atau ijab kabul terlebih dahulu, baru kemudian melakukan prosesi adat dan resepsi perkawinan. Setelah mereka resmi menjadi suami istri, baru kemudian dilakukan adat *beantar jujur*.

*Beantar jujur* adalah prosesi di mana pihak keluarga laki-laki membawa saserahan, yang dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan ceramah yang dilakukan oleh ulama atau ustadz. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sambutan dari pihak perwakilan laki-laki untuk menyerahkan barang antaran yang kemudian diterima oleh pihak perwakilan perempuan. Dalam acara ini biasanya disertai dengan saling berbalas pantun. Setelah acara seserahan selesai, dilanjutkan dengan acara pengikat atau memasukkan cincin pada jari pengantin wanita lalu ditutup dengan doa dan makan bersama.

Prosesi selanjutnya adalah acara resepsi perkawinan dengan adat Jawa. Dalam prosesi *panggih*, pengantin laki-laki harus keluar terlebih dahulu dari rumah pengantin perempuan, kemudian rombongan pihak laki-laki berjalan menuju tempat resepsi dan di sana telah menunggu pengantin perempuan. Dengan iringan langgam Jawa Kebo Giro, pengantin laki-laki berjalan menuju

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ibu Dese pada Maret 2018.

tempat pengantin perempuan kemudian saling melempar sirih. Setelah itu, mereka berpegangan tangan berputar sebanyak tujuh kali dengan diikuti oleh dua dayang putra dan putri sambil diiringi shalawat. Setelah selesai, dilanjutkan pengantin pria menginjak telur yang sudah disiapkan, lalu pengantin perempuan akan mencuci kaki pengantin pria. Acara selanjutnya adalah *sungkeman* kepada kedua orang tua dan para sesepuh keluarga, diikuti acara *dulangan* atau suap-suapan yang terdiri dari nasi uduk, telur dadar, dan oseng-oseng tempe. Setelah makan, kedua mempelai minum air kendi dari para sesepuh (laki-laki tetua di Tamban). Terakhir, ada acara lempar pisang oleh mbok (mbah perempuan tertua di Tamban).<sup>101</sup>

Sebagai acara hiburan, masyarakat Tamban khususnya desa Purwosari menggelar jaranan atau campur sari, atau bisa juga organ tunggal. Jaranan adalah tontonan semacam kuda lumping, yang mempunyai keunikan memakan kaca karena kesurupan. Selain jaranan, musik campur sari juga menjadi kesukaan masyarakat Purwosari. Untuk generasi muda, biasanya memilih yang lebih modern yaitu lagu-lagu yang diiringi oleh organ tunggal.

Untuk pakaian pengantin bervariasi, ada yang masih mengenakan pakaian Jawa tradisional maupun modern, tergantung keinginan pengantin. Apalagi dengan semakin berkembangnya busana dengan desain-desain yang cantik dan modern, memberikan banyak pilihan kepada masyarakat khususnya generasi muda.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terjadi perubahan dalam pelaksanaan adat perkawinan, terutama tentang makna dan isi dari upacara tersebut. Misalnya, acara *beantar jujuran* adalah adat Banjar yang sebenarnya dalam adat Jawa adalah melamar. Namun, dalam *beantar jujuran*, nuansa Islami men-

<sup>101</sup> Wawancara dengan ibu Dese di Desa Purwosari pada Maret 2018.

dominasi upacara tersebut. Begitu juga dalam setiap prosesi adat, tampak percampuran nyata antara Banjar dan Jawa, baik dalam model pakaian, makanan, maupun hiburan. Kesenian dalam lakon ketoprak atau wayang lebih banyak menampilkan cerita-cerita yang berkaitan dengan Islam.

Hal lain yang terlihat jelas adalah perkawinan yang terjadi antara masyarakat Jawa trans dengan suku lain (Banjar dan Dayak). Kalau lelakinya Jawa maka dia akan mengikuti adat perempuan, tetapi kalau perempuannya Jawa maka biasanya menggunakan adat Jawa. Namun, hal ini tidak mengikat, tergantung keputusan kedua belah pihak. Terjadinya kawin silang ini menyebabkan kebudayaan Jawa tidak selamanya bisa bertahan, karena bergantung pada bagaimana mereka mengenalkan budaya Jawa kepada generasi penerusnya.

### 3. Adat Kematian

Ada beberapa adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat Jawa dalam upacara kematian. Dalam konsep masyarakat Jawa, kematian dianggap sebagai matinya jasad dan nafsu, peralihan antara alam dunia menuju alam gaib. Untuk itu, dalam tradisi Jawa dilaksanakan selamatan yang maknanya agar yang meninggal mendapat hakikat hidup yang sebenarnya.<sup>102</sup>

Terdapat beberapa adat tradisi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Jawa, yaitu *nelung dino* (tiga hari), *mitung dino* (tujuh hari), *matang puluh dino* (empat puluh hari), *nyatus dino* (seratus hari), *mendak sepisan* (setahun), dan *nyewu* (seribu hari). Kegiatan selamatan ini dahulu dilakukan oleh para tetua adat Jawa dan menggunakan sesajen untuk melengkapi upacara. Namun,

<sup>102</sup> www.kompasiana.com, diakses pada 20 November 2018.

dalam perkembangannya, masyarakat Jawa Purwosari telah meninggalkan hal-hal yang bersifat takhayul. Interaksi mereka dengan masyarakat Banjar memberikan mereka banyak masukan terutama masalah ilmu agama Islam. Saat ini upacara kematian sudah banyak mengadopsi dari masyarakat Banjar. Menurut hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa upacara kematian menggunakan tata cara Islam.<sup>103</sup> Setelah jasad dikuburkan maka pada malam harinya akan diselenggarakan pengajian selama tujuh hari. Dalam pengajian itu akan dilantunkan Surah Yassin, tahlilan, doa kubur, dan lain-lain yang intinya mendoakan agar yang meninggal mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Swt. dan diampuni segala dosa serta diterima segala amal ibadahnya.

Selanjutnya, malam keempat puluh hari kembali dilakukan pengajian dan tahlilan dengan mengundang tetangga dan kerabat. Kemudian, hari ke seratus akan diselenggarakan pengajian kembali dengan doa yang sama, dan akan diulang kembali pada saat yang meninggal sudah mencapai setahun. Makam yang sudah berumur setahun akan dikijing karena dianggap struktur tanahnya sudah padat.

---

Dengan dilaksanakannya pengajian dalam setiap memperingati kematian, menunjukkan bahwa makna dari upacara kematian semata-mata untuk mendoakan kepada yang meninggal agar memperoleh pengampunan dari Allah Swt., bukan untuk memberikan sesajen kepada roh-roh nenek moyang agar tidak mengganggu kepada yang masih hidup.

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Dese pada Maret 2018.



## C. Kesenian

Proses integrasi orang Jawa ke dalam masyarakat Kalimantan Selatan membawa sejumlah produk dalam kehidupan sosial. Selain beberapa bentuk fisik seperti gaya bangunan rumah atau pola busana, sejumlah produk budaya nonfisik juga tampak, seperti penggunaan bahasa dan dalam bidang kesenian. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki keinginan atau dorongan untuk mengadakan hubungan dengan dirinya sendiri. Sementara, sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan atau komunikasi dengan orang lain dan memiliki dorongan sosial. Dengan adanya keinginan tersebut, maka ia akan mencari orang lain sebagai temannya untuk berinteraksi.

Dalam berinteraksi, terjadi komunikasi dua arah dan dengan orang yang berbeda. Pada saat berinteraksi, ada dua syarat yang perlu dilakukan yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Demikian halnya dengan yang dialami oleh masyarakat Jawa yang tinggal di Purwosari. Semenjak kedatangannya di Purwosari, mereka melakukan interaksi dengan sesama mereka dan masyarakat baru yang mereka temui. Hubungan dua arah yang sifatnya ingin bertukar informasi dan memahami tentang adat istiadat di tempat yang baru mengharuskan mereka saling berinteraksi dan mempelajari nilai-nilai budaya setempat bahkan kebudayaannya. Beberapa karya seni yang merupakan pengaruh kebudayaan Jawa, seperti wayang gong, ludruk, dan jaran kepong atau kuda lumping, tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.



## 1. Wayang Gong

Salah satu khazanah seni yang muncul sebagai akibat pengaruh nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan adalah wayang gong. Istilah wayang gong sendiri bukan merupakan monopoli bentuk kesenian serupa di Kalimantan Selatan, namun juga ditemukan di tempat lain yakni di Bali. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada fakta bahwa di Bali, pementasan wayang gong dilakukan dengan menggunakan khazanah (*repertoire*) boneka wayang Bali yang masih berorientasi pada kisah epos Mahabarata dan Ramayana yang diambil dari kitab Hindu. Sementara itu, wayang gong di Banjar lebih banyak berorientasi pada jenis pementasan wayang Jawa, yang meskipun berasal dari epos Mahabarata dan Ramayana namun bersumber pada kitab-kitab yang sudah digubah di Jawa.

Persamaan dari kedua tipe wayang gong ini adalah perangkat iringannya yang merupakan peralatan musik gamelan dengan gong yang mendominasi. Gong merupakan unsur dalam instrumen musik Jawa (gamelan) yang berfungsi sebagai pengisi nada bas, sebagai penutup atau penjeda dari lantunan musik. Penggunaan gong yang semakin sering dalam suatu untaian nada akan menandai lambat atau cepatnya intonasi yang berpengaruh pada unsur dinamika suaranya dan nuansa yang diiringi oleh gamelan itu.

Di Kalimantan Selatan sendiri, keberadaan wayang gong ini merupakan salah satu unsur dari pengaruh dan transfer nilai budaya Jawa, karena di antara yang lain terdapat unsur-unsur seni budaya Jawa yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat, seperti kuda kepeng, mamanda, dan teater tantayungan. Wayang gong yang dimainkan oleh para penari juga menggunakan perangkat musik gamelan yang sama seperti di Jawa, namun dalam jumlah yang

lebih sedikit dan terbatas. Para penarinya juga memainkan tarian khas Jawa dengan khazanah tari yang sederhana dan lebih banyak dipentaskan oleh kalangan rakyat.<sup>104</sup>

Dalam pementasannya, wayang gong memiliki tiga unsur pelaku kesenian, yaitu dalang, pemain tari, dan penabuh gamelan. Dengan kata lain, pentas ini mirip wayang orang di Jawa tetapi dalam bentuk lebih terbatas dan lebih sederhana. Mereka yang menjadi pemain juga memakai hiasan dan busana yang menunjukkan identitas dengan tokoh yang dimainkannya seperti pada wayang orang Jawa, meskipun tidak semewah dan serumit wayang orang Jawa. Namun, yang menarik dalam wayang gong ini adalah beberapa orang pemainnya memakai topeng, sehingga menunjukkan identifikasi dengan jenis wayang orang di Jawa Timur yang lebih dikenal sebagai wayang topeng.

Dalang juga tampil sebagai sutradara sekaligus pengarah pertunjukan. Ia duduk di kalangan para pemain gamelan, kemudian menggunakan alat pemukul. Selain mengarahkan laju instrumen musik, ia juga mengarahkan para pemain wayang yang menarik di panggung sesuai skenario cerita yang dipentaskannya. Kadang-kadang dalang ini juga menjadi pemimpin rombongan wayang gong selain sebagai sutradaranya. Ia juga yang menjadi perwakilan rombongan wayang gong untuk bernegosiasi dengan mereka yang ingin memanggil bagi pementasannya (menanggap). Dalang menguasai khazanah cerita yang akan dipentaskan, dan umumnya dalang wayang gong sekaligus menjadi dalang wayang kulit Jawa.<sup>105</sup>

Di Kalimantan Selatan sendiri, unsur-unsur budaya wayang ini telah masuk ketika Kesultanan Banjar masih berkuasa. Di Istana

---

<sup>104</sup> Depdikbud, *Aneka Ragam Khazanah Budaya Nusantara*, Vol. 5 (Jakarta: Depdikbud, 1991), hlm. 210.

<sup>105</sup> Ninuk Kleden Purbonegoro, *Puralitas Makna Seni Pertunjukan dan Representasi Identitas* (Jakarta: LIPI, 2004), hlm. 83.

Banjar, terdapat koleksi sejumlah topeng yang digunakan sebagai pementasan wayang orang bertopeng. Dari bentuk topengnya, tampak jelas pengaruh budaya Jawa dengan adanya kemiripan pada model topeng yang dikenakan untuk pentas wayang topeng di Jawa yang mengambil cerita dari khazanah kesusastraan Hindu, seperti cerita Panji. Pementasannya di Istana Banjar juga dilakukan dengan tarian yang mirip Jawa dan diiringi oleh gamelan Jawa juga. Ketika Islam mulai memasuki kehidupan sosial dan fisiologis di Istana Banjar, pentas kesenian wayang topeng dan wayang orang (wayang gong) tetap tidak tersentuh dan menjadi khazanah seni tari Istana Banjar.<sup>106</sup>

Dalam pentas tari wayang bertopeng ini, perbedaan terletak pada instrumen pengiring dengan wayang orang di Jawa. Di Jawa, kendang merupakan unsur instrumen terpenting sebagai pengiring pementasan tarian wayang, sedangkan di Kalimantan Selatan dan Bali, gong menjadi unsur yang dominan. Gong sebagai bentuk cabang Jawa tradisional merupakan pertanda pengatur irama dan tempo lantunan gamelan. Terutama dalam hal ini, gong terbesar (*gong gede*) menjadi pilar utama dari lantunan musik gamelan yang digunakan untuk mengiringi pementasan wayang gong.<sup>107</sup>

Dalam khazanah musik Jawa, keberadaan gong besar ini tidak hanya memiliki nilai artistik melainkan juga nilai filosofis. Sebagai bentuk perangkat terbesar dalam musik gamelan, gong besar dianggap menjadi roh dari seluruh instrumen musik dan dipercaya bisa mengarahkan lantunan iramanya. Oleh orang Jawa tradisional, status itu dikaitkan dengan posisi spiritualnya yang dianggap berwibawa dan memiliki tuah, sehingga sering diklasifikasikan sebagai

<sup>106</sup> Hamzuri, *Warisan Tradisional Itu Indah dan Unik* (Jakarta: Depdikbud, 2000), hlm. 513.

<sup>107</sup> Victoria M. Clara van Groenendael, *Wayang Theatre in Indonesia; An Annotated Bibliography* (London: Foris Publication, 1987), hlm. 57.

benda pusaka. Dari situ, orang Jawa sering memberi nama atau sebutan bagi gong besar dengan tambahan *kiai* yang berarti sosok yang dihormati. Kadang-kadang, kepercayaan orang terhadap kemampuan, kesaksian, dan kewibawaan gong besar ini berlebihan, sehingga dianggap juga sebagai pusaka sakti yang membawa pengaruh baik atau buruk pada kehidupan manusia di sekitarnya.<sup>108</sup>

Di Kalimantan Selatan, pola seperti yang terjadi di atas juga bisa diketahui. Meskipun pengaruh Islam yang masif merasuki jauh lebih kuat dan lebih mendalam di kalangan kehidupan Keraton Banjar, posisi wayang gong dan perangkat gamelan yang dianggap sebagai aset khazanah dan pusaka kerajaan juga hampir sama seperti di keraton Jawa. Meskipun seni yang terpengaruh oleh Islam mulai merasuki kehidupan istana seperti musik gambus, keberadaan gamelan dan seni wayang tetap tidak tergeser. Beberapa unsur musik lokal yang mirip dengan unsur gong seperti *mebang* atau *tawak* juga tetap berperan dalam pementasan seni tari di istana.<sup>109</sup>

Di luar istana, bagi masyarakat tradisional Kalimantan Selatan dan khususnya suku Dayak, peran dan keberadaan alat musik gong telah ada sejak lama. Diduga mungkin alat musik itu berasal dari pengaruh budaya Cina yang memiliki sebuah alat musik mirip gong (canang) dan mengeluarkan suara bergema panjang. Bagi masyarakat Dayak yang mengenal dan mengakui gong ini sebagai bagian dari khazanah musik mereka, ada istilah yang menggunakan gong untuk menjadi ukuran luas (sejauh gema suara gong, lahan

---

<sup>108</sup> Bukti bahwa penghormatan manusia terhadap gong besar yang dianggap bertuah adalah adanya sesaji atau perawatan khusus, seperti memandikan pada hari atau bulan tertentu dengan air bunga dan sebagainya. Juga ada kisah-kisah yang terkait dengan keberadaan gong dikaitkan pada peristiwa metafisik atau gaib. Misalnya, pernah ada seorang Sunan Solo yang memindahkan gong pusaka dari keraton ke tempat lain yang merupakan pesanggrahan raja, kemudian semua harimau di Kediri datang ke Solo untuk mengejar gong itu. Jaap Kunst, *Music in Java: Its History, Its Theory and Its Technique*, Vol. 1 ('s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1949), hlm. 152.

<sup>109</sup> Don Michel Randell, *The Harvard Dictionary of Music* (Cambridge: Harvard University Press, 2003), hlm 829.

itu menjadi milik kami). Ini membuktikan bahwa alat musik gong memiliki peranan penting dalam kepercayaan dan kehidupan sosial masyarakat.<sup>110</sup>

Setelah Kesultanan Banjarmasin dihapuskan dan pemerintahan langsung dilaksanakan oleh rezim kolonial, kesenian wayang diizinkan menyebar di kalangan masyarakat luas. Bahkan, pemerintah sendiri yang mengetahui bahwa jenis kesenian ini memiliki banyak animo yang menggemarnya. Bentuk kesenian wayang ini sering dimanfaatkan untuk kepentingan estetika publik dalam rangka perayaan khusus yang bersifat massal. Sebagai contohnya, ketika pemerintah menggelar perayaan umum (*regeeringsjubileum*) di Banjarmasin pada awal September 1937, di antara pertunjukan lain, wayang gong digelar di alun-alun kota Banjarmasin atas biaya pemerintah daerah dan dinikmati sebagai tontonan publik.<sup>111</sup>

Dalam acara besar-besaran yang digelar untuk merayakan perkawinan Putri Yuliana dan Pangeran Bernard itu, juga ditampilkan pertunjukan wayang orang dan wayang kulit. Dalam peragaan busananya, para pemain wayang gong yang tampil mengenakan model kain batik Jawa tradisional klasik. Motif batik ini kemudian mengilhami penduduk Banjarmasin dan sekitarnya untuk membuat pola serupa pada kain ikat mereka. Dengan demikian, banyak orang Dayak yang kemudian membuat kain dari bahan kulit kayu namun dengan motif batik Jawa klasik tradisional.<sup>112</sup>

Bagi masyarakat Jawa yang bermukim di Banjarmasin sebagai bagian dari program kolonisasi, pengembangan wayang gong ini

---

<sup>110</sup> Jacqueline Pugh-Kittingan, "An Overview of Cultural Research" dalam Victor T. King, Zawawi Ibrahim, & Noor Hasharina Hassan, *Borneo Studies in History, Society, and Culture* (Singapore: Springer Science, 2017), hlm. 252.

<sup>111</sup> "De Viering te Bandjarmasin" dalam *De Indische Courant*, edisi 28 Juli 1938, lembar pertama.

<sup>112</sup> "Wajangpoppen en Plastiek" dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, edisi 27 Agustus 1938, lembar kedua.



lebih mudah dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka yang datang pada akhir tahun 1930-an dalam program kolonisasi pemerintah Belanda, terdapat beberapa orang yang sebelumnya di Jawa terlibat aktif dalam pementasan wayang. Begitu juga setelah beberapa tahun mereka tinggal dan berhasil memantapkan posisi ekonomi mereka sebagai pemukim permanen yang sejahtera, beberapa dari mereka membiayai pengangkutan gamelan dan wayang kulit dari Jawa untuk digunakan bagi sarana pementasan di daerah kolonisasi mereka. Ini terutama terjadi di daerah kolonisasi Purwosari, Serapat, dan diikuti oleh kaum kolonis di kampung Madurejo, Pengaron.<sup>113</sup>

Fenomena menarik yang muncul dalam hal ini adalah pementasan wayang oleh kaum kolonis Jawa ini tidak hanya terbatas diikuti atau dinikmati oleh orang Jawa saja. Banyak penduduk asli setempat, termasuk orang Banjar dan orang Dayak, yang juga mengikuti pertunjukan itu dan mereka berbaur dengan orang-orang Jawa. Hal ini disebabkan dalam hal pertanian, mereka telah terbiasa bekerja sama dan mengikuti serta mempelajari metode pertanian dan bercocok tanam yang dianut oleh orang Jawa petani kolonis. Akibatnya, interaksi dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya dalam sektor ekonomi membuka jalan bagi alih nilai estetika budaya dan dalam hal ini wayang.<sup>114</sup>

Di kampung Tulungrejo, yang berada di sebelah barat daya Banjarmasin, tempat tiga ratus keluarga kolonis bermukim pada awal tahun 1939, dinamika kehidupan sosial budaya yang heterogen sangat jelas terlihat. Dengan ditopang oleh keberhasilan percobaan pertanian mereka selama setahun tinggal di sana, kehidupan sosial

<sup>113</sup> "De Kolonisatie in 1940" dalam *De Sumatra Post*, edisi 15 Juli 1941, lembar kedua.

<sup>114</sup> "Moerastrijtbouw Voor Javaansche Tani's" dalam *De Indische Courant*, edisi 3 April 1939, lembar kedua.



budaya dan kesenian segera marak terlihat.<sup>115</sup> Sejumlah warga terlibat aktif dalam pementasan kesenian rakyat termasuk wayang Jawa, yang kemudian diikuti oleh penduduk setempat sebagai wayang gong.

Salah satu pesona yang muncul dari pertunjukan ini bukan hanya terbatas pada tari-tarian yang diiringi dengan musik gamelan, namun juga penampilan para penarinya yang memakai topeng. Budaya topeng yang digunakan sebagai pelengkap tarian ini menunjukkan pesona dan pengaruh khusus bagi penduduk setempat. Orang-orang Dayak yang sebelumnya telah mengenal topeng sebagai unsur estetika dalam budaya dan tradisi mereka, melihat topeng Jawa berbeda dan menarik sehingga mereka kemudian menerimanya sebagai bagian dari budaya mereka. Sementara itu, orang Jawa sendiri juga menghormati topeng mereka tidak hanya sebagai pelengkap pementasan tarian wayang orang, melainkan juga sebagai bentuk produk estetika bahkan sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual atau setidaknya pada status kebangsawanan dalam stratifikasi sosialnya.<sup>116</sup>

---

Dengan memodifikasi topeng Jawa, orang Dayak kemudian membuat topeng dengan versi mereka sendiri. Umumnya mereka membuat topeng dari kayu berwarna kuning muda. Di bagian dalamnya, mereka memasah dengan kasar sementara di luarnya hanya sedikit ada tonjolan dibandingkan topeng Jawa yang penuh ukiran rumit. Hidungnya dibuat kecil, sementara bola matanya hitam dan di sekitarnya diberi warna kecokelatan. Mulutnya dibiarkan terbuka dan diberi warna abu-abu, sementara giginya umumnya diberi warna hitam sesuai dengan kebiasaan mereka menghitamkan gigi dengan sejenis getah di dalam hutan. Mereka membuat topeng

---

<sup>115</sup> "Javanen Kolonisatie" dalam *Het Nieuws van den Dag Voor Nederlandsch Indie*, edisi 25 Mei 1939, lembar kedua.

<sup>116</sup> "Een Javaan Danst" dalam *Hollandsche Revue*, Thn. 1937, Vol. 37, No. 1, hlm. 162.

ini dengan meniru topeng Jawa yang dikenakan oleh para pemain wayang orang saat pementasannya.<sup>117</sup>

Bisa diduga bahwa bentuk pementasan wayang gong atau wayang topeng yang beredar di Kalimantan Selatan ini berasal dari Jawa Tengah, bukan dari Cirebon atau Banyuwangi. Setidaknya daerah ekspor kesenian wayang orang ke Kalimantan Selatan ini adalah Jawa Tengah atau Jawa Timur bagian barat hingga batas Malang yang dikenal dengan wayang topeng Malang. Hal ini bisa diketahui dari khazanah cerita yang dipentaskan yaitu dari sumber cerita Panji atau epos Hindu sebelum Islam yang diduga beredar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu, wayang topeng Jawa Barat dan Cirebon cenderung mementaskan cerita Mahabarata dan Ramayana.<sup>118</sup>

Di kalangan masyarakat Jawa dan penduduk asli Kalimantan Selatan kini, penyebaran bentuk wayang orang ini semakin marak. Bahkan, di sejumlah kampung yang dihuni oleh kaum kolonis Jawa, kelompok penari khusus dibentuk yang juga melibatkan beberapa penduduk asli. Atas koordinasi dan di bawah asuhan dinas pemerintah dewasa ini, kelompok ini sering terlibat dan berpartisipasi dalam pertandingan ketika diadakan festival pementasan wayang gong atau wayang topeng dengan memperebutkan piala atau hadiah dari pemerintah daerah. Ini menandai bahwa inkulturasi budaya Jawa ke dalam nilai-nilai budaya lokal bisa berlangsung dengan baik dan mendapatkan respons positif dari penduduk setempat.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> H.H. Juinboll, *Catalogues van 's Rijks Etnographische Museum, Tweede Deel; Borneo* (Leiden: Brill, 1910), hlm. 337.

<sup>118</sup> Clara Brakel Papenhuyzen, *Classical Javanese Dance; The Surakarta Tradition and Its Terminology* (Leiden: KITLV Press, 1995), hlm. 40.

<sup>119</sup> M. Heppel, *Masks of Kalimantan* (Canberra: Indonesian Art Society, 1992), hlm. 33.

## 2. Ludruk dan Ketoprak

Selain wayang gong, masyarakat Jawa di Kalimantan Selatan dan masyarakat yang tinggal di Desa Purwosari juga mengenal kesenian ludruk, sebuah drama tradisional dari Jawa yang isi ceritanya tentang kisah perjuangan ataupun cerita kehidupan sehari-hari. Kesenian ini biasanya dilaksanakan pada malam hari sebagai hiburan masyarakat desa. Selain itu, ada juga ketoprak atau sandiwara tradisional masyarakat Jawa yang biasanya mengisahkan cerita-cerita lama. Kedua kesenian ini, baik ludruk maupun ketoprak, dalam pertunjukannya diiringi dengan gamelan sebagai musik.

Dalam aksi kesenian ini, proses integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik, apalagi jika identitas komunitas dapat terbentuk tanpa adanya keterikatan daerah, kesamaan suku, kekerabatan, tempat tinggal, bahasa, dan adat istiadat. Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang selalu memelihara serta melestarikan budaya dan keseniannya. Dalam menjalankan keseniannya, masyarakat Jawa yang tinggal di Purwosari selalu menampilkan dengan iringan musik Jawa yang biasa disuguhkan saat hajatan keluarga, seperti acara menyambut pesta atau sesudah pesta. Cerita yang ditampilkan biasanya berisikan tentang kehebatan dan keberanian seseorang. Pada awalnya hiburan ini hanya ditonton oleh masyarakat Jawa, tetapi setelah isi cerita diperkaya dengan situasi atau keadaan yang berlaku di tempat mereka tinggal, penontonnya bukan hanya masyarakat Jawa tetapi masyarakat Banjar yang tinggal di sana.

## 3. Jaran Kepang (Kuda Lumping)

Kesenian pertunjukan kuda lumping atau jaran kepang merupakan salah satu kesenian yang sudah mereka kenal sebelum mereka

bertransmigrasi ke wilayah Kalimantan Selatan. Dalam memelihara dan melestarikan budaya, pertunjukan kuda lumping tetap mereka tampilkan di lingkungan mereka tinggal, seperti di Purworeja yang masyarakatnya juga sebagian terdiri dari masyarakat Banjar.

Kesenian kuda lumping ini biasa ditampilkan dalam acara keramaian desa atau peringatan tujuh belasan. Saat diselenggarakannya hiburan rakyat ini, semua warga berkumpul bersama di sebuah tanah lapang untuk menyaksikan acara yang akan disuguhkan oleh panitia. Jumlah penonton tidak dibatasi dan hampir semua masyarakat yang tinggal di Desa Purwosari, baik suku Banjar, Jawa, maupun yang lainnya. Pertunjukan ini dapat ditonton oleh semua usia, namun untuk anak yang masih kecil perlu pengawasan dari orang tua karena dalam atraksi jaran kepang terdapat pertunjukan gaib, di mana si pemain menunjukkan atraksinya dengan memakan kaca bahkan menari-nari di atas pecahan kaca. Hingga saat ini kesenian kuda lumping masih tetap dipelihara dan dilaksanakan jika ada keluarga masyarakat Jawa yang ingin mengadakan hajatan untuk selamatan anaknya. Dalam pertunjukannya, kesenian ini memerlukan biaya yang besar karena terkadang harus mendatangkan pemainnya dan musik pengiring dari Pulau Jawa.

Namun, semenjak adanya pemasangan jaringan listrik di desa tersebut, mereka telah diperkenalkan dengan teknologi baru. Mereka mulai membeli televisi, dan dari media ini mereka dapat melihat tampilan berbagai acara hiburan daerah maupun berita nasional, dan penyelenggaraan pertunjukan kesenian tradisional pun menjadi berkurang. Melalui televisi dan tampilan gambar yang jelas, mereka tidak perlu pergi keluar rumah. Menikmati hiburan sambil menikmati makanan dapat dilakukan di rumah. Adanya kemajuan teknologi ini membawa perubahan yang berpengaruh

terhadap bidang kesenian tradisional yang lambat laun mungkin akan punah. Jika ada upacara desa atau acara-acara keluarga, untuk mengisi hiburan, mereka beralih dengan mengundang orkes band dan penyanyi yang berasal dari luar.

## D. Kuliner

Kuliner artinya sesuatu hasil olahan yang berupa masakan lauk-pauk yang dapat menjadi panganan ataupun minuman. Kuliner erat kaitannya dengan konsumsi sehari-hari, karena kuliner selalu berhubungan dengan cara masak-memasak. Istilah kuliner ini merupakan istilah yang baru semenjak adanya acara di televisi yang menampilkan berbagai ragam masakan daerah. Istilah kuliner tidak terlepas dengan dapur dan penggunaan bumbu yang disajikan dalam hidangannya. Adanya kuliner ini bertujuan untuk mengenalkan bahwa sejak dahulu, setiap masyarakat mempunyai jenis kuliner sendiri yang kemudian berkembang sehingga bisa dinikmati oleh semua orang di seluruh nusantara.

Demikian halnya dengan masyarakat Jawa yang tinggal di Purwosari, meskipun telah lama berbaur dengan masyarakat Banjar, mereka masih tetap menyajikan makanan khas Jawa. Makanan tersebut disajikan saat menghidangkan santapan sehari-hari ataupun acara-acara keluarga. Mengenai jenis makanan, antara orang Jawa dan orang Banjar tidak masalah, karena dalam pengolahannya terbuat dari jenis bahan yang sudah saling dikenal. Bahannya mudah dicari dan pengolahannya tidak sulit. Untuk sajian makanan di daerah ini biasa disuguhkan pada acara-acara selamatan, pernikahan, dan perayaan-perayaan di desa.

Masyarakat Desa Purwosari mengenal tanaman kelapa. Tanaman kelapa tersebut tumbuh di sekitar lahan pekarangan



ataupun di batas lahan persawahan. Tanaman kelapa banyak memberikan manfaat bagi penduduk, mulai dari batang, daun, buah, hingga kulit, semua dapat dipergunakan. Buah kelapa yang sudah diparut dan diperas airnya (santan kelapa) biasa dipakai untuk memasak masakan yang berkuah. Makanan ini sama-sama dapat dinikmati orang masyarakat Jawa dan Banjar, misalnya opor ayam, nasi gurih, nasi kuning, sayur lodeh, urap, rempeyek, dan makanan jenis lainnya. Demikian juga dengan ketupat yang dibungkus dengan daun kelapa merupakan makanan yang selalu disuguhkan pada saat lebaran, baik bagi masyarakat Jawa maupun Banjar.

Seiring dengan perkembangannya, berbagai hasil pertanian seperti ubi, jagung, dan pisang, bisa diolah menjadi makanan yang dijadikan sebagai camilan. Ada keripik ubi, kembang goyang, keripik pisang, rempeyek, dan lain sebagainya. Saat ini, jenis makanan ini sudah dijual di warung-warung sekitar kampung Jawa, bahkan yang membuatnya bukan hanya orang Jawa tetapi juga orang Banjar. Transfer ilmu dalam mengolah bahan baku telah terjadi pada mereka.



Gambar 5. Keripik Hasil Olahan Masyarakat Desa Purwosari



Mengenai makanan, orang Jawa juga menikmati apa pun yang disuguhkan oleh masyarakat Banjar. Hanya terdapat sedikit perbedaan dalam beberapa hal. Misalnya dalam penggunaan santan, orang Banjar lebih menyukai santan yang kental dibandingkan orang Jawa, dan ini dapat dirasakan pada jenis makanan opor ayam serta nasi gurih.

Demikian halnya dalam pengolahan ikan. Mengenai pengolahan ikan, orang Jawa sekarang sudah mengetahui cara mengolah ikan, misalnya ikan gabus (aruan) yang banyak hidup di air berawa. Kalau dahulu mereka memasaknya cukup dengan menggoreng, setelah berbaur dengan orang Banjar, mereka sudah bisa mengolahnya dengan menggunakan bumbu masak kuning ataupun dibakar. Yang membedakan, kalau orang Banjar jarang memotong-motong ikan gabus, sementara orang Jawa memasak ikan gabus dengan memotong-motong.

Kekayaan masakan tradisional yang dimiliki oleh kedua suku bangsa ini menjadi pemersatu di antara mereka dan terkadang mereka saling belajar bersama untuk menciptakan masakan yang dapat disajikan pada acara-acara di desa.

---

## Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

## *Bab 0* *Penutup*

### **A. Kesimpulan**

Kebijakan politik etis dari pemerintah Belanda terdiri dari tiga pilar, yaitu transmigrasi (kolonisasi), edukasi, dan irigasi. Tujuan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis dipengaruhi oleh kaum humanis di negaranya, sehingga pemerintah Belanda berkeinginan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi daerah jajahannya. Namun dalam kenyataannya, politik etis yang dijalankan berbau politik yaitu pasifikasi atau penaklukan wilayah di luar Jawa pada abad XX.

Pengiriman penduduk Jawa ke Kalimantan Selatan pada awalnya dilakukan untuk tujuan menjadi kuli kontrak guna mengolah tambang dan penanaman tanaman ekspor, seperti kopi, tembakau, dan nila. Beberapa kali transmigrasi itu dilakukan, pada kenyataannya banyak mengalami kegagalan karena perekrutan

penduduk tidak dilakukan secara profesional, kondisi lokasi sebagai penempatan transmigrasi belum siap terutama masalah sanitasi, medan hutan yang terlalu berat bagi penduduk Jawa, serta masalah keamanan dan kesehatan.

Program kolonisasi ini kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia dengan kebijakan transmigrasi di seluruh wilayah Indonesia yang belum merata penduduknya. Pemerintah Indonesia bertujuan untuk memindahkan penduduk yang padat ke wilayah yang masih jarang penduduknya, dengan harapan agar penduduk dapat meningkatkan taraf hidupnya di tempat mereka yang baru. Namun, tidak semua program transmigrasi dapat berjalan dengan baik karena faktor perekrutan dan perencanaan yang kurang tepat.

Dalam pengiriman koloni ke daerah Tamban khususnya desa Purwosari, tampaknya memang dilakukan Belanda untuk perluasan lahan guna penanaman padi. Hal ini terlihat dari pemilihan lokasi koloni yang mempunyai struktur tanah sesuai untuk penanaman padi sistem pasang surut. Ditambah lagi dengan adanya aliran sungai di Tamban yang merupakan transportasi utama dijadikan Terusan Anjir, dan hal ini membuat perkembangan Desa Purwosari tidak dapat dihindari.

Perkembangan secara fisik Desa Purwosari terlihat dari pemekaran wilayah Desa Purwosari menjadi tiga dusun, yaitu dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Pemekaran wilayah ini merupakan bukti bahwa penduduk Desa Purwosari mengalami banyak peningkatan. Bukan saja dalam kuantitas tetapi juga kualitas, di mana keanekaragaman etnis juga ikut mewarnai penduduk di Purwosari. Hal ini terlihat dari daerah perkampungan yang tidak menunjukkan ciri-ciri masyarakat Jawa, tetapi lebih cenderung menunjukkan perkampungan pada umumnya masyarakat Melayu Banjar.

Perkembangan dan perubahan terjadi karena adanya interaksi antara masyarakat transmigrasi dengan masyarakat lokal, khususnya Banjar. Hubungan interaksi secara kontinu akan menghasilkan akulturasi dan asimilasi, yang pada akhirnya akan terintegrasi satu sama lain dan memunculkan *mix culture*. Hal ini terjadi di Desa Purwosari yang merupakan daerah penempatan masyarakat trans dari Jawa Timur. Dengan berbagai latar belakang mata pencaharian, mereka dipaksa untuk menjadi petani. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak siap untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bagi yang tidak mampu beradaptasi, mereka meninggalkan lokasi transmigrasi.

Perubahan juga terjadi dalam bidang budaya terutama pada kelahiran, perkawinan, dan kematian. Adat istiadat tetap dalam wadah Jawa, tetapi isinya telah bercampur dengan budaya Banjar, terutama nilai-nilai budaya Islam. Maka, dalam perkembangannya sekarang, yang terlihat adalah budaya *mix culture*, bukan lagi budaya Jawa atau Banjar.

Dalam bidang ekonomi, perubahan terjadi bukan hanya dalam hal kepemilikan lahan, pekarangan, dan rumah saja, tetapi juga terlihat dari sistem pertanian penduduk trans yang mengadopsi sistem pertanian pasang surut karena lahan yang harus dikerjakan adalah lahan gambut.

Dalam bidang sosial budaya, perubahan terlihat dari interaksi antara penduduk trans dengan masyarakat setempat, yaitu Banjar dan Dayak. Hubungan tolong-menolong dan bergotong-royong saling membantu dalam membuat rumah atau fasilitas umum menjadi perekat hubungan di antara mereka. Dalam bidang budaya atau adat istiadat, perubahan terlihat dari adat kelahiran, perkawinan, dan kematian yang tidak lagi cenderung ke adat Jawa asli, tetapi sudah bernuansa budaya Islam. Begitu juga dengan kesenian wayang,

ludruk, dan ketoprak sudah dinikmati pula oleh masyarakat Banjar dan Dayak, serta sudah mengangkat cerita tentang budaya Islam.

Di bidang kesenian juga tampak terjadi perubahan, terutama dengan masuknya unsur-unsur budaya Islam dalam cerita yang ditampilkan. Namun sayang, perkembangan kesenian Jawa di daerah Purwosari mengalami kemunduran, baik dalam kendala regenerasi yang tidak dilakukan secara profesional maupun pendanaan yang hanya pada swadaya masyarakat.

## **B. Saran**

1. Pemerintah daerah bisa lebih mengembangkan lagi daerah-daerah trans yang masih belum lengkap sarana dan prasarananya.
2. Pemerintah daerah bisa lebih aktif untuk menulis sejarah transmigrasi yang masih belum diteliti, karena bermanfaat untuk kepentingan kebijakan dan akademis.

---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**





## Daftar Pustaka

- Ambary, Hasan Muarif. 1993. *Menemukan Peradaban; Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Anonim. *Profil Desa Purwosari Tahun 2014*. Tnpa Kota: Tanpa Penerbit.
- 
- Boudewijn, Petra. 2016. *Warm Bloed; De Representatie van Indo-Europeanen in de Indische Nederlandse Letterkunde 1860-heden*. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
- Brakel Papenhuyzen, Clara. 1995. *Classical Javanese Dance; The Surakarta Tradition and Its Terminology*. Leiden: KITLV Press.
- Broersma, Roelof. 1927. *Handel en Bedrijf in Zuid en Oost Borneo*. 's Gravenhage: G. Naeff.
- Brown, R.A. 1994. *Capital and Entrepreneurship in South East Asia*. Hampshire: MacMillan Press.
- Cense, Anton Abraham. 1928. *De Kroniek van Bandjarmasin*. Santpoort: C.A. Mees.

- Crawfurd, John. 1820. *History of the Indian Archipelago*. Vol. 1. London: Georg Ramsay.
- Creutzberg, P. 1975. *Indonesia's Export Crops 1816-1940*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Depdikbud. 1985. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. 1991. *Aneka Ragam Khazanah Budaya Nusantara*. Vol. 5. Jakarta: Depdikbud.
- Gin, Ooi Keat & Hoang Ahn Tuan. 2016. *Early Modern Southeast Asia, 1350-1800*. New York: Routledge.
- Graaff, H.J. de. 1970. *Islamic States in Java, 1500-1700*. Leiden: B.V. Springer.
- Heesterman, J.C. 1989. *India and Indonesia; General Perspectives*. Leiden: E.J. Brill.
- Hall, Kenneth B. 2008. *Secondary Cities and Urban Networking in the Indian Ocean Realm, 1400-1800*. Lanham: Rowman and Littlefield Production.
- Hudson, Alfred B. 1972. *Padju Epat; The Ma'anyan of Indonesian Borneo*. New York: Irvington Publishers.
- Juinboll, H.H. 1910. *Catalogues van 's Rijks Etnographische Museum*. Tweede Deel. Leiden: Brill.
- Randell, Don Michel. 2003. *The Harvard Dictionary of Music*. Cambridge: Harvard University Press.
- Swasono, Edi dan Masri Singarimbun (ed). Tanpa Tahun. *Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Hamzuri. 2000. *Warisan Tradisional Itu Indah dan Unik*. Jakarta: Depdikbud.
- Heppel, M. 1992. *Masks of Kalimantan*. Canberra: Indonesian Art Society.

- Knapen, Han. 2001. *Forest of Fortune? The Environmental History of Southeast Borneo; 1600–1880*. Leiden: KITLV Press.
- Kratoska, Paul H. 2001. *South East Asia, Colonial History; Imperialism before 1800*. London: Routledge.
- Kuitenbrouwer, Maarten en Marij Leenders. 2000. *Geschiedenis van de Menschenrechten: Bouwsteenen Voor een Inter Disciplinaire Benadering*. Hilversum: Verloren.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kementerian Desa dan Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Masa Doeloe, Kini, dan Harapan ke Depan*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Lapidus, Ira M. 2014. *A History of Islamic societies*. New York: Cambridge University Press.
- Leur, J.C. van . 1967. *Indonesian Trade and Society; Essays in Asian Society and Economic History*. The Hague: W. Van Hoeve Publisher.
- Lewang, Patrice. 2003. *Ayo ke Tanah Seberang; Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Lloyd, Christopher 1989. *The Structures of History*. Oxford: Blacwell.
- Mayasari, Latifah. 2008. *Dinamika Sosial Transmigrasi di Purwosari Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala 1937–1965*. (Skripsi). Tidak Diterbitkan. FKIP Universitas Lampung: Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Miedema, Jelle. 1986. *Pre-capitalism and Cosmology; Description and Analysis of the Meybrat Fishery and Kain Timur Complex*. Leiden: Brill Academy.
- Miller, Terry E. & Sean Williams. 2008. *The Garland Handbook of Southeast Asian Music*. New York: Roulledge.

- Munoz, Paul Michel. 2006. *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malays Peninsula*. Bentley: Continental Sales Inc.
- Nas, P.J.M. 2002. *The Indonesian Town Revisited*. Munster: Lit Verlag.
- Perelaer, Michael Th. Hurbert. 1883. *Borneo van Zuid naar Noord, Tweede Deel*. Amsterdam: Elsevier.
- Pugh-Kittingan, Jacquelline. 2017. "An Overview of Cultural Research" dalam King, Victor T., Zawawi Ibrahim, & Noor Hasharina Hassan. *Borneo Studies in History, Society, and Culture*. Singapore: Springer Science.
- Purbonegoro, Ninuk Kleden. 2004. *Pluralitas Makna Seni Pertunjukan dan Representasi Identitas*. Jakarta: LIPI.
- Purnomo. 2014. *Kerja Sama (Resiprositas) Masyarakat Transmigrasi dengan Masyarakat Setempat di Desa Aur Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut*. (Tesis). Tidak Diterbitkan. Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lambung Mangkurat: Banjarmasin.
- Schklissinger, Joachim. 2015. *Origin of Man in Southeast Asia Part 2; Hindu Temples in the Malay Peninsula and Archipelago*. Phnom Penh: Kindle Store.
- Viller, John. 1985. *East of Malacca; Three Essays on the Portuguese in the Indonesian Archipelago in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*. Lisbon: Calouste Gulbenkian Foundation.
- Foray, Jennifer L. 2012. *Vissions of Empire in the Nazi-occupied Netherlands*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Roelofs, M.A.P. Meilink. 1962. *Asian Trade and European Influence; in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*. The Hague: Martinus Nijhoff.

- Shama, Rajendra K. 2007. *Social Change and Social Control*. New Delhi: Atlantic Publishers.
- Simanjuntak, Truman. 2006. *Archaeology; Indonesian Perspective, R.P. Soejono's Feestschrift*. Jakarta: LIPI .
- Schrieke, B. 1959. *Indonesian Sociological Studies*. Part Two. 's Gravenhage: Van Hoeve.
- Smits, Marinus Barend. 1929. *Over de Landbouw in Nederlandsch Indie*. Baavia: J.B. Wouters Uitgeverij.
- Soekmono, R. 1995. *The Javanese Candi; Function and Meaning*. Leiden: E.J. Brill.
- Soenarpo dkk. 1992. *Pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan*. FKIP Universitas Lampung: Banjarmasin.
- Spiller, Henry. 2004. *The Traditional Sounds of Indonesia*. Vol. I. Santa Barbara: ABC CLIO.
- Suhartiningsih. 2014. *Perubahan Ritual Peralihan Tahap Kelahiran Budaya Jawa pada Masyarakat Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kab. Barito Kuala*. (Tesis). Tidak Diterbitkan. Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lambung Mangkurat: Banjarmasin.
- Sulistiyono, Singgih Tri. 2003. *The Java Sea Network; Patterns in the Development of Interegional Shipping and Trade in the Process of National Economic Integration in Indonesia, 1870s–1970s*. (Disertasi). Tidak Diterbitkan. Universitas Leiden.
- Swasono, Sri Edi dan Masri Singarimbun. 1986. *Transmigrasi di Indonesia 1905–1985*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Team of the History of Sunan Drajad. 1999. *The History of Sunan Drajat; Discovering Network of the Coming of Islam to Indonesian Archipelago*. Jakarta: Research Team.



Utomo, H.M.T. Wedy. 1993. *Kontribusi Transmigrasi dalam Pembangunan Daerah*. Jilid 2. Duta Informatika bekerja sama dengan Kanwil Deptrans dan PPH Prov. Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Jateng.

van Groenendael, Victoria M. Clara. 1987. *Wayang Theatre in Indonesia; An Annotated Bibliography*. London: Foris Publication.

W.P, Suhartono. 2010. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

**Arsip:**

*Algemeen Handelsblad*, edisi 18 Juli 1902, lembar kedua.

*Asian Culture*, edisi Juni 1997, hlm. 78.

*Bataviaasch Nieuwsblad*, edisi 17 November 1900, lembar kedua.

*Bataviaasch Nieuwsblad*, edisi 3 April 1903, lembar kedua.

“De Kolonisatie in 1940” dalam *De Sumatra Post*, edisi 15 Juli 1941, lembar kedua.

“De Viering te Bandjarmasin” dalam *De Indische Courant*, edisi 28 Juli 1938, lembar pertama.

*De Sumatra Post*, edisi 6 April 1904, lembar kedua.

*De Gids*, Thn. 1899, Vol. 17, hlm. 250.

*De Locomotief*, edisi 2 Januari 1903, lembar pertama.

*De Sumatra Post*, edisi 19 Januari 1903, lembar kedua.

“Een Javaan Danst” dalam *Hollandsche Revue*, Thn. 1937, Vol. 37, No. 1.

*Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, edisi 7 Desember 1909, lembar kedua.

-----, edisi 15 September 1903, lembar kedua.

-----, edisi 12 Mei 1906, lembar kedua.

-----, edisi 11 November 1909, lembar kedua.

“Javanen Kolonisatie” dalam *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, edisi 25 Mei 1939, lembar kedua.

*Java Bode*, edisi 16 Juli 1870, lembar kedua.

*Koloniaal Verslag over het jaar*, Thn. 1900, hlm. 35.

-----, Thn. 1901, hlm. 33.

-----, Thn. 1859, hlm. 13.

-----, Thn. 1862, hlm. 15.

-----, Thn. 1864, hlm. 186.

-----, Thn. 1865, hlm. 204.

-----, Thn. 1866, hlm. 217.

-----, Thn. 1868, hlm. 97.

-----, Thn. 1868, hlm. 152.

-----, Thn. 1870, hlm. 198.

-----, Thn. 1888, hlm. 232.

“Moerastrijtbouw voor Javaansche tani’s” dalam *De Indische Courant*, edisi 3 April 1939, lembar kedua.

*Nederlandsch Indie*, Thn. 1861, Vol. 23, hlm. 327.

*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, Thn. 1863, No. 59.

-----, Thn. 1888, No. 58.

*Soerabajasch Handelsblad*, edisi 29 Mei 1902, lembar kedua.

-----, edisi 2 Januari 1903, lembar kedua.

-----, edisi 4 April 1907, lembar kedua.

*The Mining Magazine*, Thn. 1923, Vol. 29, hlm. 9.

*Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, Thn. 1867, Vol. 2, hlm. 293.

*Tijdschrift voor Binnenlandsch Bestuur*, Thn. 1867, Jilid XVI, hlm. 80–83.

*Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid*, Thn. 1876, hlm. 162.

“Wajangpoppen en Plastik” dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, edisi 27 Agustus 1938, lembar kedua.

**Sumber Internet:**

<https://www.gurupendidikan.co.id/transmigrasi-pengertian-tujuan-dan-macam-macam-beserta-contohnya-secara-lengkap>, diakses pada 20 Oktober 2018.

<https://subiyakto.wordpress.com/2010/04/30/budaya-material-masyarakat-banjar>, diakses pada 27 Oktober 2018.

<https://www.kanalinfo.web.id/2015/07/pengertian-kuliner.html>, diakses pada 20 November 2018.

---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

## *Daftar Informan*



1. Nama : Prof. Herry Porda Nugroho Putro  
Umur : 56 tahun  
Pekerjaan : Dosen Unlam  
Alamat : Banjarmasin

- 
2. Nama : M. Zainal Anis M. Hum.  
Umur : 61 tahun

Pekerjaan : Dosen Unlam  
Alamat : Banjarmasin

3. Nama : Abdul Hamid  
Umur : 78 tahun  
Pekerjaan : Tokoh masyarakat  
Alamat : Desa Purwosari

4. Nama : Jaya  
Umur : 61 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Purwosari

5. Nama : Wikaryo

Umur : 58 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Purwosari

6. Nama : Masriati

Umur : 57 tahun

Pekerjaan : Guru

Alamat : Desa Purwosari

7. Nama : Halidah

Umur : 51 tahun

Pekerjaan : Rumah tangga

Alamat : Desa Purwosari

8. Nama : Alilah

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : Rumah tangga

Alamat : Desa Purwosari

9. Nama : Dese

Umur : 34 tahun

Pekerjaan : Guru

Alamat : Desa Purwosari

10. Nama : Parmi

Umur : 38 tahun

Pekerjaan : Rumah tangga

Alamat : Desa Purwosari



---

Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat





---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**



---

**Balai Pelestarian Nilai Budaya  
Kalimantan Barat**

# INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT TRANSMIGRASI JAWA:

Di Desa Purwosari Kecamatan Tamban  
Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan

Perkembangan dan perubahan terjadi karena adanya interaksi yang terjadi antara masyarakat trans dengan masyarakat lokal khususnya Banjar. Hubungan interaksi secara kontinyu menghasilkan akulturasi dan asimilasi yang pada akhirnya akan terintegrasi satu sama lain dan memunculkan mix culture. Perubahan terjadi dalam bidang budaya terutama pada kelahiran, perkawinan, dan kematian. Adat istiadat tetap dalam wadah Jawa tetapi isinya telah bercampur dengan budaya Banjar terutama nilai-nilai budaya Islam. Maka dalam perkembangannya sekarang yang nampak adalah budaya mix culture bukan lagi budaya Jawa atau Banjar. Mix culture dalam bidang ekonomi terjadi bukan hanya dalam kepemilikan lahan, pekarangan dan rumah saja tetapi juga terlihat dari sistem pertanian penduduk trans yang mengadopsi sistem pertanian pasang surut karena lahan yang harus dikerjakan adalah lahan gambut. Dibidang sosial budaya terlihat dari interaksi antara penduduk trans dengan masyarakat setempat yaitu Banjar dan Dayak. Hubungan tolong menolong dan bergotong royong saling membantu dalam membuat rumah atau fasilitas umum menjadi perekat hubungan diantara mereka. Dalam Bidang Budaya atau adat istiadat terlihat dari adat kelahiran, perkawinan, dan kematian tidak lagi cenderung ke adat Jawa asli tetapi sudah bernuansa budaya Islam. Begitu juga dalam bidang kesenian wayang, ludruk, ketoprak sudah dinikmati pula oleh masyarakat Banjar dan Dayak dan sudah mengangkat cerita tentang budaya Islam.

Dibidang kesenian juga nampak terjadi mix culture terutama dengan masuknya unsur-unsur budaya Islam dalam cerita yang ditampilkan. Namun sayang perkembangan kesenian Jawa di daerah Purwosari mengalami kemunduran, baik dalam kendala regenerasi yang tidak dilakukan secara profesional, juga disebabkan pendanaan yang hanya pada swadaya masyarakat saja, sementara dari sisi pemerintah belum nampak.



KSE - 9

